



Katalog : 3301001

INDIKATOR PERUMAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2015



BADAN PUSAT STATISTIK

INDIKATOR PERUMAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2015



Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2015

ISSN: 2302-5905

No. Publikasi: 04230.1609

Katalog BPS: 3301001

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xvi + 115 halaman

Naskah:

Subdirektorat Kesehatan dan Perumahan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<http://www.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Data perumahan dan kesehatan lingkungan merupakan data yang sangat diperlukan untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan dalam kehidupan manusia, khususnya kualitas tempat tinggal. Publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2015 merupakan salah satu upaya Badan Pusat Statistik untuk memenuhi kebutuhan data tersebut.

Publikasi ini memberikan gambaran kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungan. Sumber data publikasi berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan dan Lingkungan 2015 diterbitkan pertama kali pada tahun 2005, dan merupakan publikasi ke-lima yang diterbitkan di tahun 2016. Dengan diterbitkannya publikasi ini, BPS mengharapkan kebutuhan data perumahan dan kesehatan lingkungan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi program pembangunan dapat dipenuhi. Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam menerbitkan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2016

Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suhariyanto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	1
1.3. Sistematika Penyajian.....	2
2. METODOLOGI SUSENAS.....	3
2.1. Stratifikasi.....	3
2.2. Kerangka Sampel.....	4
2.3. Disain Sampel.....	4
2.4. Metode Pengumpulan Data.....	4
2.5. Pengolahan Data.....	5
2.6. Konsep dan Definisi.....	5
3. KONDISI FISIK BANGUNAN.....	13
3.1. Status Kepemilikan Rumah.....	13
3.2. Jenis Atap Terluas.....	15
3.3. Jenis Dinding Terluas.....	16
3.4. Jenis dan Luas Lantai.....	18
4. FASILITAS PERUMAHAN.....	45
4.1. Air Minum.....	45
4.1.1. Sumber Air Minum.....	45
4.1.2. Penggunaan Fasilitas Air Minum.....	48



4.2. Sumber Penerangan	49
4.3. Tempat Buang Air Besar.....	51
4.3.1. Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	51
4.3.2. Penggunaan Kloset	53
5. KESEHATAN LINGKUNGAN.....	69
5.1. Air Minum Layak	69
5.2. Sanitasi Layak	70
5.3. Bahan Bakar Utama untuk Memasak.....	73
5.4. Rumah Layak Huni.....	74
5.5. Rumah Tangga Kumuh.....	75
6. PENGENDALIAN LINGKUNGAN	91
6.1. Penyakit Menular	91
6.2. Pembuangan Sampah.....	96
6.3. Biopori.....	98
6.4. Perubahan Iklim.....	101
7. PENGELUARAN RUMAH TANGGA.....	107
7.1. Pengeluaran Kontrak/Sewa.....	107
7.2. Pengeluaran Penerangan Listrik	108
7.3. Pengeluaran Bahan Bakar Memasak.....	109
7.4. Pengeluaran Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan Rumah.....	109
DAFTAR PUSTAKA	115



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2015.....	14
Tabel 3.2	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berdinding Tembok Menurut Tipe Daerah, 2013-2015	17
Tabel 3.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Kapita $\leq 7,2$ meter persegi Menurut Tipe Daerah, 2013-2015.....	19
Tabel 3.4	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Kapita ≤ 10 meter persegi Menurut Tipe Daerah, 2013-2015.....	19
Tabel 3.5.1	Persentase Rumah Tangga di Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2015	21
Tabel 3.5.2	Persentase Rumah Tangga di Perdesaan Menurut Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2015.....	22
Tabel 3.5.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2015.....	23
Tabel 3.6.1	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri di Perkotaan Menurut Provinsi, 2013-2015.....	24
Tabel 3.6.2	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri di Perdesaan Menurut Provinsi, 2013-2015.....	25
Tabel 3.6.3	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri Menurut Provinsi, 2013-2015.....	26
Tabel 3.7.1	Persentase Rumah Tangga di Perkotaan Menurut Jenis Bahan Bangunan Utama Atap, 2015.....	27
Tabel 3.7.2	Persentase Rumah Tangga di Perdesaan Menurut Jenis Bahan Bangunan Utama Atap, 2015.....	28



Tabel 3.7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bangunan Utama Atap, 2015.....	29
Tabel 3.8.1	Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Menggunakan Jenis Bahan Atap Terluas Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia dan Lainnya, 2013-2015.....	30
Tabel 3.8.2	Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Menggunakan Jenis Bahan Atap Terluas Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia dan Lainnya, 2013-2015.....	31
Tabel 3.8.3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Bahan Atap Terluas Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia dan Lainnya, 2013-2015.....	32
Tabel 3.9.1	Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Berdinding Tembok, 2013-2015.....	33
Tabel 3.9.2	Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Berdinding Tembok, 2013-2015.....	34
Tabel 3.9.3	Persentase Rumah Tangga yang Berdinding Tembok, 2013-2015.....	35
Tabel 3.10.1	Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Berdinding Bambu dan lainnya, 2013-2015.....	36
Tabel 3.10.2	Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Berdinding Bambu dan Lainnya, 2013-2015.....	37
Tabel 3.10.3	Persentase Rumah Tangga yang Berdinding Bambu dan lainnya, 2013-2015.....	38
Tabel 3.11.1	Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Memiliki Luas Lantai per Kapita $\leq 7,2$ meter persegi, 2013-2015.....	39
Tabel 3.11.2	Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Memiliki Luas Lantai per Kapita $\leq 7,2$ meter persegi, 2013-2015.....	40
Tabel 3.11.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Luas Lantai per Kapita $\leq 7,2$ meter persegi, 2013-2015.....	41
Tabel 3.12.1	Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Memiliki Luas Lantai per Kapita < 10 meter persegi, 2013-2015.....	42



Tabel 3.12.2	Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Memiliki Luas Lantai per Kapita < 10 meter persegi, 2013-2015.....	43
Tabel 3.12.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Luas Lantai per Kapita < 10 meter persegi, 2013-2015	44
Tabel 4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah, 2015	46
Tabel 4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum dan Tipe Daerah, 2015	48
Tabel 4.3	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri dan Bersama Menurut Tipe Daerah, 2013-2015.....	51
Tabel 4.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah, 2015.....	53
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, 2015.....	55
Tabel 4.6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Sumber Air Minum Utama di Daerah Perkotaan Indonesia, 2015.....	57
Tabel 4.6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Sumber Air Minum Utama di Daerah Perdesaan Indonesia, 2015	58
Tabel 4.6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Sumber Air Minum Utama di Indonesia, 2015	59
Tabel 4.7.1	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Air Minum, 2015.....	60
Tabel 4.7.2	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Air Minum, 2015.....	60
Tabel 4.7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Air Minum, 2015	61
Tabel 4.8.1	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Sumber Penerangan Utama, 2015	61



Tabel 4.8.2	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Sumber Penerangan Utama, 2015	62
Tabel 4.8.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Penerangan Utama, 2015	62
Tabel 4.9.1	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2015	63
Tabel 4.9.2	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2015	63
Tabel 4.9.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2015	64
Tabel 4.10.1	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2015	64
Tabel 4.10.2	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2015	65
Tabel 4.10.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Jenis Kloset yang Digunakan di Indonesia, 2015	65
Tabel 4.11.1	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015.....	66
Tabel 4.11.2	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015.....	66
Tabel 4.11.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015.....	67
Tabel 5.1.1	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Provinsi, 2013-2015	78
Tabel 5.1.2	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Provinsi, 2013-2015	79
Tabel 5.1.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Provinsi, 2013-2015.....	80
Tabel 5.2.1	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi, 2013-2015	81



Tabel 5.2.2	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi, 2013-2015.....	82
Tabel 5.2.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi, 2013-2015	83
Tabel 5.3.1	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, 2013-2015.....	84
Tabel 5.3.2	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, 2013-2015.....	85
Tabel 5.3.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Provinsi, 2013-2015	86
Tabel 5.4.1	Persentase Rumah Tangga Kumuh di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi, 2013-2015.....	87
Tabel 5.4.2	Persentase Rumah Tangga Kumuh di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi, 2013-2015.....	88
Tabel 5.4.3	Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi, 2013-2015.....	89
Tabel 6.1	Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Provinsi, 2015.....	93
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Lubang resapan Biopori Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Provinsi, 2014.....	100
Tabel 6.3	Kondisi Partikel NO ₂ dan SO ₂ Menurut Provinsi, 2012 – 2014.....	102
Tabel 6.4	Jumlah Titik Api dan Luas Kebakaran Hutan Menurut Provinsi, 2014.....	105
Tabel 7.1	Rata-rata Nilai Kontrak/Sewa dari Rumah Tangga yang Mengontrak/sewa (dalam rupiah), 2013-2015.....	111
Tabel 7.1	Rata-rata Nilai Pembayaran Listrik dari Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (dalam rupiah), 2013-2015	112
Tabel 7.3	Rata-rata Nilai Pengeluaran Bahan Bakar Memasak dari Rumah Tangga yang Memasak (dalam rupiah), 2013-2015.....	113
Tabel 7.4	Rata-rata Nilai Pengeluaran Pemeliharaan Rumah dan Perbaikan Ringan dari Rumah Tangga yang Mengeluarkan Biaya	



<http://www.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Sendiri Menurut Tipe Daerah, 2013 – 2015.....	15
Gambar 3.2	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Beratap Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia dan Lainnya Menurut Tipe Daerah, 2013-2015.....	16
Gambar 3.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berdinding Bambu dan Lainnya Menurut Tipe Daerah, 2013-2015.....	17
Gambar 3.4	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berlantai Tanah Menurut Tipe Daerah, 2013-2015.....	18
Gambar 4.1	Peta Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Kemasan (Bermerk dan Isi Ulang) serta Air Pompa dan Sumur Terlindung Sebagai Sumber Air Minum Utama Menurut Provinsi, 2015.....	47
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum, 2013-2015.....	48
Gambar 4.3	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama Listrik, 2010-2015.....	49
Gambar 4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah, 2015.....	50
Gambar 4.5	Peta Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan dengan Sumber Penerangan Utama Listrik Non PLN Menurut Provinsi, 2015.....	50
Gambar 4.6	Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan yang Tidak Ada Fasilitas Buang Air Besar Menurut Provinsi, 2015.....	52
Gambar 4.7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar dan Menggunakan Jenis Kloset Leher Angsa Atau Plengsengan dengan Tutup Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2015.....	54



Gambar 4.8	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar dan Menggunakan Tangki Septik atau SPAL Sebagai Tempat Pembuangan Akhir Tinja Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2015...	56
Gambar 5.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah, 2015	70
Gambar 5.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, 2015	71
Gambar 5.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi, 2015.....	72
Gambar 5.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Tipe Daerah, 2015	73
Gambar 5.5	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Tipe Daerah, 2015	74
Gambar 5.6	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Tipe Daerah, 2013-2015	75
Gambar 5.7	Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Tipe Daerah, 2015.....	76
Gambar 5.8	Persentase Rumah Tangga Kumuh di Indonesia Menurut Provinsi, 2015.....	77
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Perlakuan Terhadap Sampah dan Tipe Daerah, 2014.....	97
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui atau Pernah Mendengar Mengenai Lubang Resapan Biopori menurut Tipe Daerah, 2014.....	99
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kendaraan Bermotor yang Dimiliki dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan, 2014	103
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kendaraan Bermotor yang Dimiliki dan Cara Penggunaan Kendaraan Bermotor, 2014	104
Gambar 7.1	Rata-rata Nilai Kontrak/Sewa dari Rumah Tangga yang Mengontrak/Sewa (dalam rupiah), 2013-2015	107

Gambar 7.2	Rata-rata Nilai Pembayaran Listrik Sebulan dari Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (dalam rupiah), 2013-2015.....	108
Gambar 7.3	Rata-rata Nilai Pengeluaran Bahan Bakar Memasak Sebulan dari Rumah Tangga yang Memasak (dalam rupiah), 2013-2015.....	109
Gambar 7.4	Rata-rata Nilai Pengeluaran Pemeliharaan Rumah dan Perbaikan Ringan Sebulan dari Rumah Tangga yang Mengeluarkan Biaya Pemeliharaan Rumah dan Perbaikan Ringan Selama Sebulan Terakhir (dalam rupiah), 2013-2015.....	110

<http://www.bps.go.id>



PENDAHULUAN | 1

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan akan perumahan dan permukiman semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk. Ditunjang kemajuan teknologi yang menyentuh bidang perumahan, sarana dan prasarana pendukung terciptanya permukiman yang memenuhi syarat kesehatan menjadi suatu kebutuhan utama. Berbagai sarana dan prasarana permukiman yang penting untuk dipenuhi di antaranya adalah kualitas rumah serta fasilitas sanitasi, ketersediaan listrik, air bersih, dan sarana pembuangan sampah. Sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu faktor penentu derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Kebijakan pembangunan kesehatan lingkungan telah mendapat perhatian khusus dan tercantum dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. RPJMN menekankan strategi peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan strategi peningkatan kesehatan lingkungan serta akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku higienis guna mewujudkan kebijakan peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Dalam menjalankan program kerja, pemerintah memerlukan indikator kualitas kesehatan lingkungan. Berbagai program pemerintah di antaranya penyediaan air bersih yang terjangkau masyarakat, pembangunan sarana/ infrastruktur dengan kelengkapan saluran pembuangan kotoran (*waste disposal*), dan peraturan perundangan yang berpihak pada lingkungan. Program pembangunan kesehatan lingkungan meliputi berbagai program sosial ekonomi, dan budaya, dikarenakan isu kesehatan lingkungan merupakan isu lintas sektor yang terintegrasi.

1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan tahun 2015 bertujuan menyajikan berbagai indikator perumahan yang dapat menggambarkan capaian pembangunan kesehatan lingkungan. Berbagai indikator tersebut meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, kesehatan lingkungan, pengendalian



1. PENDAHULUAN

lingkungan, dan pengeluaran untuk perumahan. Informasi mengenai indikator tersebut bermanfaat bagi banyak pihak, terutama pengambil keputusan, perencana, dan pengguna data lainnya.

1.3. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian "Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2015" terdiri dari 7 bab yaitu:

- Bab I: Pendahuluan, meliputi sub bab: latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, dan sistematika penyajian.
- Bab II: Metodologi Susenas, meliputi sub bab: metodologi, stratifikasi, kerangka sampel, disain sampel, metode pengumpulan data, pengolahan data, serta konsep dan definisi.
- Bab III: Kondisi Fisik Bangunan, meliputi sub bab: status kepemilikan rumah, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, serta jenis dan luas lantai.
- Bab IV: Fasilitas Perumahan, meliputi sub bab: sumber air minum yang digunakan rumah tangga, sumber penerangan, dan tempat buang air besar.
- Bab V: Kesehatan Lingkungan, meliputi sub bab: air minum layak, sanitasi layak, bahan bakar untuk memasak, rumah layak huni, dan rumah tangga kumuh.
- Bab VI: Pengendalian Lingkungan, meliputi sub bab: penyakit menular, pembuangan sampah, biopori, dan perubahan iklim.
- Bab VII: Pengeluaran Rumah Tangga, meliputi sub bab: pengeluaran kontrak/sewa rumah, pengeluaran penerangan listrik, pengeluaran bahan bakar memasak, dan pengeluaran pemeliharaan dan perbaikan rumah.



METODOLOGI SUSENAS | 2

Gambaran kondisi perumahan dan kesehatan lingkungan pada publikasi ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dapat disajikan sampai tingkat nasional dan provinsi. Namun, untuk memperkaya gambaran kondisi perumahan dan kesehatan lingkungan, ditambahkan data sekunder yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait dengan perumahan. Data hasil Susenas dalam publikasi ini, pengumpulan datanya dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2015. Bab Metodologi Susenas dimaksudkan memberi penjelasan mengenai metodologi Susenas tahun 2015. Penjelasan mengenai metodologi Susenas dianggap perlu untuk memberikan latar belakang informasi mengenai indikator perumahan dan kesehatan lingkungan.

Pencacahan Susenas tahun 2015 dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan Maret dan bulan September. Pencacahan Susenas 2015 di bulan Maret menggunakan kuesioner Kor (VSEN2015.K) dan kuesioner konsumsi/pengeluaran (VSEN2015.KP). Jumlah sampel Susenas Maret tahun 2015 ada sebanyak 300.000 rumah tangga dan dapat menghasilkan data yang representatif untuk mengestimasi nasional, provinsi, bahkan kabupaten/kota.

Pencacahan Susenas bulan September tahun 2015 dilakukan menggunakan kuesioner konsumsi/pengeluaran (VSEN2015.KP) dan kuesioner Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (VSEN2015.MSBP). Jumlah sampel Susenas bulan September tahun 2015 ada sebanyak 75.000 rumah tangga. Susenas bulan September tahun 2015 dapat menghasilkan data yang representatif untuk mengestimasi nasional dan provinsi. Tulisan selanjutnya akan mengupas metodologi Susenas bulan Maret 2015.

2.1. Stratifikasi

Stratifikasi dilakukan di seluruh blok sensus dan rumah tangga untuk menjamin keterwakilan populasi wilayah dan sampel. Stratifikasi yang dilakukan adalah:

Seluruh populasi blok sensus biasa hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010), sekitar 720 ribu, distratifikasikan menjadi 3 tingkat kesejahteraan rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *Wealth Index* di perkotaan maupun pedesaan. Seluruh blok sensus ini distratifikasikan menjadi 6 strata blok sensus.



Selanjutnya dilakukan implisit stratifikasi rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga dari hasil pemutakhiran (*updating*). Hal ini dilakukan untuk menjaga keterwakilan dari nilai keragaman karakteristik rumah tangga.

2.2. Kerangka Sampel

Kerangka sampel (*sampling frame*) induk Susenas Maret tahun 2015 didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama, yaitu daftar blok sensus biasa SP2010.
2. Kerangka sampel tahap kedua, yaitu daftar 25 persen blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratifikasinya. Sebanyak 25 persen blok sensus ini disebut *sampling frame* induk.
3. Kerangka sampel tahap ketiga, yaitu daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

2.3. Disain Sampel

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Susenas Maret 2015 dirancang untuk dapat menghasilkan data yang representatif mengestimasi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sampel dipilih dengan metode *two stages one phase stratified sampling* sebagai berikut:

- Tahap 1: Memilih 25 persen blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size* (PPS), dengan *size* jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.
- Tahap 2: Memilih sejumlah *n* blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata perkotaan/perdesaan per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.
- Tahap 3: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga (KRT).

2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu, petugas pengumpul data mengusahakan untuk mewawancarai individu yang bersangkutan. Keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara

dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

2.5. Pengolahan Data

Proses pengolahan data meliputi tahap perekaman data, pemeriksaan konsistensi antar-isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi. Seluruh tahapan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahapan ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya.

Proses perekaman data dilakukan di BPS kabupaten/kota. Dari target 300.000 rumah tangga sampel, hanya 285.908 rumah tangga yang dapat diolah. Faktor pengali/penimbang dihitung dengan menggunakan penduduk tengah tahun 2015 untuk mengestimasi kabupaten/kota.

2.6. Konsep dan Definisi

Sub bab ini menjelaskan konsep dan definisi yang digunakan dalam pendataan Susenas terkait dengan data dan indikator yang disajikan dalam publikasi ini. Konsep dan definisi tersebut adalah sebagai berikut:

Status kepemilikan rumah adalah status kepemilikan rumah yang dihuni rumah tangga pada waktu pencacahan.

Milik sendiri berarti rumah merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.

Kontrak/sewa. Kontrak berarti rumah dikontrak oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru. **Sewa** berarti rumah disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.



2. METODOLOGI SUSENAS

Bebas sewa berarti rumah diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

Dinas berarti rumah dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

Lainnya berarti rumah memiliki status selain yang telah disebutkan sebelumnya, contohnya: rumah adat, dan lain-lain.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Beton adalah jenis atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.

Genteng adalah jenis atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau *fiber/polycarbonate*.

Kayu/sirap adalah jenis atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis seperti kayu ulin atau kayu besi.

Asbes adalah jenis atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Umumnya atap asbes berbentuk gelombang.

Seng adalah jenis atap yang terbuat dari bahan seng yang dapat berbentuk seng rata, seng gelombang. Dalam hal ini termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan garvalum.

Bambu adalah jenis atap yang terbuat dari tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

Jerami/ijuk/alang-alang/rumbia/daun adalah jenis atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya, umumnya berwarna hitam.

Lainnya adalah jenis atap selain yang telah didefinisikan sebelumnya.

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil).



Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako, biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori tembok adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1 – 1,5 m.

Plesteran anyaman bambu/kawat adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, diplester dengan campuran semen dan pasir.

Kayu/papan adalah dinding yang terbuat dari bagian pohon yang berumur tua, biasanya berumur di atas lima (5) tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras. Dalam hal ini termasuk tripleks.

Anyaman bambu adalah dinding yang terbuat dari bambu yang diiris tipis-tipis, dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

Batang kayu adalah dinding yang terbuat dari batang pohon yang masih utuh/bulat.

Bambu adalah dinding yang terbuat dari tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

Lainnya adalah jenis dinding selain yang telah didefinisikan sebelumnya, misalnya seng, kardus, dan lain-lain.

Jenis lantai terluas adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari papan, semen, maupun ubin. Dalam hal ini jenis lantai terluas hanya dibedakan dalam dua kategori, yaitu tanah dan bukan tanah.

Luas lantai yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Bila satu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.



2. METODOLOGI SUSENAS

Sumber air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.

Air kemasan bermerk adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 1liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas.

Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merek.

Air leding PAM/PDAM adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Sumur gali terlindung adalah sumur galian yang lingkaran sumur/periginya dilindungi oleh tembok dengan tinggi paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta terdapat lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.

Sumur gali tak terlindung adalah jenis sumur gali yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.

Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Sumber air dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air permukaan adalah sumber air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

Air hujan adalah sumber air dari air hujan yang dikumpulkan.

Air lainnya adalah jenis sumber air minum selain yang telah didefinisikan sebelumnya, misalnya air laut yang disuling.

Fasilitas air minum adalah ketersediaan fasilitas air minum yang dapat digunakan oleh rumah tangga.

Sendiri adalah penggunaan fasilitas air minum hanya oleh anggota rumah tangga sendiri.

Bersama adalah penggunaan fasilitas air minum bersama-sama oleh beberapa rumah tangga tertentu.

Umum adalah penggunaan fasilitas air minum yang merupakan fasilitas umum dan dapat digunakan oleh siapapun.

Tidak ada adalah tidak terdapat fasilitas air minum di lingkungan permukiman tersebut.

Sumber penerangan berkaitan dengan ketersediaan energi listrik di rumah tangga, apabila responden menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka pilih sumber penerangan yang paling banyak digunakan

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.

Listrik non PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh PLN).

Bukan listrik adalah sumber penerangan dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, dan aladin, lampu minyak tanah lainnya (lampu teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya), lampu karbit, lilin, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kloset (tempat duduk/jongkok digunakan di WC/kakus) yang dapat digunakan oleh rumah tangga.

Sendiri adalah penggunaan fasilitas tempat buang air besar hanya oleh anggota rumah tangga sendiri.

Bersama adalah penggunaan fasilitas tempat buang air besar oleh ≤ 5 rumah tangga tertentu.

MCK Komunal adalah penggunaan fasilitas tempat buang air besar oleh > 5 rumah tangga tertentu.

Umum adalah adalah penggunaan fasilitas tempat buang air besar yang merupakan fasilitas umum dan dapat digunakan oleh siapapun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air yang terletak di lokasi permukiman.



Tidak ada adalah tidak terdapat fasilitas tempat buang air besar di lingkungan permukiman tersebut.

Jamban/Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus.

Kloset leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

Cemplung adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir berupa air.

Cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir berupa lubang tanah, dan lain-lain.

Tidak pakai berarti tidak menggunakan jamban/kloset.

Tangki septik adalah tempat pembuangan akhir tinja berupa bak penampungan, beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan.

SPAL (Saluran Pengolahan Air Limbah) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang dan memisahkan limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk keperluan lain. Pada SPAL, air limbah rumah tangga langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi dua (2) bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk daerah permukiman yang mempunyai SPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

Lubang tanah adalah liang atau lekukan di dalam tanah tanpa pembatas/tembok (tidak kedap air).

Lainnya adalah tempat pembuangan akhir tinja selain yang disebutkan sebelumnya.

Air minum layak adalah air yang bersumber dari leding eceran/meteran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) ≥ 10 m, dan air hujan.

Sanitasi layak adalah kondisi sanitasi dengan syarat menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, menggunakan jenis kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup, dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau SPAL.

Rumah tangga yang menempati rumah layak huni adalah rumah tangga dengan memperhatikan kondisi rumah berdasar 7 (tujuh) indikator pembentuk berikut:

- Jenis atap rumah terbuat dari Jerami/ijuk/alang-alang/rumbia/daun atau lainnya, skor=1.
- Jenis dinding rumah terbuat dari bambu atau lainnya, skor=1.
- Jenis lantai tanah atau lainnya, skor=1.
- Luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, skor=1.
- Sumber penerangan bukan listrik, skor=1.
- Menggunakan air yang termasuk dalam kategori air tidak layak sebagai air minum, skor=1.
- Menggunakan fasilitas sanitasi yang termasuk dalam kategori sanitasi tidak layak, skor=1.

Berdasarkan penilaian jumlah skor sebagaimana dijelaskan di atas, rumah dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Rumah tangga yang menempati rumah layak huni, total skor 0-2.
2. Rumah tangga yang menempati rumah rawan layak huni, total skor 3-4.
3. Rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni, total skor 5-7.

Rumah tangga kumuh adalah rumah tangga dengan memperhatikan kondisi rumah berdasarkan 4 indikator pembentuk berikut:

1. Menggunakan air yang termasuk dalam kategori air tidak layak sebagai air minum, skor=1 dengan bobot 15 persen.
2. Menggunakan fasilitas sanitasi yang termasuk dalam kategori sanitasi tidak layak, skor=1 dengan bobot 15 persen.



2. METODOLOGI SUSENAS

3. Luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi, skor=1 dengan bobot 35 persen.
4. Daya tahan rumah (*durability of housing*), memperhatikan beberapa persyaratan berikut:
 - 1) Jenis atap rumah terbuat dari jerami/ijuk/alang-alang/rumbia/daun atau lainnya, skor=1.
 - 2) Jenis dinding rumah terbuat dari bambu atau lainnya, skor=1.
 - 3) Jenis lantai tanah atau lainnya, skor=1.

Rumah tangga termasuk dalam *undurable* jika rumah yang ditinggali memiliki skor ≥ 2 , bobot untuk indikator *durability of housing* adalah sebesar 35 persen.

Berdasarkan penilaian jumlah skor dikalikan bobot sebagaimana dijelaskan di atas, rumah dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

1. Nilai < 35 persen, rumah tangga tidak menempati rumah kumuh.
2. Nilai ≥ 35 persen, rumah tangga menempati rumah kumuh.



KONDISI FISIK BANGUNAN | 3

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang perlu diperhatikan adalah rumah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.

Berdasarkan fungsi rumah tersebut, status kepemilikan bangunan menjadi dasar yang perlu diperhatikan karena berpengaruh pada rasa aman terhadap keberlangsungan hidup penghuninya. Selain itu, kondisi fisik bangunan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait kualitas hunian. Beberapa komponen fisik rumah yang utama adalah jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan luas lantai.

3.1. Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati menurut Susenas meliputi rumah milik sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (bebas sewa, dinas, dan lainnya). Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa persentase status bangunan tempat tinggal milik sendiri (82,63 persen) lebih tinggi dibanding status bangunan kontrak/sewa atau lainnya (9,29 persen). Berdasarkan tipe daerah, persentase rumah tangga yang tinggal di bangunan milik sendiri di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Sedangkan yang kontrak/ sewa lebih tinggi di perkotaan dibanding di perdesaan.

Berdasarkan hasil Susenas 2015, kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dan kontrak/sewa dipengaruhi oleh pendidikan kepala rumah tangga dan status ekonomi rumah tangga. Persentase kepala rumah tangga tidak/belum pernah sekolah atau belum lulus SD yang tinggal di rumah milik sendiri sebesar 92,41 persen, sedangkan persentase terendah adalah kepala rumah tangga tamat SMA ke atas (72,48 persen). Sebaliknya dengan persentase kepala rumah tangga yang tinggal di bangunan tempat tinggal dengan cara kontrak/sewa, semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga semakin tinggi persentase rumah tangga yang kontrak/sewa rumah.

Kepemilikan bangunan tempat tinggal dengan status ekonomi rumah tangga seperti terlihat pada Tabel 3.1 bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga

semakin rendah persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri. Persentase tertinggi sebesar 88,63 persen rumah tangga dengan status ekonomi 20 persen terbawah sedangkan persentase terendah sebesar 75,36 persen dengan status ekonomi 20 persen teratas. Sebaliknya dengan status bangunan kontrak/sewa, persentase rumah tangga dengan status ekonomi 20 persen atas lebih banyak yang tinggal di rumah kontrak/sewa dibandingkan dengan status ekonomi 20 persen terbawah. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Tabel 3.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Rumah Tangga dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2015

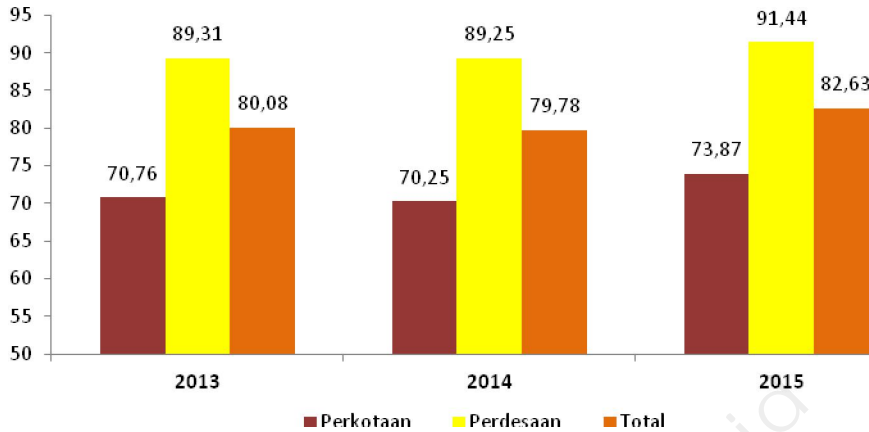
Karakteristik Rumah Tangga	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	82,63	8,08	9,29
Tipe Daerah			
Perkotaan	73,87	14,99	11,14
Perdesaan	91,44	1,14	7,43
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga			
Laki-laki	82,32	8,09	9,58
Perempuan	84,40	8,02	7,58
Pendidikan Kepala Rumah Tangga			
Tidak pernah sekolah atau tidak lulus SD/ sederajat	92,41	1,97	5,62
Lulus SD atau sederajat	88,20	4,36	7,44
Lulus SMP atau sederajat	77,78	10,32	11,90
Lulus SMA ke atas	72,48	15,04	12,47
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga			
Kuintil I	88,63	2,71	8,66
Kuintil II	85,67	4,97	9,36
Kuintil III	83,51	6,70	9,79
Kuintil IV	79,97	10,07	9,97
Kuintil V	75,36	15,97	8,68

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri cenderung meningkat dari tahun 2013 (80,08 persen) sampai tahun 2015 (82,63 persen). Peningkatan tersebut secara umum terjadi juga di daerah perkotaan dan perdesaan.



Gambar 3.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Sendiri Menurut Tipe Daerah, 2013 – 2015



Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

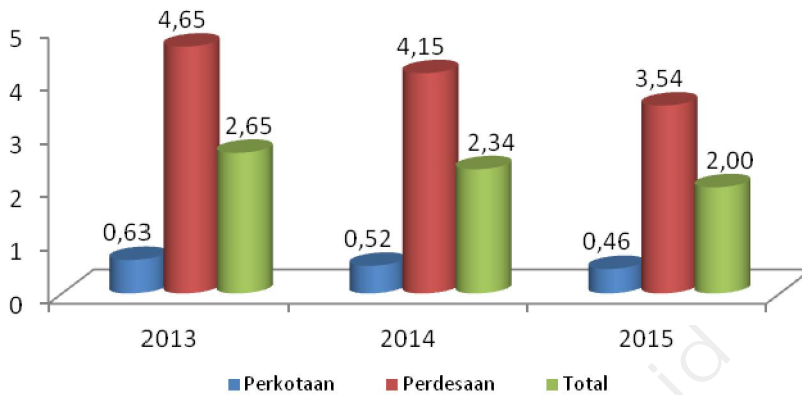
3.2. Jenis Atap Terlulus

Atap merupakan bagian bangunan tempat tinggal yang berfungsi untuk melindungi penghuni rumah secara langsung dari cuaca yang tidak diinginkan seperti panas dan hujan. Kemampuan atap dalam melindungi penghuni dari cuaca yang tidak diinginkan tergantung dari jenis bahan dasar atap. Jenis atap berdasarkan bahan dasar pembuatnya pada Susenas 2015 dibedakan menjadi beton, genteng, kayu/sirap, asbes, seng, bambu, jerami/ijuk/alang-alang/rumbia/ daun, dan lainnya

Hasil Susenas tahun 2013 sampai 2015 pada Gambar 3.2 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang atap rumahnya terbuat dari jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya mengalami sedikit penurunan dari 2,65 persen pada tahun 2013 menjadi 2,00 persen di tahun 2015. Hal ini berarti penggunaan atap kategori rumah tidak layak huni semakin berkurang. Penurunan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan atap dari jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 3.8.3 menyajikan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan atap jerami/ijuk/daun/rumbia menurut provinsi. Dibandingkan dengan persentase nasional, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan atap jerami/ijuk/daun/rumbia relatif tinggi di beberapa provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Papua (33,29 persen), Nusa Tenggara Timur (13,34 persen), dan Sulawesi Tengah (12,14 persen).

Gambar 3.2
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Beratap Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia dan Lainnya Menurut Tipe Daerah, 2013-2015



Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

3.3. Jenis Dinding Terluas

Penggunaan dinding memenuhi syarat kesehatan jika dinding tersebut tidak lembab dan tidak mudah ditembus oleh angin. Jenis bahan dinding yang kualitasnya paling baik adalah tembok. Persentase rumah tangga yang rumahnya berdinding tembok selama tahun 2013 sampai 2015 cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 dimana persentase pada tahun 2013 adalah sebesar 69,87 persen turun menjadi 71,73 persen pada tahun 2015. Persentase rumah tangga yang rumahnya berdinding tembok di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Namun, kenaikan persentase selama periode tahun 2013 sampai 2015 relatif lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

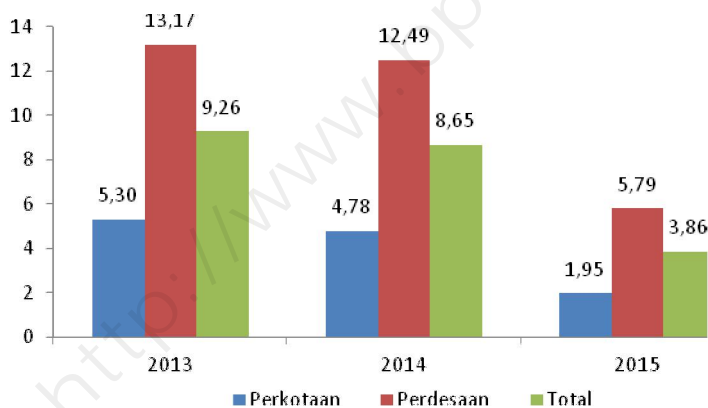
Tabel 3.2
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berdinding Tembok
Menurut Tipe Daerah, 2013-2015

Tipe Daerah	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	84,30	84,85	85,77
Perdesaan	55,59	56,98	57,61
Perkotaan+Perdesaan	69,87	70,87	71,73

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan jenis dinding terbuat dari bambu dan lainnya cenderung menurun, yaitu dari 9,26 persen pada tahun 2013 menjadi 3,86 persen (Gambar 3.3).

Gambar 3.3
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berdinding Bambu dan Lainnya Menurut Tipe Daerah, 2013-2015



Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Persentase rumah tangga dengan dinding rumah terbuat dari bambu dan lainnya menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.6.3. Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang dinding rumahnya terbuat dari bambu dan lainnya adalah Nusa Tenggara Timur (43,92 persen). Selanjutnya, empat provinsi dengan persentase tertinggi adalah Sulawesi Selatan (14,56 persen), Sulawesi Barat (8,37 persen), Papua (5,97 persen), dan Sulawesi Utara (4,85 persen).

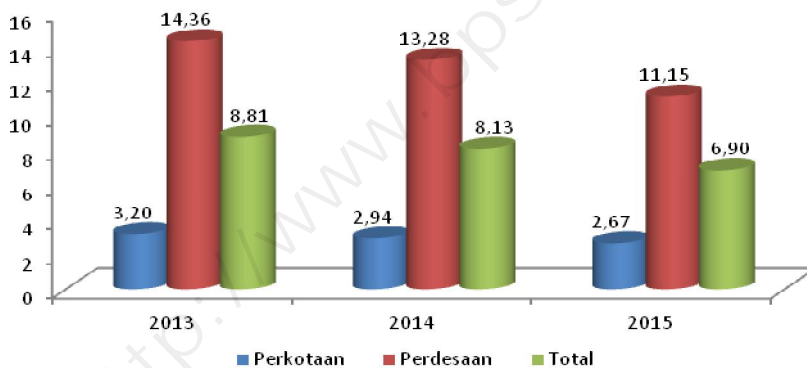


3.4. Jenis dan Luas Lantai

Jenis lantai menggambarkan kualitas rumah. Jenis lantai merupakan salah satu indikator komposit rumah tidak layak huni. Indikator tersebut adalah lantai tanah. Pada Susenas, lantai bukan tanah dibedakan menjadi lantai marmer/granit, keramik, parket/vinil/permadani/ubin/tegel/teraso, kayu/papan dengan kualitas tinggi, semen/bata merah, bambu, kayu/papan dengan kualitas rendah, dan lainnya.

Berdasar data Susenas tahun 2013 sampai 2015, persentase rumah tangga yang lantai rumahnya dari tanah cenderung turun. Sebagaimana pada Gambar 3.4, persentase pada tahun 2013 sebesar 8,81 persen turun menjadi 6,90 persen di tahun 2015. Penurunan persentase rumah tangga dengan rumah berlantai tanah selama tahun 2013 sampai 2015 juga terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan.

Gambar 3.4
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berlantai Tanah Menurut Tipe Daerah, 2013-2015



Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Selanjutnya perbandingan di tingkat provinsi terhadap rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai tanah dan lainnya paling banyak dijumpai di Provinsi Nusa Tenggara Timur (27,92 persen) dengan komposisi di daerah perkotaan sebesar 5,81 persen dan di daerah pedesaan 33,67 persen.

Luas lantai rumah menggambarkan kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangga. Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman pasal 22 ayat 3 dinyatakan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Jika satu bangunan rumah dengan luas lantai ini dihuni oleh 5 orang

maka luas per kapita yang dianjurkan oleh undang-undang ini adalah lebih dari 7,2 meter persegi.

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 7,2 meter persegi tahun 2013 sampai 2015 cenderung menurun. Persentase tersebut pada tahun 2013 sebesar 11,15 persen turun menjadi 10,03 persen di tahun 2015. Searah dengan penurunan persentase tersebut, penurunan persentase juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 3.3
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Kapita \leq 7,2 meter persegi Menurut Tipe Daerah, 2013-2015

Tipe Daerah	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	12,43	12,22	11,39
Perdesaan	9,89	9,21	8,67
Perkotaan+Perdesaan	11,15	10,71	10,03

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

American Public Health Association memiliki standar yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yaitu ukuran luas lantai ideal per orang/kapita minimal adalah 10 meter persegi. Hal ini berarti bahwa luas lantai yang dihuni oleh satu rumah tangga misal terdiri dari 5 orang anggota rumah tangga adalah minimal 50 meter persegi.

Tabel 3.4 menginformasikan bahwa persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 10 meter persegi turun selama periode tahun 2013 sampai 2015. Penurunan persentase di daerah perkotaan sebesar 1,95 persen), di daerah perdesaan sekitar sekitar 2,01 persen dan secara total sebesar 1,96 persen.

Tabel 3.4
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Kapita \leq 10 meter persegi Menurut Tipe Daerah, 2013-2015

Tipe Daerah	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	22,46	22,08	20,51
Perdesaan	19,85	18,93	17,84
Perkotaan+Perdesaan	21,14	20,50	19,18

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Perbandingan persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 7,2 meter persegi dan 10 meter persegi menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.11.3. Provinsi Papua dan Provinsi DKI Jakarta merupakan dua provinsi dengan persentase rumah tangga tertinggi yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 7,2 meter persegi, yaitu 39,69 persen dan 29,65 persen. Demikian juga dengan persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 10 meter persegi, dua provinsi dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Papua sekitar 56,01 persen dan DKI Jakarta sekitar 40,29 persen.

<http://www.bps.go.id>

Tabel 3.5.1
Persentase Rumah Tangga di Perkotaan Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2015

Provinsi	Milik Sendiri	Kontrak/sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	71,80	14,55	13,65
Sumatera Utara	64,72	19,17	16,10
Sumatera Barat	65,17	19,40	15,43
R i a u	56,88	31,53	11,60
J a m b i	73,60	15,50	10,90
Sumatera Selatan	71,36	15,54	13,09
Bengkulu	74,41	15,62	9,98
Lampung	80,55	8,68	10,77
Kep Bangka Belitung	82,59	8,11	9,30
Kepulauan Riau	63,22	30,48	6,30
DKI Jakarta	51,09	34,13	14,78
Jawa Barat	74,72	12,67	12,60
Jawa Tengah	85,14	4,60	10,25
DI Yogyakarta	70,16	19,70	10,14
Jawa Timur	84,27	9,21	6,52
Banten	74,89	18,92	6,19
B a l i	67,28	26,70	6,02
Nusa Tenggara Barat	81,89	6,16	11,95
Nusa Tenggara Timur	71,16	17,03	11,81
Kalimantan Barat	79,63	7,57	12,80
Kalimantan Tengah	70,53	18,43	11,05
Kalimantan Selatan	67,26	19,75	12,99
Kalimantan Timur	64,40	22,91	12,69
Kalimantan Utara	65,65	20,88	13,47
Sulawesi Utara	72,18	9,08	18,75
Sulawesi Tengah	71,57	16,56	11,87
Sulawesi Selatan	75,71	12,07	12,22
Sulawesi Tenggara	69,95	19,22	10,82
Gorontalo	72,94	6,85	20,22
Sulawesi Barat	83,58	6,81	9,61
Maluku	70,13	12,85	17,02
Maluku Utara	73,47	14,80	11,73
Papua Barat	56,66	26,57	16,77
Papua	54,36	27,35	18,29
Indonesia	73,87	14,99	11,14

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.5.2

Persentase Rumah Tangga di Perdesaan Menurut Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2015

Provinsi	Milik Sendiri	Kontrak/sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	86,46	2,02	11,52
Sumatera Utara	77,17	4,68	18,15
Sumatera Barat	79,97	3,18	16,85
R i a u	80,91	3,46	15,64
J a m b i	88,14	2,01	9,85
Sumatera Selatan	89,05	1,60	9,34
Bengkulu	90,28	1,14	8,59
Lampung	93,52	1,00	5,48
Kep Bangka Belitung	92,78	1,60	5,63
Kepulauan Riau	90,88	1,98	7,14
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	91,94	0,62	7,45
Jawa Tengah	95,72	0,39	3,90
DI Yogyakarta	91,70	0,38	7,92
Jawa Timur	96,01	0,37	3,62
Banten	94,06	0,71	5,22
B a l i	93,59	1,52	4,89
Nusa Tenggara Barat	92,09	0,58	7,33
Nusa Tenggara Timur	93,00	0,69	6,31
Kalimantan Barat	94,43	0,46	5,11
Kalimantan Tengah	81,78	2,21	16,01
Kalimantan Selatan	88,08	2,37	9,55
Kalimantan Timur	86,65	2,56	10,80
Kalimantan Utara	85,85	3,46	10,69
Sulawesi Utara	87,48	1,12	11,39
Sulawesi Tengah	92,07	0,71	7,21
Sulawesi Selatan	93,20	0,46	6,34
Sulawesi Tenggara	93,16	0,63	6,21
Gorontalo	86,27	0,29	13,44
Sulawesi Barat	93,31	0,60	6,09
Maluku	89,06	0,88	10,06
Maluku Utara	93,27	1,10	5,63
Papua Barat	84,94	4,20	10,86
Papua	90,62	1,40	7,98
Indonesia	91,44	1,14	7,43

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Tabel 3.5.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2015

Provinsi	Milik Sendiri	Kontrak/sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	82,36	5,52	12,11
Sumatera Utara	71,09	11,76	17,15
Sumatera Barat	74,13	9,58	16,29
R i a u	71,56	14,37	14,07
J a m b i	83,94	5,91	10,15
Sumatera Selatan	83,02	6,36	10,62
Bengkulu	85,52	5,48	9,00
Lampung	90,35	2,87	6,77
Kep Bangka Belitung	87,85	4,75	7,40
Kepulauan Riau	67,67	25,89	6,44
DKI Jakarta	51,09	34,13	14,78
Jawa Barat	80,63	8,54	10,84
Jawa Tengah	90,93	2,29	6,77
DI Yogyakarta	76,99	13,58	9,44
Jawa Timur	90,46	4,55	4,99
Banten	80,94	13,17	5,89
B a l i	77,31	17,10	5,59
Nusa Tenggara Barat	87,85	2,90	9,25
Nusa Tenggara Timur	88,52	4,04	7,44
Kalimantan Barat	90,07	2,55	7,38
Kalimantan Tengah	77,99	7,67	14,34
Kalimantan Selatan	79,22	9,77	11,01
Kalimantan Timur	72,69	15,32	11,99
Kalimantan Utara	74,77	13,02	12,22
Sulawesi Utara	80,44	4,78	14,78
Sulawesi Tengah	87,14	4,52	8,33
Sulawesi Selatan	86,85	4,68	8,47
Sulawesi Tenggara	86,47	6,00	7,54
Gorontalo	81,66	2,56	15,78
Sulawesi Barat	91,47	1,77	6,76
Maluku	81,51	5,65	12,83
Maluku Utara	87,84	4,86	7,31
Papua Barat	74,55	12,42	13,03
Papua	81,69	7,79	10,52
Indonesia	82,63	8,08	9,29

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.6.1
Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri di Perkotaan
Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67,40	68,09	71,80
Sumatera Utara	60,86	61,89	64,72
Sumatera Barat	60,28	59,67	65,17
R i a u	57,33	56,15	56,88
J a m b i	68,28	67,82	73,60
Sumatera Selatan	66,46	68,79	71,36
Bengkulu	73,44	67,08	74,41
Lampung	76,93	79,96	80,55
Kep Bangka Belitung	78,49	77,11	82,59
Kepulauan Riau	60,42	63,84	63,22
DKI Jakarta	47,26	47,76	51,09
Jawa Barat	73,20	72,11	74,72
Jawa Tengah	81,79	81,44	85,14
DI Yogyakarta	68,19	65,80	70,16
Jawa Timur	80,40	79,43	84,27
Banten	70,55	71,31	74,89
B a l i	61,68	56,99	67,28
Nusa Tenggara Barat	81,90	79,77	81,89
Nusa Tenggara Timur	68,15	65,77	71,16
Kalimantan Barat	79,72	77,58	79,63
Kalimantan Tengah	64,41	64,10	70,53
Kalimantan Selatan	64,87	60,98	67,26
Kalimantan Timur	60,39	61,50	64,40
Kalimantan Utara	-	-	65,65
Sulawesi Utara	64,03	61,67	72,18
Sulawesi Tengah	68,72	67,20	71,57
Sulawesi Selatan	68,72	70,51	75,71
Sulawesi Tenggara	67,55	69,72	69,95
Gorontalo	71,51	67,30	72,94
Sulawesi Barat	81,82	82,98	83,58
Maluku	67,54	68,37	70,13
Maluku Utara	71,34	70,90	73,47
Papua Barat	53,45	49,72	56,66
Papua	51,13	51,76	54,36
Indonesia	70,76	70,25	73,87

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 3.6.2
**Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri
 di Perdesaan Menurut Provinsi, 2013-2015**

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	84,71	85,18	86,46
Sumatera Utara	75,19	74,63	77,17
Sumatera Barat	76,96	75,36	79,97
R i a u	78,19	75,79	80,91
J a m b i	84,77	85,58	88,14
Sumatera Selatan	86,93	86,47	89,05
Bengkulu	84,60	86,75	90,28
Lampung	91,06	91,00	93,52
Kep Bangka Belitung	89,70	91,12	92,78
Kepulauan Riau	87,32	90,64	90,88
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	89,27	90,24	91,94
Jawa Tengah	93,34	93,52	95,72
DI Yogyakarta	95,74	94,64	91,70
Jawa Timur	94,04	94,00	96,01
Banten	92,39	92,60	94,06
B a l i	89,54	90,98	93,59
Nusa Tenggara Barat	90,76	89,31	92,09
Nusa Tenggara Timur	92,07	91,35	93,00
Kalimantan Barat	92,51	91,58	94,43
Kalimantan Tengah	78,95	78,30	81,78
Kalimantan Selatan	84,84	84,26	88,08
Kalimantan Timur	80,82	80,80	86,65
Kalimantan Utara	-	-	85,85
Sulawesi Utara	86,13	85,56	87,48
Sulawesi Tengah	88,76	90,08	92,07
Sulawesi Selatan	92,31	91,50	93,20
Sulawesi Tenggara	92,31	92,74	93,16
Gorontalo	85,37	85,54	86,27
Sulawesi Barat	90,62	90,69	93,31
Maluku	87,06	87,35	89,06
Maluku Utara	91,63	92,25	93,27
Papua Barat	81,44	80,34	84,94
Papua	91,54	91,30	90,62
Indonesia	89,31	89,25	91,44

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.6.3
Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri
Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	79,86	80,33	82,36
Sumatera Utara	68,23	68,49	71,09
Sumatera Barat	70,51	69,26	74,13
R i a u	70,17	68,10	71,56
J a m b i	79,93	80,38	83,94
Sumatera Selatan	79,95	80,43	83,02
Bengkulu	81,25	80,65	85,52
Lampung	87,62	88,30	90,35
Kep Bangka Belitung	84,26	84,31	87,85
Kepulauan Riau	64,73	67,92	67,67
DKI Jakarta	47,26	47,76	51,09
Jawa Barat	78,87	78,54	80,63
Jawa Tengah	88,14	88,06	90,93
DI Yogyakarta	76,88	74,97	76,99
Jawa Timur	87,66	87,14	90,46
Banten	77,48	77,97	80,94
B a l i	72,36	69,82	77,31
Nusa Tenggara Barat	87,10	85,29	87,85
Nusa Tenggara Timur	87,43	86,33	88,52
Kalimantan Barat	88,81	87,53	90,07
Kalimantan Tengah	74,10	73,53	77,99
Kalimantan Selatan	76,41	74,39	79,22
Kalimantan Timur	68,10	68,91	72,69
Kalimantan Utara	-	-	74,77
Sulawesi Utara	76,12	74,60	80,44
Sulawesi Tengah	83,91	84,66	87,14
Sulawesi Selatan	83,84	83,82	86,85
Sulawesi Tenggara	85,42	86,33	86,47
Gorontalo	80,71	79,24	81,66
Sulawesi Barat	88,71	89,00	91,47
Maluku	79,53	79,85	81,51
Maluku Utara	85,88	86,14	87,84
Papua Barat	73,01	70,88	74,55
Papua	81,90	81,68	81,69
Indonesia	80,08	79,78	82,63

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 3.7.1
Persentase Rumah Tangga di Perkotaan Menurut Provinsi dan Jenis Bahan Bangunan Utama Atap, 2015

Provinsi	Atap terluas jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya	Atap terluas selain jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya
(1)	(2)	(3)
Aceh	2,04	97,96
Sumatera Utara	1,15	98,85
Sumatera Barat	0,31	99,69
R i a u	0,18	99,82
J a m b i	0,62	99,38
Sumatera Selatan	1,34	98,66
Bengkulu	0,71	99,29
Lampung	0,08	99,92
Kep Bangka Belitung	0,41	99,59
Kepulauan Riau	1,22	98,78
DKI Jakarta	0,14	99,86
Jawa Barat	0,10	99,90
Jawa Tengah	0,08	99,92
DI Yogyakarta	0,13	99,87
Jawa Timur	0,01	99,99
Banten	0,36	99,64
B a l i	0,16	99,84
Nusa Tenggara Barat	3,07	96,93
Nusa Tenggara Timur	1,19	98,81
Kalimantan Barat	1,87	98,13
Kalimantan Tengah	2,10	97,90
Kalimantan Selatan	1,94	98,06
Kalimantan Timur	0,65	99,35
Kalimantan Utara	0,04	99,96
Sulawesi Utara	0,53	99,47
Sulawesi Tengah	2,87	97,13
Sulawesi Selatan	1,58	98,42
Sulawesi Tenggara	4,78	95,22
Gorontalo	1,27	98,73
Sulawesi Barat	5,80	94,20
Maluku	3,00	97,00
Maluku Utara	1,21	98,79
Papua Barat	0,76	99,24
Papua	1,35	98,65
Indonesia	0,46	99,54

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.7.2

Persentase Rumah Tangga di Perdesaan Menurut Provinsi dan Jenis Bahan Bangunan Utama Atap, 2015

Provinsi	Atap terluas jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya	Atap terluas selain jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya
(1)	(2)	(3)
Aceh	9,25	90,75
Sumatera Utara	4,81	95,19
Sumatera Barat	1,21	98,79
R i a u	3,96	96,04
J a m b i	1,15	98,85
Sumatera Selatan	2,48	97,52
Bengkulu	0,15	99,85
Lampung	0,21	99,79
Kep Bangka Belitung	1,57	98,43
Kepulauan Riau	5,47	94,53
DKI Jakarta	-	-
Jawa Barat	0,21	99,79
Jawa Tengah	0,04	99,96
DI Yogyakarta	0,00	100,00
Jawa Timur	0,05	99,95
Banten	5,77	94,23
B a l i	0,42	99,58
Nusa Tenggara Barat	3,03	96,97
Nusa Tenggara Timur	16,48	83,52
Kalimantan Barat	5,14	94,86
Kalimantan Tengah	2,77	97,23
Kalimantan Selatan	9,56	90,44
Kalimantan Timur	1,64	98,36
Kalimantan Utara	0,38	99,62
Sulawesi Utara	3,48	96,52
Sulawesi Tengah	15,07	84,93
Sulawesi Selatan	4,59	95,41
Sulawesi Tenggara	11,75	88,25
Gorontalo	9,69	90,31
Sulawesi Barat	11,94	88,06
Maluku	13,23	86,77
Maluku Utara	9,95	90,05
Papua Barat	3,05	96,95
Papua	43,72	56,28
Indonesia	3,54	96,46

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Tabel 3.7.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Bahan Bangunan Utama Atap, 2015

Provinsi	Atap terluas jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya	Atap terluas selain jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya
(1)	(2)	(3)
Aceh	7,23	92,77
Sumatera Utara	3,02	96,98
Sumatera Barat	0,85	99,15
R i a u	2,49	97,51
J a m b i	1,00	99,00
Sumatera Selatan	2,09	97,91
Bengkulu	0,32	99,68
Lampung	0,18	99,82
Kep Bangka Belitung	1,01	98,99
Kepulauan Riau	1,90	98,10
DKI Jakarta	0,14	99,86
Jawa Barat	0,14	99,86
Jawa Tengah	0,05	99,95
DI Yogyakarta	0,09	99,91
Jawa Timur	0,03	99,97
Banten	2,07	97,93
B a l i	0,26	99,74
Nusa Tenggara Barat	3,05	96,95
Nusa Tenggara Timur	13,34	86,66
Kalimantan Barat	4,17	95,83
Kalimantan Tengah	2,54	97,46
Kalimantan Selatan	6,31	93,69
Kalimantan Timur	1,02	98,98
Kalimantan Utara	0,19	99,81
Sulawesi Utara	2,12	97,88
Sulawesi Tengah	12,14	87,86
Sulawesi Selatan	3,50	96,50
Sulawesi Tenggara	9,74	90,26
Gorontalo	6,78	93,22
Sulawesi Barat	10,77	89,23
Maluku	9,15	90,85
Maluku Utara	7,55	92,45
Papua Barat	2,21	97,79
Papua	33,29	66,71
Indonesia	2,00	98,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.8.1
Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Menggunakan Jenis Bahan Atap Terluas
Jerami/Tjuk/Daun/Rumbia dan Lainnya Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,06	3,71	2,04
Sumatera Utara	1,67	1,24	1,15
Sumatera Barat	1,01	0,46	0,31
R i a u	0,68	0,23	0,18
J a m b i	0,87	0,32	0,62
Sumatera Selatan	1,80	1,76	1,34
Bengkulu	0,36	0,29	0,71
Lampung	0,15	0,21	0,08
Kep Bangka Belitung	0,56	0,67	0,41
Kepulauan Riau	2,59	1,69	1,22
DKI Jakarta	0,20	0,22	0,14
Jawa Barat	0,12	0,05	0,10
Jawa Tengah	0,10	0,13	0,08
DI Yogyakarta	0,02	0,00	0,13
Jawa Timur	0,05	0,08	0,01
Banten	0,46	0,39	0,36
B a l i	0,18	0,06	0,16
Nusa Tenggara Barat	0,89	0,30	3,07
Nusa Tenggara Timur	1,46	1,23	1,19
Kalimantan Barat	2,54	2,26	1,87
Kalimantan Tengah	2,97	2,12	2,10
Kalimantan Selatan	3,41	2,74	1,94
Kalimantan Timur	0,43	0,32	0,65
Kalimantan Utara	-	-	0,04
Sulawesi Utara	0,89	0,69	0,53
Sulawesi Tengah	5,84	5,36	2,87
Sulawesi Selatan	2,09	1,89	1,58
Sulawesi Tenggara	7,35	6,36	4,78
Gorontalo	3,10	1,51	1,27
Sulawesi Barat	13,81	8,43	5,80
Maluku	3,88	3,56	3,00
Maluku Utara	1,00	1,54	1,21
Papua Barat	0,29	0,95	0,76
Papua	1,40	2,58	1,35
Indonesia	0,63	0,52	0,46

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 3.8.2
**Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Menggunakan Jenis Bahan Atap Terluas
 Jerami/Tjuk/Daun/Rumbia dan Lainnya Menurut Provinsi, 2013-2015**

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,83	10,77	9,25
Sumatera Utara	6,64	5,97	4,81
Sumatera Barat	1,74	1,52	1,21
R i a u	4,17	3,87	3,96
J a m b i	1,64	1,28	1,15
Sumatera Selatan	4,30	3,20	2,48
Bengkulu	0,51	0,35	0,15
Lampung	0,35	0,37	0,21
Kep Bangka Belitung	2,83	2,28	1,57
Kepulauan Riau	10,51	6,09	5,47
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	0,37	0,31	0,21
Jawa Tengah	0,19	0,07	0,04
DI Yogyakarta	0,05	0,06	0,00
Jawa Timur	0,03	0,09	0,05
Banten	5,34	5,10	5,77
B a l i	0,53	0,47	0,42
Nusa Tenggara Barat	2,48	1,28	3,03
Nusa Tenggara Timur	21,01	19,12	16,48
Kalimantan Barat	7,12	6,20	5,14
Kalimantan Tengah	5,37	3,52	2,77
Kalimantan Selatan	13,97	11,69	9,56
Kalimantan Timur	1,93	1,63	1,64
Kalimantan Utara		-	0,38
Sulawesi Utara	4,59	3,99	3,48
Sulawesi Tengah	19,81	18,26	15,07
Sulawesi Selatan	7,18	6,17	4,59
Sulawesi Tenggara	16,75	15,32	11,75
Gorontalo	12,48	8,84	9,69
Sulawesi Barat	19,11	15,33	11,94
Maluku	18,04	16,08	13,23
Maluku Utara	10,92	11,58	9,95
Papua Barat	5,29	3,03	3,05
Papua	51,83	49,93	43,72
Indonesia	4,65	4,15	3,54

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.8.3
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jenis Bahan Atap Terluas Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia dan Lainnya Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,37	8,76	7,23
Sumatera Utara	4,22	3,69	3,02
Sumatera Barat	1,46	1,11	0,85
R i a u	2,82	2,44	2,49
J a m b i	1,41	1,00	1,00
Sumatera Selatan	3,45	2,71	2,09
Bengkulu	0,46	0,33	0,32
Lampung	0,30	0,33	0,18
Kep Bangka Belitung	1,73	1,50	1,01
Kepulauan Riau	3,86	2,36	1,90
DKI Jakarta	0,20	0,22	0,14
Jawa Barat	0,21	0,15	0,14
Jawa Tengah	0,15	0,09	0,05
DI Yogyakarta	0,03	0,02	0,09
Jawa Timur	0,04	0,09	0,03
Banten	2,01	1,87	2,07
B a l i	0,32	0,21	0,26
Nusa Tenggara Barat	1,82	0,87	3,05
Nusa Tenggara Timur	17,22	15,62	13,34
Kalimantan Barat	5,79	5,06	4,17
Kalimantan Tengah	4,57	3,05	2,54
Kalimantan Selatan	9,51	7,89	6,31
Kalimantan Timur	1,00	0,82	1,02
Kalimantan Utara	-	-	0,19
Sulawesi Utara	2,92	2,47	2,12
Sulawesi Tengah	16,43	15,21	12,14
Sulawesi Selatan	5,35	4,61	3,50
Sulawesi Tenggara	14,14	12,82	9,74
Gorontalo	9,33	6,30	6,78
Sulawesi Barat	17,96	13,82	10,77
Maluku	12,58	11,13	9,15
Maluku Utara	8,11	8,70	7,55
Papua Barat	3,78	2,39	2,21
Papua	39,80	38,41	33,29
Indonesia	2,65	2,34	2,00

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 3.9.1
Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Berdinding Tembok Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	62,31	58,95	63,37
Sumatera Utara	73,47	74,31	75,46
Sumatera Barat	78,76	77,18	80,43
R i a u	72,41	75,80	76,94
J a m b i	69,21	68,89	69,23
Sumatera Selatan	70,13	73,05	71,81
Bengkulu	83,83	83,63	83,55
Lampung	84,37	83,65	85,10
Kep Bangka Belitung	80,94	82,12	85,72
Kepulauan Riau	81,79	80,74	85,50
DKI Jakarta	92,66	92,12	93,71
Jawa Barat	88,53	89,68	90,29
Jawa Tengah	86,41	86,56	87,59
DI Yogyakarta	94,96	96,27	97,24
Jawa Timur	91,39	92,11	93,09
Banten	93,82	94,17	93,38
B a l i	97,25	97,03	97,36
Nusa Tenggara Barat	86,83	89,28	91,08
Nusa Tenggara Timur	62,39	63,22	67,82
Kalimantan Barat	80,00	80,58	70,86
Kalimantan Tengah	41,17	41,96	43,39
Kalimantan Selatan	33,07	33,48	36,04
Kalimantan Timur	50,83	50,56	49,76
Kalimantan Utara	-	-	47,17
Sulawesi Utara	75,36	74,97	74,83
Sulawesi Tengah	68,71	68,39	71,71
Sulawesi Selatan	63,63	65,53	68,15
Sulawesi Tenggara	62,58	62,19	62,84
Gorontalo	84,45	86,24	86,85
Sulawesi Barat	55,69	54,51	57,62
Maluku	77,09	78,66	80,98
Maluku Utara	85,82	84,89	87,41
Papua Barat	80,68	76,06	78,49
Papua	68,23	70,06	70,99
Indonesia	84,30	84,85	85,77

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.9.2
Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Berdinding Tembok Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	39,35	40,30	40,91
Sumatera Utara	42,49	43,17	43,92
Sumatera Barat	64,48	63,05	65,23
R i a u	38,61	41,19	40,38
J a m b i	53,21	54,05	54,18
Sumatera Selatan	42,65	45,32	47,56
Bengkulu	48,74	50,96	53,80
Lampung	64,35	65,97	67,76
Kep Bangka Belitung	66,64	68,37	71,21
Kepulauan Riau	36,96	42,81	48,86
DKI Jakarta	0,00	-	0,00
Jawa Barat	64,72	66,14	66,22
Jawa Tengah	63,16	64,82	66,88
DI Yogyakarta	78,25	81,62	80,82
Jawa Timur	74,31	75,29	75,65
Banten	61,50	64,33	66,43
B a l i	92,67	94,02	94,83
Nusa Tenggara Barat	66,83	69,35	70,38
Nusa Tenggara Timur	26,31	26,91	28,81
Kalimantan Barat	51,66	54,18	39,21
Kalimantan Tengah	14,49	19,08	20,24
Kalimantan Selatan	14,12	17,16	15,62
Kalimantan Timur	16,02	17,71	22,79
Kalimantan Utara	-	-	13,88
Sulawesi Utara	61,58	60,83	59,93
Sulawesi Tengah	41,68	43,74	46,80
Sulawesi Selatan	25,40	27,71	28,82
Sulawesi Tenggara	29,01	31,36	32,92
Gorontalo	55,29	56,24	57,86
Sulawesi Barat	25,51	28,73	29,60
Maluku	67,62	66,66	70,30
Maluku Utara	67,50	64,82	64,51
Papua Barat	48,89	50,46	48,11
Papua	10,21	8,98	10,69
Indonesia	55,59	56,98	57,61

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 3.9.3
Persentase Rumah Tangga yang Berdinding Tembok Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	45,79	45,59	47,20
Sumatera Utara	57,54	58,17	59,32
Sumatera Barat	70,00	68,54	71,23
R i a u	51,62	54,74	54,60
J a m b i	57,91	58,39	58,53
Sumatera Selatan	52,03	54,80	55,84
Bengkulu	59,28	61,09	62,72
Lampung	69,23	70,29	71,99
Kep Bangka Belitung	73,58	75,05	78,23
Kepulauan Riau	74,61	74,98	79,61
DKI Jakarta	92,66	92,12	93,71
Jawa Barat	80,13	81,33	82,03
Jawa Tengah	73,63	74,65	76,25
DI Yogyakarta	89,69	91,61	92,03
Jawa Timur	82,30	83,22	83,90
Banten	83,58	84,83	84,88
B a l i	95,49	95,89	96,40
Nusa Tenggara Barat	75,10	77,74	78,99
Nusa Tenggara Timur	33,30	34,03	36,81
Kalimantan Barat	59,87	61,83	48,54
Kalimantan Tengah	23,39	26,77	28,04
Kalimantan Selatan	22,12	24,08	24,32
Kalimantan Timur	37,70	37,95	39,71
Kalimantan Utara	-	-	32,15
Sulawesi Utara	67,82	67,32	66,79
Sulawesi Tengah	48,23	49,58	52,78
Sulawesi Selatan	39,13	41,54	43,10
Sulawesi Tenggara	38,35	39,95	41,55
Gorontalo	65,09	66,62	67,88
Sulawesi Barat	32,05	34,37	34,90
Maluku	71,27	71,40	74,56
Maluku Utara	72,69	70,57	70,80
Papua Barat	58,45	58,37	59,27
Papua	24,05	23,84	25,53
Indonesia	69,87	70,87	71,73

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.10.1
Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Berdinding Bambu dan Lainnya Menurut Provinsi,
2013-2015

Provinsi	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,61	2,13	1,43
Sumatera Utara	3,71	3,47	2,41
Sumatera Barat	2,94	2,25	1,34
R i a u	0,61	0,74	0,40
J a m b i	0,52	0,79	0,55
Sumatera Selatan	0,62	0,91	0,88
Bengkulu	3,41	3,91	1,22
Lampung	6,97	8,47	2,19
Kep Bangka Belitung	0,56	0,70	1,78
Kepulauan Riau	1,49	1,40	0,90
DKI Jakarta	1,15	1,12	1,28
Jawa Barat	9,51	8,40	2,14
Jawa Tengah	4,31	3,68	1,40
DI Yogyakarta	3,10	1,98	0,69
Jawa Timur	4,81	4,29	1,28
Banten	3,95	3,44	1,62
B a l i	1,59	1,75	0,72
Nusa Tenggara Barat	8,87	7,18	1,31
Nusa Tenggara Timur	31,08	29,46	22,02
Kalimantan Barat	1,62	1,80	0,90
Kalimantan Tengah	1,13	0,82	1,15
Kalimantan Selatan	0,85	1,96	1,28
Kalimantan Timur	0,52	0,82	0,74
Kalimantan Utara	-	-	0,84
Sulawesi Utara	7,67	7,30	5,32
Sulawesi Tengah	0,94	,56	0,70
Sulawesi Selatan	12,27	11,53	10,88
Sulawesi Tenggara	2,50	3,02	1,39
Gorontalo	8,44	6,43	1,43
Sulawesi Barat	14,47	11,08	9,48
Maluku	2,82	2,67	4,09
Maluku Utara	2,27	2,05	1,99
Papua Barat	2,13	,73	1,60
Papua	2,23	1,75	1,63
Indonesia	5,30	4,78	1,95

1) Dinding bambu dan lainnya (batang kayu termasuk kategori lainnya)

2) Dinding batang kayu, bambu, dan lainnya.

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 3.10.2
Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Berdinding Bambu dan Lainnya Menurut Provinsi,
2013-2015

Provinsi	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,35	3,79	3,11
Sumatera Utara	6,50	5,21	3,93
Sumatera Barat	2,66	3,08	1,75
R i a u	1,38	2,05	1,29
J a m b i	1,06	1,12	1,31
Sumatera Selatan	3,02	1,98	1,91
Bengkulu	7,68	8,04	1,89
Lampung	10,44	9,88	4,72
Kep Bangka Belitung	0,65	0,98	1,28
Kepulauan Riau	0,81	1,47	3,05
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	30,51	28,80	8,01
Jawa Tengah	8,63	8,26	3,10
DI Yogyakarta	14,74	10,85	3,38
Jawa Timur	11,36	10,46	3,90
Banten	33,70	31,10	8,72
B a l i	6,17	4,88	0,99
Nusa Tenggara Barat	18,13	16,67	4,57
Nusa Tenggara Timur	61,83	60,55	49,57
Kalimantan Barat	2,65	3,51	1,78
Kalimantan Tengah	1,60	1,36	2,30
Kalimantan Selatan	1,43	1,87	2,02
Kalimantan Timur	0,94	1,49	1,91
Kalimantan Utara	-	-	0,59
Sulawesi Utara	6,02	5,40	4,44
Sulawesi Tengah	2,90	3,76	2,57
Sulawesi Selatan	22,08	22,41	16,65
Sulawesi Tenggara	3,78	3,54	1,94
Gorontalo	14,72	13,72	2,77
Sulawesi Barat	9,03	7,88	8,11
Maluku	5,77	6,16	3,86
Maluku Utara	3,76	4,02	2,16
Papua Barat	3,58	3,02	4,06
Papua	3,30	2,92	7,38
Indonesia	13,17	12,49	5,79

1) Dinding bambu dan lainnya (batang kayu termasuk kategori lainnya)

2) Dinding batang kayu, bambu, dan lainnya.

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.10.3
Persentase Rumah Tangga yang Berdinding Bambu dan Lainnya Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,86	3,32	2,64
Sumatera Utara	5,15	4,37	3,19
Sumatera Barat	2,77	2,76	1,59
R i a u	1,09	1,54	0,94
J a m b i	0,90	1,02	1,09
Sumatera Selatan	2,21	1,61	1,56
Bengkulu	6,39	6,76	1,69
Lampung	9,59	9,54	4,10
Kep Bangka Belitung	0,61	0,84	1,52
Kepulauan Riau	1,38	1,41	1,25
DKI Jakarta	1,15	1,12	1,28
Jawa Barat	16,92	15,64	4,15
Jawa Tengah	6,68	6,19	2,33
DI Yogyakarta	6,77	4,80	1,54
Jawa Timur	8,30	7,55	2,66
Banten	13,38	12,09	3,86
B a l i	3,35	2,93	0,82
Nusa Tenggara Barat	14,30	12,68	3,21
Nusa Tenggara Timur	55,87	54,45	43,92
Kalimantan Barat	2,35	3,01	1,52
Kalimantan Tengah	1,44	1,18	1,91
Kalimantan Selatan	1,18	1,91	1,70
Kalimantan Timur	0,68	1,08	1,18
Kalimantan Utara	-	-	0,72
Sulawesi Utara	6,77	6,27	4,85
Sulawesi Tengah	2,43	3,00	2,12
Sulawesi Selatan	18,56	18,43	14,56
Sulawesi Tenggara	3,43	3,40	1,78
Gorontalo	12,61	11,20	2,31
Sulawesi Barat	10,21	8,58	8,37
Maluku	4,63	4,78	3,95
Maluku Utara	3,34	3,46	2,12
Papua Barat	3,15	2,31	3,15
Papua	3,05	2,64	5,97
Indonesia	9,26	8,65	3,86

1) Dinding bambu dan lainnya (batang kayu termasuk kategori lainnya)

2) Dinding batang kayu, bambu, dan lainnya.

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 3.11.1
Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Memiliki Luas Lantai per Kapita \leq 7,2 meter persegi
Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,97	11,18	10,09
Sumatera Utara	11,28	10,93	9,74
Sumatera Barat	13,63	12,48	12,41
R i a u	8,90	9,30	8,43
J a m b i	8,05	7,74	7,32
Sumatera Selatan	19,66	19,36	18,33
Bengkulu	11,27	11,74	10,48
Lampung	9,02	8,76	6,52
Kep Bangka Belitung	7,57	7,01	6,45
Kepulauan Riau	15,82	12,49	6,47
DKI Jakarta	28,76	27,89	29,65
Jawa Barat	13,14	13,25	11,25
Jawa Tengah	4,42	4,63	4,14
DI Yogyakarta	5,02	5,15	5,65
Jawa Timur	7,89	8,07	7,68
Banten	12,48	11,59	12,19
B a l i	15,99	17,56	13,79
Nusa Tenggara Barat	19,10	15,92	14,44
Nusa Tenggara Timur	23,58	21,05	20,40
Kalimantan Barat	9,47	10,22	8,06
Kalimantan Tengah	13,32	13,16	10,31
Kalimantan Selatan	12,19	12,84	14,04
Kalimantan Timur	11,74	11,82	10,78
Kalimantan Utara	-	-	16,83
Sulawesi Utara	15,92	15,78	13,72
Sulawesi Tengah	12,08	13,72	12,87
Sulawesi Selatan	14,18	12,48	12,21
Sulawesi Tenggara	18,81	15,20	17,14
Gorontalo	15,57	14,86	10,54
Sulawesi Barat	11,93	13,42	9,66
Maluku	19,96	17,71	17,72
Maluku Utara	9,56	9,03	8,67
Papua Barat	22,99	22,36	22,19
Papua	21,45	20,08	18,11
Indonesia	12,43	12,22	11,39

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.11.2
Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Memiliki Luas Lantai per Kapita \leq 7,2 meter persegi
Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	16,43	15,88	14,44
Sumatera Utara	16,83	15,82	16,52
Sumatera Barat	14,25	13,81	13,03
R i a u	11,49	11,37	10,25
J a m b i	8,16	8,09	8,53
Sumatera Selatan	16,30	14,89	13,59
Bengkulu	13,73	11,08	9,92
Lampung	5,45	4,94	4,12
Kep Bangka Belitung	4,52	3,25	4,30
Kepulauan Riau	13,29	11,06	5,60
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	9,85	8,91	8,02
Jawa Tengah	1,45	1,40	1,85
DI Yogyakarta	0,32	0,47	0,97
Jawa Timur	2,27	1,91	2,33
Banten	10,72	9,72	9,07
B a l i	12,99	9,55	7,53
Nusa Tenggara Barat	17,40	16,27	14,30
Nusa Tenggara Timur	27,42	24,61	22,64
Kalimantan Barat	15,39	13,38	12,16
Kalimantan Tengah	12,21	12,60	10,01
Kalimantan Selatan	8,97	8,01	8,32
Kalimantan Timur	10,16	10,18	8,10
Kalimantan Utara	-	-	8,20
Sulawesi Utara	19,46	18,05	14,74
Sulawesi Tengah	14,68	14,32	13,47
Sulawesi Selatan	8,35	8,25	7,65
Sulawesi Tenggara	13,42	12,69	11,23
Gorontalo	21,34	19,43	21,24
Sulawesi Barat	17,24	15,11	15,88
Maluku	18,89	20,14	17,13
Maluku Utara	12,97	13,93	10,65
Papua Barat	16,90	15,92	15,08
Papua	52,82	50,72	46,75
Indonesia	9,89	9,21	8,67

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 3.11.3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Luas Lantai per Kapita \leq 7,2 meter persegi Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	14,90	14,55	13,22
Sumatera Utara	14,13	13,47	13,21
Sumatera Barat	14,01	13,29	12,79
R i a u	10,50	10,56	9,54
J a m b i	8,13	7,99	8,18
Sumatera Selatan	17,44	16,42	15,21
Bengkulu	12,99	11,29	10,09
Lampung	6,32	5,87	4,70
Kep Bangka Belitung	6,00	5,08	5,34
Kepulauan Riau	15,41	12,27	6,33
DKI Jakarta	28,76	27,89	29,65
Jawa Barat	11,98	11,71	10,14
Jawa Tengah	2,79	2,86	2,88
DI Yogyakarta	3,54	3,66	4,17
Jawa Timur	4,90	4,81	4,86
Banten	11,92	11,00	11,20
B a l i	14,84	14,54	11,41
Nusa Tenggara Barat	18,10	16,12	14,36
Nusa Tenggara Timur	26,68	23,91	22,18
Kalimantan Barat	13,67	12,47	10,95
Kalimantan Tengah	12,58	12,79	10,11
Kalimantan Selatan	10,33	10,06	10,76
Kalimantan Timur	11,15	11,19	9,78
Kalimantan Utara	-	-	12,94
Sulawesi Utara	17,86	17,01	14,27
Sulawesi Tengah	14,05	14,18	13,33
Sulawesi Selatan	10,44	9,79	9,31
Sulawesi Tenggara	14,92	13,39	12,93
Gorontalo	19,41	17,85	17,54
Sulawesi Barat	16,09	14,74	14,70
Maluku	19,31	19,18	17,37
Maluku Utara	12,00	12,53	10,10
Papua Barat	18,74	17,91	17,70
Papua	45,34	43,27	39,69
Indonesia	11,15	10,71	10,03

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.12.1
Persentase Rumah Tangga di Perkotaan yang Memiliki Luas Lantai per Kapita < 10 meter persegi
Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	22,73	23,27	21,06
Sumatera Utara	21,09	20,52	19,67
Sumatera Barat	24,97	22,66	22,24
R i a u	20,29	19,91	18,48
J a m b i	18,54	17,16	16,93
Sumatera Selatan	33,30	33,42	31,88
Bengkulu	20,82	25,21	22,88
Lampung	18,99	17,31	14,62
Kep Bangka Belitung	16,80	15,64	13,54
Kepulauan Riau	26,00	24,31	17,16
DKI Jakarta	41,54	40,83	40,29
Jawa Barat	24,74	24,12	21,69
Jawa Tengah	10,19	10,27	9,18
DI Yogyakarta	15,68	16,96	15,43
Jawa Timur	14,39	15,06	13,72
Banten	23,51	22,22	21,74
B a l i	25,61	26,38	23,19
Nusa Tenggara Barat	34,10	30,91	28,50
Nusa Tenggara Timur	39,39	37,11	35,41
Kalimantan Barat	21,32	19,20	17,67
Kalimantan Tengah	24,88	24,96	19,94
Kalimantan Selatan	22,87	25,50	24,86
Kalimantan Timur	21,63	21,13	20,12
Kalimantan Utara			26,39
Sulawesi Utara	31,17	27,89	25,11
Sulawesi Tengah	23,87	25,46	25,59
Sulawesi Selatan	24,42	22,43	20,76
Sulawesi Tenggara	30,31	28,15	28,08
Gorontalo	28,48	27,54	21,43
Sulawesi Barat	22,76	24,92	20,51
Maluku	32,68	32,20	33,77
Maluku Utara	17,82	17,01	19,09
Papua Barat	38,43	38,07	36,70
Papua	38,34	36,00	33,14
Indonesia	22,46	22,08	20,51

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 3.12.2
**Persentase Rumah Tangga di Perdesaan yang Memiliki Luas Lantai per Kapita < 10 meter persegi
 Menurut Provinsi, 2013-2015**

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,17	31,61	29,65
Sumatera Utara	30,15	29,15	29,20
Sumatera Barat	27,33	26,19	25,43
R i a u	23,96	23,34	21,12
J a m b i	19,44	18,95	19,44
Sumatera Selatan	29,84	28,63	26,27
Bengkulu	28,28	25,45	22,71
Lampung	12,38	11,74	10,86
Kep Bangka Belitung	12,08	11,05	10,42
Kepulauan Riau	25,73	22,15	17,31
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	22,26	21,03	19,21
Jawa Tengah	5,41	5,06	5,02
DI Yogyakarta	2,76	3,02	2,37
Jawa Timur	6,88	6,60	6,49
Banten	25,19	23,12	21,55
B a l i	23,93	19,38	17,27
Nusa Tenggara Barat	35,36	33,22	29,09
Nusa Tenggara Timur	45,82	42,88	39,80
Kalimantan Barat	31,17	27,44	27,68
Kalimantan Tengah	24,63	25,74	22,71
Kalimantan Selatan	18,05	17,19	17,23
Kalimantan Timur	22,92	19,74	18,79
Kalimantan Utara			16,72
Sulawesi Utara	33,00	32,38	28,35
Sulawesi Tengah	28,74	27,38	26,48
Sulawesi Selatan	18,25	17,15	16,07
Sulawesi Tenggara	24,87	23,51	21,71
Gorontalo	36,33	35,21	35,27
Sulawesi Barat	31,34	30,01	29,43
Maluku	35,03	36,14	32,61
Maluku Utara	26,62	27,58	24,44
Papua Barat	31,94	30,31	31,69
Papua	68,11	67,23	63,48
Indonesia	19,85	18,93	17,84

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



3. KONDISI FISIK BANGUNAN

Tabel 3.12.3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Luas Lantai per Kapita < 10 meter persegi Menurut Provinsi,
2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,52	29,24	27,24
Sumatera Utara	25,75	24,99	24,55
Sumatera Barat	26,42	24,82	24,17
R i a u	22,55	21,99	20,09
J a m b i	19,17	18,43	18,71
Sumatera Selatan	31,02	30,27	28,19
Bengkulu	26,04	25,37	22,76
Lampung	13,99	13,10	11,77
Kep Bangka Belitung	14,37	13,28	11,93
Kepulauan Riau	25,96	23,98	17,19
DKI Jakarta	41,54	40,83	40,29
Jawa Barat	23,86	23,02	20,84
Jawa Tengah	7,56	7,41	6,90
DI Yogyakarta	11,60	12,52	11,29
Jawa Timur	10,39	10,59	9,91
Banten	24,04	22,50	21,68
B a l i	24,97	23,74	20,93
Nusa Tenggara Barat	34,84	32,25	28,85
Nusa Tenggara Timur	44,58	41,75	38,90
Kalimantan Barat	28,32	25,06	24,73
Kalimantan Tengah	24,72	25,48	21,78
Kalimantan Selatan	20,08	20,71	20,48
Kalimantan Timur	22,12	20,59	19,63
Kalimantan Utara	-	-	22,02
Sulawesi Utara	32,17	30,32	26,86
Sulawesi Tengah	27,56	26,92	26,27
Sulawesi Selatan	20,47	19,08	17,77
Sulawesi Tenggara	26,38	24,80	23,55
Gorontalo	33,69	32,56	30,48
Sulawesi Barat	29,48	28,90	27,74
Maluku	34,12	34,59	33,07
Maluku Utara	24,13	24,55	22,97
Papua Barat	33,89	32,71	33,53
Papua	61,01	59,63	56,01
Indonesia	21,14	20,50	19,18

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



FASILITAS PERUMAHAN | 4

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya tidak hanya melengkapi kebutuhan lahir namun juga kebutuhan batin penghuninya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa perumahan yang ideal hendaknya memiliki prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Prasarana berkaitan dengan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Selanjutnya sarana berarti fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum merupakan kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Bab ini memberikan gambaran ketersediaan prasarana perumahan di Indonesia, meliputi sumber air minum dan masak, sumber penerangan rumah, dan fasilitas tempat buang air besar. Beberapa deskripsi mengenai prasarana dilengkapi dengan penyajian data selama periode tiga tahun yaitu tahun 2012 sampai 2015.

4.1. Air Minum

Air merupakan zat penting yang diperlukan tubuh, karena sebagian besar tubuh manusia berisi cairan. Pemenuhan kebutuhan cairan tubuh terutama dari air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/ MENKES/PER/IV/2010, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dengan demikian kualitas sumber air minum perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari kontaminasi bibit penyakit.

4.1.1. Sumber Air Minum

Sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Indonesia sangat bervariasi. Susenas 2015 membedakan jenis sumber air minum sebagai air kemasan bermerk, air isi ulang, leding (baik meteran ataupun eceran), sumur bor/pompa, sumur terlindung dan tidak terlindung, mata air terlindung dan tidak terlindung, air hujan, air sungai, dan lainnya. Variasi sumber air minum dipengaruhi oleh ketersediaan akses terhadap sarana air minum, kondisi sosial ekonomi, dan letak geografis.



4. FASILITAS PERUMAHAN

Secara nasional, sumber air minum sumur terlindung (21,74 persen) dan air isi ulang (21,05 persen) merupakan dua jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga. Jika dipilah menurut tipe daerah, terdapat perbedaan pemakaian sumber air minum rumah tangga dimana di daerah perkotaan lebih banyak rumah tangga yang sumber air minumnya adalah air kemasan (29,24 persen), sedangkan di daerah perdesaan paling banyak menggunakan sumur terlindung (27,70 persen).

Tabel 4.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah, 2015

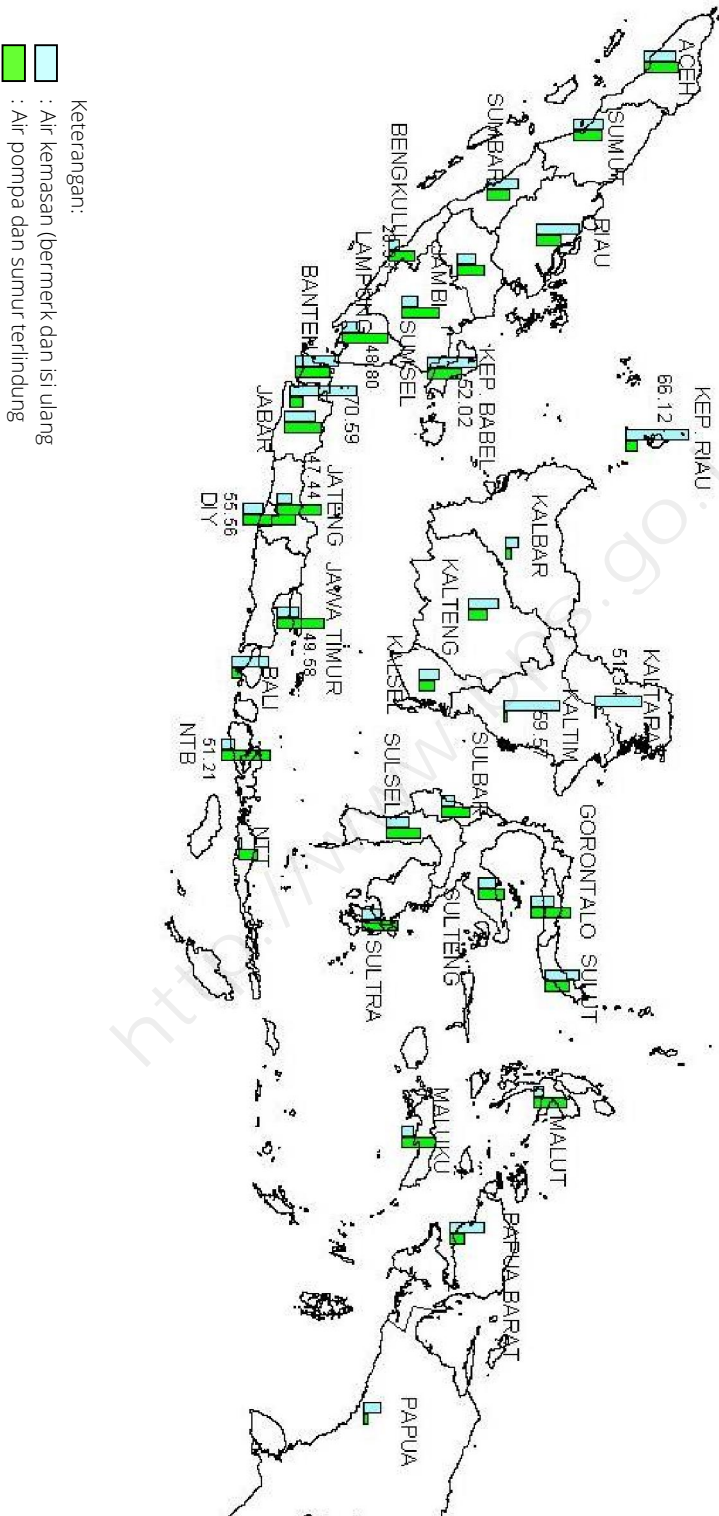
Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan bermerk	15,23	1,64	8,45
Air isi ulang	29,24	12,81	21,05
Leding meteran	13,11	5,11	9,13
Leding eceran	2,50	0,98	1,74
Sumur bor/pompa	16,96	14,69	15,83
Sumur terlindung	15,82	27,70	21,74
Sumur tak terlindung	1,98	8,63	5,29
Mata air terlindung	3,39	15,12	9,24
Mata air tak terlindung	0,49	5,96	3,22
Air permukaan	0,25	3,29	1,77
Air hujan	0,95	3,98	2,46
Lainnya	0,06	0,08	0,07
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Gambar 4.1 memberikan informasi sumber air minum rumah tangga secara spasial yaitu provinsi dengan persentase tertinggi sumber air kemasan (bermerk dan isi ulang), serta sumber air dari pompa dan sumur terlindung. Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga pengguna air kemasan adalah DKI Jakarta (70,59 persen), Kepulauan Riau (66,12 persen), Kalimantan Timur (59,57 persen), Kepulauan Bangka Belitung (52,02 persen), dan Kalimantan Utara (51,34 persen). Selanjutnya lima provinsi dengan rumah tangga yang sumber air minumnya dari pompa dan sumur terlindung adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (55,56 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (51,21 persen), Provinsi Jawa Timur (49,58 persen), Provinsi Lampung (48,80 persen) dan Provinsi Jawa Tengah (47,44 persen).



Gambar 4.1
 Peta Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Kemas (Bermerk dan Isi Ulang) serta Air Pompa dan Sumur Terlindung
 Sebagai Sumber Air Minum Utama Menurut Provinsi, 2015



Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

- Keterangan:
- : Air kemasan (bermerk dan isi ulang)
 - : Air pompa dan sumur terlindung



4. FASILITAS PERUMAHAN

4.1.2. Penggunaan Fasilitas Air Minum

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 64,29 persen rumah tangga di Indonesia yang mempunyai fasilitas air minum sendiri. Persentase rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas air minum sendiri di daerah pedesaan jauh lebih tinggi (42,10 persen) dibandingkan dengan di daerah perkotaan (25,59 persen).

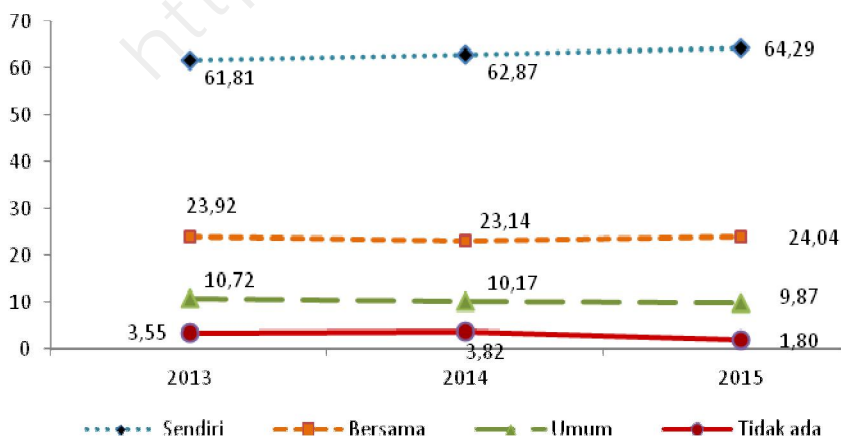
Tabel 4.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum dan Tipe Daerah, 2015

Penggunaan Fasilitas Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	74,41	57,90	64,29
Bersama	19,83	26,70	24,04
Umum	4,78	13,09	9,87
Tidak ada	0,98	2,31	1,80
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Gambar 4.2 menginformasikan bahwa persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas air minum secara nasional selama periode tahun 2013 sampai 2015. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air minum menurun dari 3,55 persen pada tahun 2013 menjadi 1,80 persen pada tahun 2015.

Gambar 4.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum, 2013-2015



Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



4.2. Sumber Penerangan

Sumber penerangan pada Susenas 2015 terdiri dari listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), listrik non PLN, dan bukan listrik (petromak, lampu aladin, pelita, sentir, dan obor). Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik PLN mengindikasikan keterjangkauan listrik PLN di Indonesia. Sebaliknya persentase rumah tangga pengguna listrik non PLN maupun bukan listrik memberikan gambaran besarnya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan listrik PLN..

Perkembangan penggunaan penerangan listrik di Indonesia selama periode tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Gambar 4.3. Pada tahun 2015 terdapat sekitar 97,54 persen rumah tangga yang sumber penerangannya berasal dari listrik, dimana 94,44 persennya disediakan oleh PLN..

Gambar 4.3
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik, 2010-2015



Keterangan: *: *Back-casting*

Sumber: Susenas KOR 2010-2015, BPS

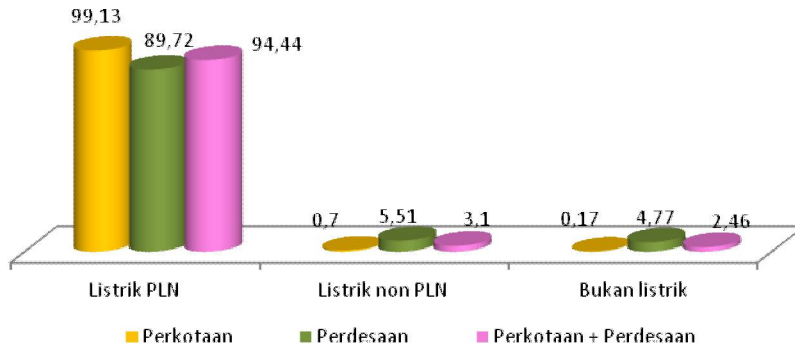
Gambar 4.4 menginformasikan bahwa terdapat perbedaan penggunaan listrik di daerah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan hasil Susenas, hampir seluruh rumah tangga di daerah perkotaan sudah menggunakan sumber penerangan listrik PLN (99,13 persen). Tidak demikian halnya dengan di daerah perdesaan, masih terdapat 10,28 persen rumah tangga yang belum menggunakan sumber penerangan listrik PLN.



4. FASILITAS PERUMAHAN

Gambar 4.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama dan Tipe Daerah, 2015

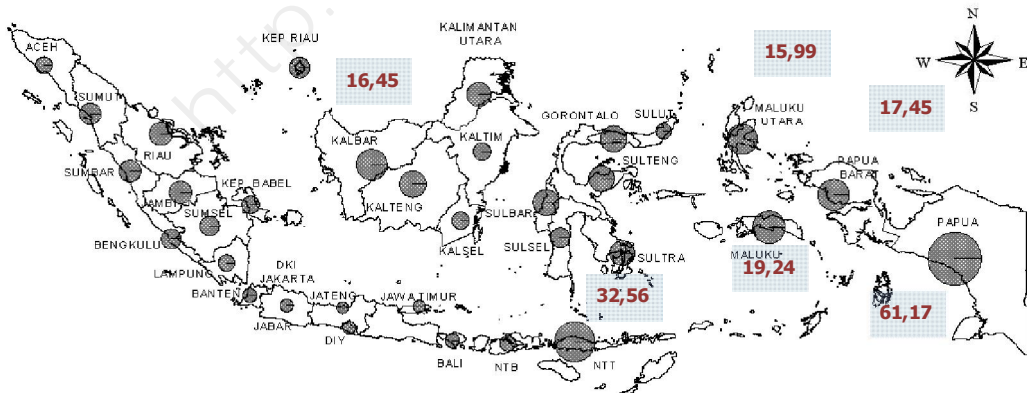


Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Gambar 4.5 memberikan informasi rumah tangga yang masih menggunakan sumber penerangan listrik non PLN di daerah perdesaan menurut provinsi. Dari peta tersebut dapat disimpulkan bahwa di daerah perdesaan bagian timur Indonesia masih banyak rumah tangga menggunakan listrik non PLN. Enam provinsi dengan persentase tertinggi sumber penerangan utama listrik non PLN adalah Papua (61,17 persen), Nusa Tenggara Timur (32,56 persen), Maluku (19,24 persen), Papua Barat (17,45 persen) Kalimantan Barat (16,45 persen), dan Maluku Utara (15,99 persen).

Gambar 4.5

Peta Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan dengan Sumber Penerangan Listrik Non PLN Menurut Provinsi, 2015



Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

4.3. Tempat Buang Air Besar

Fasilitas tempat buang air besar harus memenuhi syarat kesehatan. Tempat buang air besar yang sehat memperhatikan jumlah penggunanya, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir tinja. Bila fasilitas tempat buang air besar memenuhi syarat kesehatan, maka risiko timbulnya penyakit akibat kontaminasi kuman feces terhadap air minum dapat berkurang.

4.3.1. Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar

Sebagaimana tertera pada Tabel 4.3, pada tahun 2015 terdapat sekitar 85,82 persen rumah tangga di Indonesia yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri dan bersama. Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri dan bersama di daerah perdesaan lebih rendah (78,32 persen) dibandingkan dengan di daerah perkotaan (93,27 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa perlu perhatian yang lebih besar terhadap ketersediaan fasilitas buang air besar di daerah perdesaan dibanding di perkotaan.

Tabel 4.3
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri dan Bersama Menurut Tipe Daerah, 2013-2015

Tahun	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Sendiri	Bersama	Sendiri	Bersama	Sendiri	Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	78,38	12,87	61,71	11,15	70,00	12,01
2014	79,43	12,64	63,66	10,69	71,52	11,66
2015	81,64	11,63	67,00	11,32	74,34	11,48

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

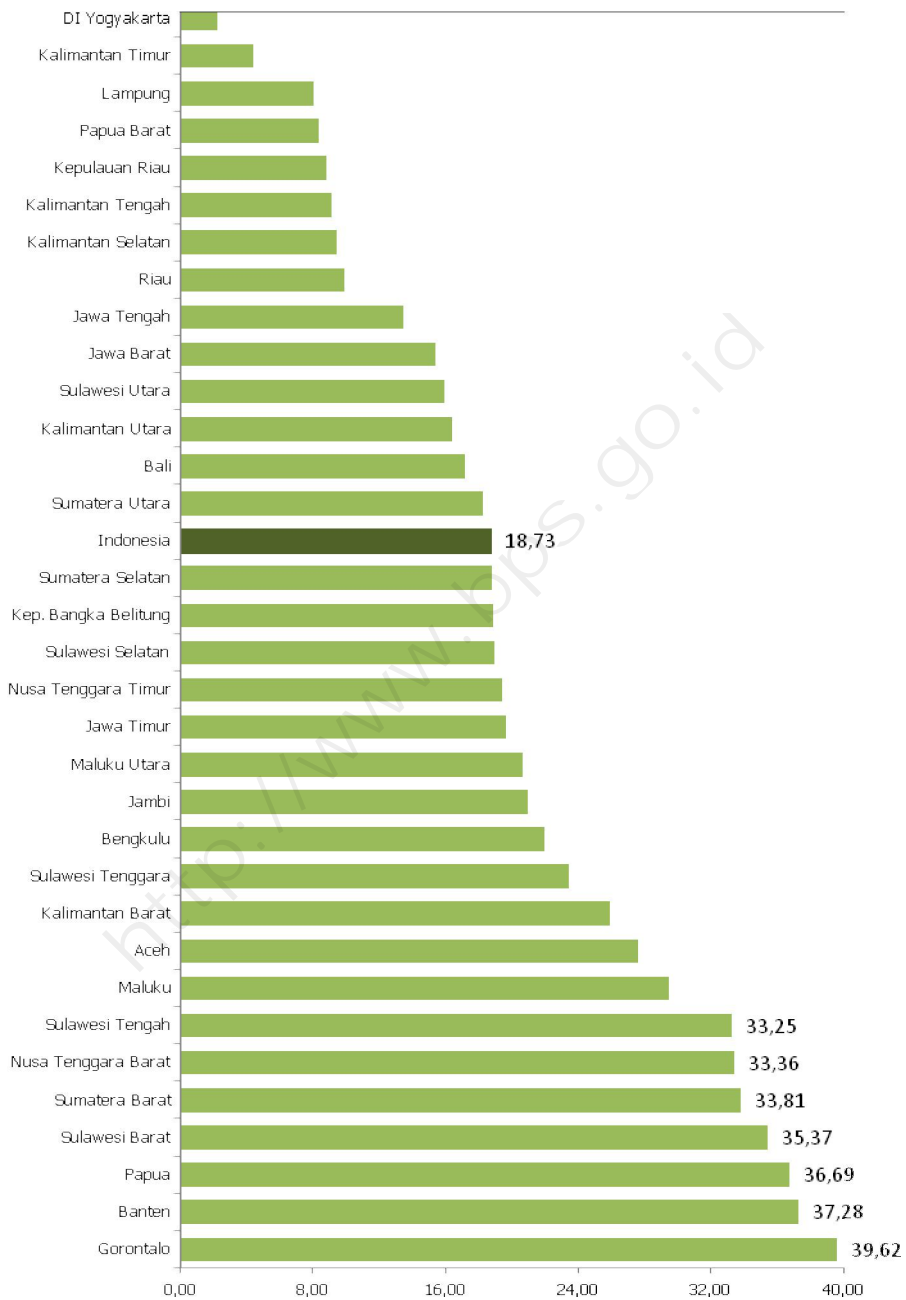
Gambar 4.6 memperlihatkan persentase rumah tangga di daerah perdesaan yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar menurut provinsi di Indonesia. Provinsi Gorontalo, Banten, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah adalah provinsi dengan persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar lebih dari 30 persen.



4. FASILITAS PERUMAHAN

Gambar 4.6

Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan yang Tidak Ada Fasilitas Buang Air Besar Menurut Provinsi, 2015



Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



4.3.2. Penggunaan Kloset

Berbagai jenis kloset digunakan oleh rumah tangga untuk fasilitas buang air besar. Jenis kloset tersebut adalah kloset leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, cemplung/cubluk, namun demikian ada juga yang tidak pakai kloset. Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa masih terdapat 18,88 persen rumah tangga yang klosetnya belum memenuhi syarat kesehatan (selain leher angsa atau plengsengan dengan tutup) di daerah perdesaan.

Tabel 4.4
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar
Menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah, 2015

Jenis Kloset	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Leher Angsa	94,60	79,23	87,55
Plengsengan dengan Tutup	1,10	1,89	1,46
Plengsengan Tanpa Tutup	1,61	2,99	2,24
Cemplung/Cubluk	2,13	13,11	7,17
Tidak Pakai	0,56	2,78	1,58
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

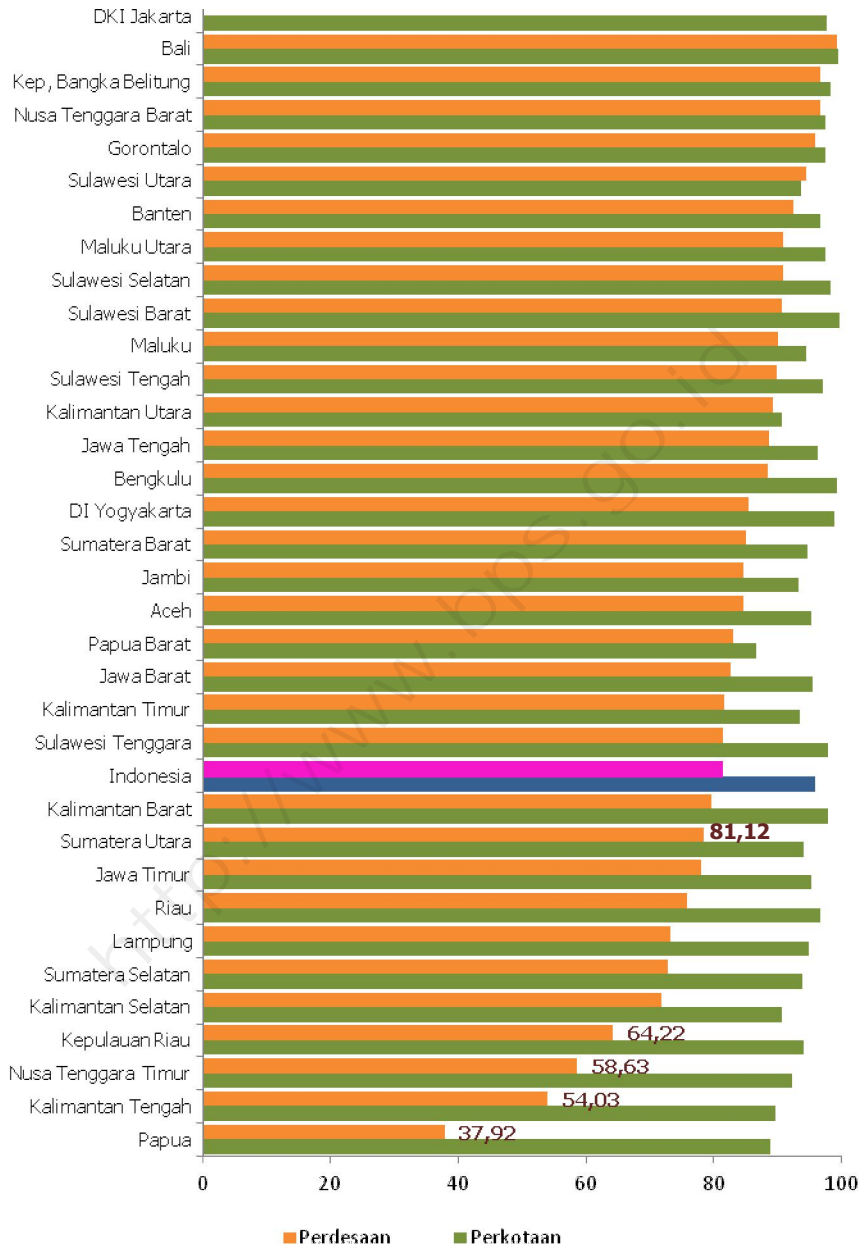
Gambar 4.7 memberikan informasi sekitar 37,92 persen rumah tangga di daerah perdesaan Papua menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup. Hal ini berarti bahwa sekitar 62,08 persen rumah tangga masih menggunakan kloset yang belum memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, tiga provinsi lainnya yang masih memerlukan perhatian terhadap penggunaan kloset yang memenuhi syarat kesehatan adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau.



4. FASILITAS PERUMAHAN

Gambar 4.7

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar dan Menggunakan Jenis Kloset Leher Angsa atau Plengsengan dengan Tutup Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2015



Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



Susenas mengidentifikasi tempat akhir pembuangan tinja (TPAT) adalah tangki septik, saluran pembuangan air limbah (SPAL), kolam/sawah sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sekitar 21,82 persen rumah tangga di daerah perkotaan dan sekitar 50,41 persen rumah tangga di daerah perdesaan yang memiliki fasilitas tempat buang air besar masih menggunakan TPAT kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya.

Tabel 4.5
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar
Menurut Jenis Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, 2015

Jenis Kloset	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki	66,88	42,99	54,97
SPAL	11,30	6,60	8,96
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	11,94	19,65	15,78
Lubang Tanah	8,50	24,10	16,27
Pantai/Tanah Lapang/Kebun	0,69	5,58	3,13
Lainnya	0,69	1,08	0,88
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

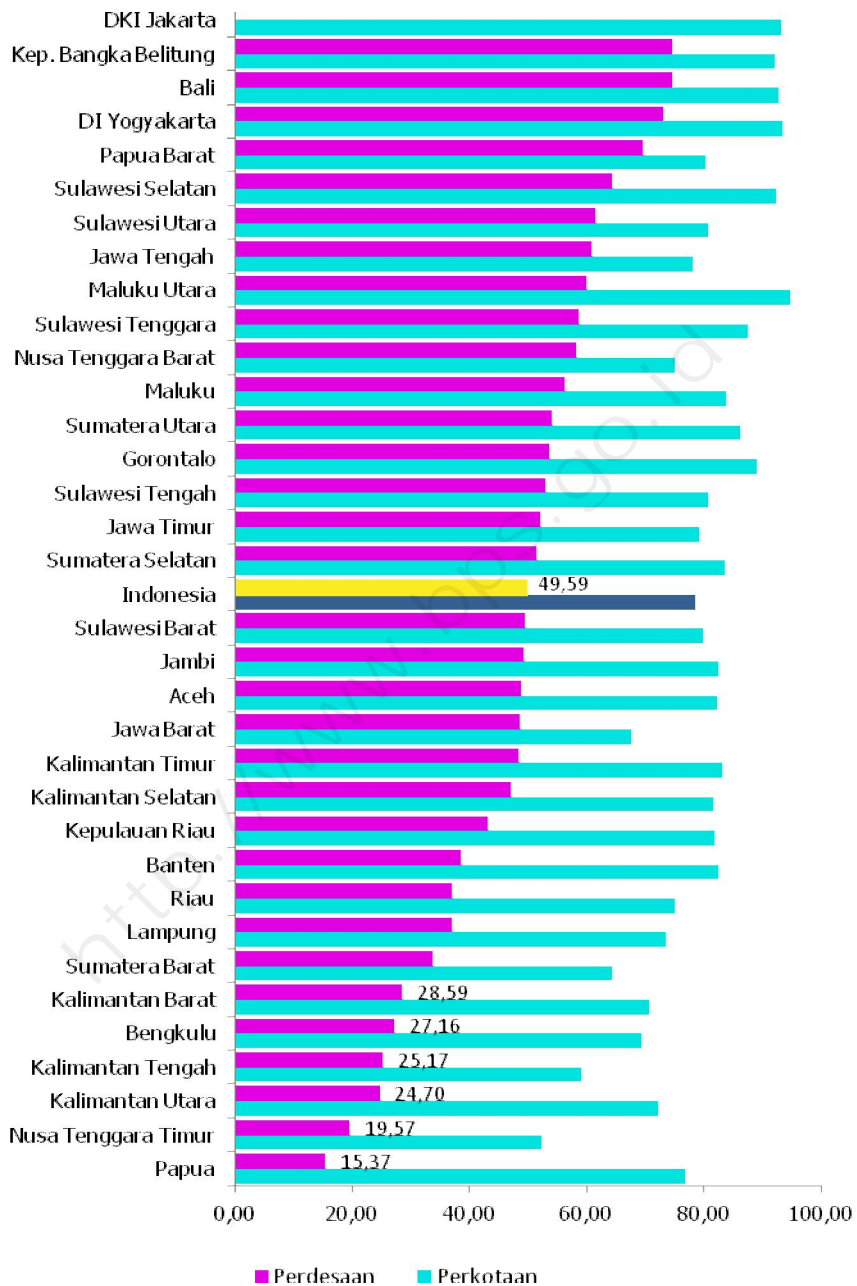
TPAT yang memenuhi syarat kesehatan adalah tangki septik dan SPAL. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas TPAT yang memenuhi syarat kesehatan relatif masih rendah. Secara nasional, masih ada 49,59 persen rumah tangga di daerah perdesaan Indonesia yang menggunakan tangki septik atau SPAL sebagai TPAT. Enam provinsi yang persentase rumah tangga di daerah perdesaan menggunakan tanki septik atau SPAL kurang dari 30 persen adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Kalimantan Barat.



4. FASILITAS PERUMAHAN

Gambar 4.8

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar dan Menggunakan Tangki Septik atau SPAL Sebagai Tempat Pembuangan Akhir Tinja Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2015



Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



Tabel 4.6.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Minum Utama di Daerah Perkotaan Indonesia, 2015

Karakteristik	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Air Kemas Bermerk	Air Isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/ Pomba	Sumur Ter- lindung	Sumur Ter- lindung	Mata Air Ter- lindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lain- nya	Total
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga:														
Laki-Laki	15,31	30,04	12,75	2,42	16,95	15,39	1,92	3,45	0,50	0,24	0,96	0,06	100,00	
Perempuan	14,76	24,77	15,12	2,94	17,01	18,21	2,29	3,06	0,49	0,31	0,93	0,10	100,00	
Pendidikan Kepala Rumah Tangga:														
Tidak Tamat SD	3,61	19,49	11,21	4,21	22,00	25,60	4,22	6,14	1,04	0,55	1,80	0,14	100,00	
SD	6,03	25,29	11,98	3,08	20,05	22,41	3,16	5,62	0,89	0,37	1,04	0,08	100,00	
SMP	9,99	32,73	13,09	2,95	18,28	16,43	1,75	2,99	0,50	0,28	0,97	0,04	100,00	
SMU	20,58	35,70	13,91	1,77	14,43	10,02	0,86	1,74	0,15	0,10	0,68	0,05	100,00	
Perguruan Tinggi	37,89	26,81	15,33	0,76	10,44	6,80	0,40	0,98	0,02	0,06	0,50	0,02	100,00	
Kuintil Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga:														
Kuintil I	1,25	16,03	11,59	3,16	21,64	31,57	4,83	6,68	1,61	0,50	1,11	0,03	100,00	
Kuintil II	2,76	25,68	12,11	3,24	20,44	23,97	3,50	5,66	0,80	0,45	1,32	0,06	100,00	
Kuintil III	5,58	31,16	13,54	3,48	19,20	18,56	2,36	4,08	0,48	0,28	1,18	0,09	100,00	
Kuintil IV	12,03	33,72	14,11	2,64	18,14	13,63	1,41	2,76	0,29	0,22	0,98	0,06	100,00	
Kuintil V	32,50	31,66	13,22	1,37	11,90	6,70	0,48	1,30	0,10	0,09	0,61	0,06	100,00	
Daerah Perkotaan Indonesia	15,23	29,24	13,11	2,50	16,96	15,82	1,98	3,39	0,49	0,25	0,95	0,06	100,00	

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



4. FASILITAS PERUMAHAN

Tabel 4.6.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Minum Utama di Daerah Perdesaan Indonesia, 2015

Karakteristik	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/Pompa	Sumur Ter-lindung	Sumur Ter-lindung	Mata Air Ter-lindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga:													
Laki-Laki	1,65	13,33	5,06	0,92	14,58	27,31	8,66	15,09	5,99	3,28	4,06	0,06	100,00
Perempuan	1,55	9,63	5,45	1,35	15,35	30,12	8,40	15,30	5,81	3,37	3,50	0,18	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga:													
Tidak Tamat SD	0,66	8,26	4,22	1,34	14,61	28,50	9,72	16,01	7,67	3,89	5,02	0,11	100,00
SD	1,08	11,49	4,73	0,80	14,32	28,37	9,21	16,73	6,34	3,28	3,56	0,08	100,00
SMP	1,59	16,28	5,36	0,84	15,32	27,36	8,56	13,29	4,51	3,09	3,76	0,04	100,00
SMU	3,76	20,77	6,97	0,85	15,33	25,49	5,80	11,85	3,39	2,50	3,23	0,07	100,00
Perguruan Tinggi	8,85	22,84	9,18	0,68	14,11	23,25	3,50	10,56	2,53	1,84	2,61	0,05	100,00
Kuintil Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga:													
Kuintil I	0,19	4,96	4,01	0,84	13,25	30,58	10,81	18,88	9,24	3,38	3,78	0,08	100,00
Kuintil II	0,55	8,72	4,42	1,10	14,16	29,57	9,91	16,61	6,92	3,83	4,17	0,07	100,00
Kuintil III	1,03	13,18	5,05	1,06	15,74	27,53	8,71	14,36	5,45	3,57	4,25	0,07	100,00
Kuintil IV	2,01	18,85	5,99	1,03	15,83	25,67	6,88	12,96	3,64	2,95	4,09	0,11	100,00
Kuintil V	6,87	24,81	7,19	0,79	14,67	22,43	4,78	10,19	2,67	2,18	3,35	0,08	100,00
Daerah Perdesaan Indonesia	1,64	12,81	5,11	0,98	14,69	27,70	8,63	15,12	5,96	3,29	3,98	0,08	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



Tabel 4.6.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Minum Utama di Indonesia, 2015

Karakteristik	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Air Kemas Bermerk	Air Isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Ter-lindung	Sumur Ter-lindung	Sumur Tak Ter-lindung	Mata Air Ter-lindung	Mata Air Tak Ter-lindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga:													
Laki-Laki	8,46	21,65	8,89	1,67	15,76	21,37	5,31	9,29	3,25	1,77	2,51	0,06	100,00
Perempuan	8,44	17,52	10,49	2,18	16,22	23,91	5,22	8,92	3,04	1,77	2,16	0,14	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga:													
Tidak Tamat SD	1,61	11,90	6,49	2,27	17,00	27,56	7,93	12,81	5,52	2,81	3,98	0,12	100,00
SD	2,99	16,82	7,53	1,68	16,53	26,07	6,87	12,44	4,24	2,16	2,59	0,08	100,00
SMP	5,95	24,83	9,37	1,94	16,86	21,68	5,02	7,94	2,43	1,63	2,31	0,04	100,00
SMU	15,72	31,39	11,91	1,51	14,69	14,48	2,29	4,66	1,08	0,80	1,41	0,05	100,00
Perguruan Tinggi	32,03	26,01	14,09	0,75	11,18	10,11	1,03	2,91	0,53	0,42	0,92	0,02	100,00
Kuintil Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga:													
Kuintil I	0,56	8,84	6,67	1,66	16,19	30,93	8,71	14,60	6,56	2,37	2,84	0,07	100,00
Kuintil II	1,41	15,32	7,41	1,93	16,60	27,39	7,41	12,34	4,54	2,51	3,06	0,06	100,00
Kuintil III	2,98	20,92	8,71	2,11	17,23	23,67	5,98	9,93	3,31	2,16	2,93	0,08	100,00
Kuintil IV	7,39	26,84	10,35	1,89	17,07	19,21	3,94	7,48	1,84	1,48	2,42	0,08	100,00
Kuintil V	25,69	29,84	11,62	1,21	12,64	10,88	1,62	3,67	0,78	0,65	1,34	0,07	100,00
Tipe Daerah:													
Perkotaan	15,23	29,24	13,11	2,50	16,96	15,82	1,98	3,39	0,49	0,25	0,95	0,06	100,00
Perdesaan	1,64	12,81	5,11	0,98	14,69	27,70	8,63	15,12	5,96	3,29	3,98	0,08	100,00
Indonesia	8,45	21,05	9,13	1,74	15,83	21,74	5,29	9,24	3,22	1,77	2,46	0,07	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



4. FASILITAS PERUMAHAN

Tabel 4.7.1

Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Air Minum, 2015

Karakteristik	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga					
Laki-Laki	75,06	19,23	4,71	1,00	100,00
Perempuan	71,16	22,85	5,10	0,88	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga					
Tidak Tamat SD	65,00	26,59	7,11	1,31	100,00
SD	71,57	21,52	6,12	0,78	100,00
SMP	74,11	20,69	4,14	1,05	100,00
SMU	80,45	15,82	2,82	0,92	100,00
Perguruan Tinggi	89,06	8,17	1,85	0,92	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga					
Kuintil I	63,63	27,91	7,85	0,61	100,00
Kuintil II	68,45	24,22	6,37	0,96	100,00
Kuintil III	72,94	21,26	4,70	1,09	100,00
Kuintil IV	78,12	16,94	3,77	1,16	100,00
Kuintil V	86,11	10,94	1,90	1,05	100,00
Indonesia	74,41	19,83	4,78	0,98	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Tabel 4.7.2

Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Air Minum, 2015

Karakteristik	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga					
Laki-Laki	58,70	26,01	12,97	2,32	100,00
Perempuan	53,24	30,79	13,74	2,23	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga					
Tidak Tamat SD	50,10	31,27	15,73	2,89	100,00
SD	59,55	25,60	12,73	2,11	100,00
SMP	62,32	24,81	10,75	2,13	100,00
SMU	65,95	21,71	10,69	1,65	100,00
Perguruan Tinggi	74,05	16,51	7,84	1,60	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga					
Kuintil I	48,49	32,52	17,01	1,98	100,00
Kuintil II	54,07	28,76	14,57	2,60	100,00
Kuintil III	60,57	24,87	11,97	2,59	100,00
Kuintil IV	65,49	22,29	9,92	2,30	100,00
Kuintil V	71,85	18,76	7,57	1,82	100,00
Indonesia	57,90	26,70	13,09	2,31	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



Tabel 4.7.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Air Minum, 2015

Karakteristik	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga					
Laki-Laki	64,93	23,42	9,82	1,82	100,00
Perempuan	60,72	27,48	10,13	1,67	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga					
Tidak Tamat SD	54,27	29,96	13,32	2,45	100,00
SD	63,43	24,29	10,60	1,68	100,00
SMP	67,26	23,09	7,98	1,68	100,00
SMU	74,37	18,29	6,12	1,23	100,00
Perguruan Tinggi	84,09	10,93	3,83	1,15	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga					
Kuintil I	53,25	31,07	14,13	1,55	100,00
Kuintil II	58,77	27,27	11,89	2,06	100,00
Kuintil III	64,87	23,62	9,44	2,07	100,00
Kuintil IV	70,97	19,97	7,25	1,81	100,00
Kuintil V	80,19	14,19	4,25	1,37	100,00
Indonesia	64,29	24,04	9,87	1,80	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Tabel 4.8.1
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Sumber Penerangan Utama, 2015

Karakteristik	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga				
Laki-Laki	99,12	0,72	0,16	100,00
Perempuan	99,18	0,61	0,21	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga				
Tidak Tamat SD	98,46	0,97	0,57	100,00
SD	98,96	0,87	0,17	100,00
SMP	99,35	0,52	0,13	100,00
SMU	99,31	0,63	0,06	100,00
Perguruan Tinggi	99,45	0,51	0,04	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga				
Kuintil I	98,61	1,00	0,39	100,00
Kuintil II	98,93	0,80	0,27	100,00
Kuintil III	99,08	0,72	0,19	100,00
Kuintil IV	99,19	0,69	0,13	100,00
Kuintil V	99,38	0,56	0,06	100,00
Indonesia	99,13	0,70	0,17	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



4. FASILITAS PERUMAHAN

Tabel 4.8.2
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Sumber Penerangan Utama, 2015

Karakteristik	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga				
Laki-Laki	89,36	5,85	4,79	100,00
Perempuan	91,92	3,43	4,65	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga				
Tidak Tamat SD	87,07	5,31	7,61	100,00
SD	90,75	5,42	3,83	100,00
SMP	90,45	6,01	3,55	100,00
SMU	91,26	5,93	2,80	100,00
Perguruan Tinggi	94,18	4,49	1,33	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga				
Kuintil I	87,56	4,40	8,04	100,00
Kuintil II	89,57	4,83	5,60	100,00
Kuintil III	90,82	5,34	3,84	100,00
Kuintil IV	90,86	6,38	2,76	100,00
Kuintil V	90,21	7,81	1,98	100,00
Indonesia	89,72	5,51	4,77	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Tabel 4.8.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Penerangan Utama, 2015

Karakteristik	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga				
Laki-Laki	94,22	3,30	2,48	100,00
Perempuan	95,71	1,96	2,34	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga				
Tidak Tamat SD	90,77	3,91	5,33	100,00
SD	93,92	3,66	2,42	100,00
SMP	95,07	3,16	1,77	100,00
SMU	96,99	2,16	0,85	100,00
Perguruan Tinggi	98,39	1,31	0,30	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga				
Kuintil I	91,44	3,21	5,36	100,00
Kuintil II	93,22	3,26	3,52	100,00
Kuintil III	94,38	3,35	2,27	100,00
Kuintil IV	95,33	3,32	1,34	100,00
Kuintil V	96,95	2,48	0,57	100,00
Indonesia	94,44	3,10	2,46	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



Tabel 4.9.1
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2015

Karakteristik	Sendiri	Bersama	MCK Komunal	Umum	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga						
Laki-Laki	82,53	11,00	0,34	1,49	4,63	100,00
Perempuan	76,69	15,15	0,41	1,74	6,01	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga						
Tidak Tamat SD	68,41	13,73	0,57	3,02	14,27	100,00
SD	76,65	12,69	0,52	2,54	7,60	100,00
SMP	80,13	14,10	0,36	1,63	3,78	100,00
SMU	86,77	11,36	0,26	0,64	0,98	100,00
Perguruan Tinggi	94,76	4,94	0,05	0,13	0,12	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga						
Kuintil I	66,12	14,24	0,58	3,50	15,57	100,00
Kuintil II	73,87	14,25	0,52	2,61	8,75	100,00
Kuintil III	79,92	12,44	0,58	1,77	5,29	100,00
Kuintil IV	85,46	10,66	0,28	1,23	2,36	100,00
Kuintil V	88,94	9,82	0,13	0,42	0,69	100,00
Indonesia	81,64	11,63	0,35	1,53	4,84	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Tabel 4.9.2
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2015

Karakteristik	Sendiri	Bersama	MCK Komunal	Umum	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga						
Laki-Laki	67,89	10,86	0,31	2,65	18,29	100,00
Perempuan	61,55	14,09	0,21	2,72	21,43	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga						
Tidak Tamat SD	56,11	13,15	0,30	2,87	27,57	100,00
SD	67,41	11,03	0,28	3,11	18,17	100,00
SMP	71,89	11,63	0,34	2,27	13,87	100,00
SMU	80,21	8,88	0,28	1,82	8,81	100,00
Perguruan Tinggi	91,33	5,35	0,17	0,86	2,30	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga						
Kuintil I	53,79	14,06	0,35	3,82	27,99	100,00
Kuintil II	60,67	12,56	0,37	3,05	23,35	100,00
Kuintil III	68,30	11,49	0,25	2,58	17,39	100,00
Kuintil IV	76,44	9,33	0,24	1,92	12,06	100,00
Kuintil V	86,08	6,73	0,20	1,09	5,90	100,00
Indonesia	67,00	11,32	0,29	2,66	18,73	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



4. FASILITAS PERUMAHAN

Tabel 4.9.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2015

Karakteristik	Sendiri	Bersama	MCK Komunal	Umum	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga						
Laki-Laki	75,18	10,93	0,32	2,07	11,49	100,00
Perempuan	69,45	14,64	0,31	2,21	13,39	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga						
Tidak Tamat SD	60,10	13,34	0,39	2,92	23,26	100,00
SD	70,98	11,67	0,37	2,89	14,09	100,00
SMP	76,17	12,91	0,35	1,94	8,63	100,00
SMU	84,87	10,65	0,26	0,98	3,24	100,00
Perguruan Tinggi	94,07	5,02	0,07	0,28	0,56	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga						
Kuintil I	58,12	14,12	0,43	3,70	23,63	100,00
Kuintil II	65,81	13,22	0,43	2,88	17,66	100,00
Kuintil III	73,30	11,89	0,39	2,23	12,18	100,00
Kuintil IV	81,28	10,05	0,26	1,55	6,85	100,00
Kuintil V	88,18	9,00	0,15	0,60	2,08	100,00
Indonesia	74,34	11,48	0,32	2,09	11,77	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Tabel 4.10.1
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2015

Karakteristik	Leher Angsa	Plengsengan dengan Tutup	Plengsengan Tanpa Tutup	Cemplung/Cubluk	Tidak Pakai	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga						
Laki-Laki	94,71	1,09	1,59	2,08	0,53	100,00
Perempuan	94,01	1,15	1,70	2,42	0,72	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga						
Tidak Tamat SD	88,75	1,50	2,65	5,93	1,18	100,00
SD	92,11	0,97	2,24	3,56	1,12	100,00
SMP	95,26	0,96	1,42	1,80	0,55	100,00
SMU	97,12	0,83	1,28	0,62	0,16	100,00
Perguruan Tinggi	97,42	1,75	0,58	0,18	0,06	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga						
Kuintil I	87,87	1,52	2,86	6,15	1,60	100,00
Kuintil II	92,23	0,93	1,94	3,73	1,17	100,00
Kuintil III	93,66	0,89	1,97	2,86	0,62	100,00
Kuintil IV	96,01	0,80	1,43	1,38	0,38	100,00
Kuintil V	97,16	1,33	1,03	0,40	0,09	100,00
Indonesia	94,60	1,10	1,61	2,13	0,56	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



Tabel 4.10.2
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2015

Karakteristik	Leher Angsa	Plengsengan dengan Tutup	Plengsengan Tanpa Tutup	Cemplung/ Cubluk	Tidak Pakai	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga						
Laki-Laki	79,41	1,85	2,99	12,99	2,75	100,00
Perempuan	78,12	2,12	3,01	13,83	2,92	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga						
Tidak Tamat SD	71,39	2,16	3,52	19,21	3,72	100,00
SD	77,66	2,01	3,05	13,89	3,39	100,00
SMP	83,33	1,84	2,70	10,30	1,82	100,00
SMU	89,43	1,34	2,53	5,57	1,13	100,00
Perguruan Tinggi	94,49	1,13	1,70	2,19	0,50	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga						
Kuintil I	67,35	2,43	4,00	21,55	4,67	100,00
Kuintil II	75,78	2,13	2,91	15,47	3,71	100,00
Kuintil III	80,65	1,81	2,82	12,37	2,36	100,00
Kuintil IV	85,20	1,65	2,81	8,64	1,71	100,00
Kuintil V	90,37	1,24	2,25	5,23	0,91	100,00
Indonesia	79,23	1,89	2,99	13,11	2,78	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Tabel 4.10.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2015

Karakteristik	Leher Angsa	Plengsengan dengan Tutup	Plengsengan Tanpa Tutup	Cemplung/ Cubluk	Tidak Pakai	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga						
Laki-Laki	87,62	1,44	2,24	7,14	1,56	100,00
Perempuan	87,11	1,57	2,27	7,37	1,68	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga						
Tidak Tamat SD	77,67	1,92	3,21	14,40	2,80	100,00
SD	83,66	1,58	2,71	9,60	2,44	100,00
SMP	89,86	1,36	2,00	5,65	1,13	100,00
SMU	95,03	0,97	1,62	1,97	0,42	100,00
Perguruan Tinggi	96,84	1,63	0,80	0,58	0,15	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga						
Kuintil I	75,31	2,07	3,56	15,57	3,48	100,00
Kuintil II	82,88	1,61	2,49	10,40	2,61	100,00
Kuintil III	86,69	1,38	2,42	7,95	1,55	100,00
Kuintil IV	91,28	1,17	2,03	4,55	0,96	100,00
Kuintil V	95,43	1,30	1,34	1,63	0,30	100,00
Indonesia	87,55	1,46	2,24	7,17	1,58	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



4. FASILITAS PERUMAHAN

Tabel 4.11.1

Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015

Karakteristik	Tangki	SPAL	Kolam/Sawah/ Sungai/Danau/ Laut	Lubang Tanah	Pantai/Tanah Lapang/ Kebun	Lain- nya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga							
Laki-Laki	67,15	11,27	11,76	8,47	0,67	0,67	100,00
Perempuan	65,34	11,49	12,93	8,64	0,80	0,79	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga							
Tidak Tamat SD	55,21	8,74	21,34	11,55	2,08	1,07	100,00
SD	59,86	9,75	18,18	10,46	0,92	0,83	100,00
SMP	66,48	11,51	11,90	8,83	0,56	0,72	100,00
SMU	72,95	12,66	6,88	6,74	0,21	0,56	100,00
Perguruan Tinggi	77,91	13,32	2,91	5,51	0,05	0,29	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga							
Kuintil I	51,30	8,09	25,38	12,33	1,75	1,15	100,00
Kuintil II	59,38	9,32	17,67	11,64	1,21	0,77	100,00
Kuintil III	64,01	10,50	14,61	9,16	0,86	0,85	100,00
Kuintil IV	69,30	12,17	9,33	8,13	0,45	0,62	100,00
Kuintil V	75,57	13,15	5,00	5,67	0,16	0,45	100,00
Indonesia	66,88	11,30	11,94	8,50	0,69	0,69	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS

Tabel 4.11.2

Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015

Karakteristik	Tangki	SPAL	Kolam/ Sawah/ Sungai/ Danau/Laut	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga							
Laki-Laki	43,02	6,68	19,53	24,24	5,49	1,04	100,00
Perempuan	42,78	6,08	20,41	23,22	6,17	1,34	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga							
Tidak Tamat SD	34,20	5,20	24,24	26,07	8,95	1,33	100,00
SD	41,03	6,64	21,97	24,64	4,68	1,04	100,00
SMP	48,72	7,00	15,54	23,68	4,08	0,97	100,00
SMU	57,20	8,38	10,63	20,04	2,88	0,87	100,00
Perguruan Tinggi	65,26	10,40	5,45	17,56	0,93	0,40	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga							
Kuintil I	31,42	4,99	26,27	27,68	8,27	1,38	100,00
Kuintil II	38,81	5,57	23,44	24,19	6,81	1,17	100,00
Kuintil III	43,93	6,82	19,11	23,99	5,05	1,10	100,00
Kuintil IV	50,19	7,77	14,94	22,52	3,69	0,88	100,00
Kuintil V	59,24	9,21	8,74	19,91	2,28	0,61	100,00
Indonesia	42,99	6,60	19,65	24,10	5,58	1,08	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



Tabel 4.11.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015

Karakteristik	Tangki	SPAL	Kolam/ Sawah/ Sungai/ Danau/Laut	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga							
Laki-Laki	55,04	8,97	15,66	16,39	3,09	0,85	100,00
Perempuan	54,55	8,90	16,51	15,61	3,37	1,05	100,00
Pendidikan Kepala Rumah Tangga							
Tidak Tamat SD	41,01	6,35	23,30	21,37	6,72	1,25	100,00
SD	48,30	7,84	20,50	19,16	3,23	0,96	100,00
SMP	57,94	9,34	13,65	15,97	2,26	0,84	100,00
SMU	68,40	11,43	7,96	10,58	0,98	0,65	100,00
Perguruan Tinggi	75,36	12,73	3,42	7,94	0,23	0,31	100,00
Kuintil Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga							
Kuintil I	38,39	6,08	25,96	22,29	5,98	1,30	100,00
Kuintil II	46,82	7,03	21,19	19,31	4,63	1,02	100,00
Kuintil III	52,58	8,40	17,17	17,61	3,25	0,99	100,00
Kuintil IV	60,45	10,14	11,92	14,79	1,95	0,74	100,00
Kuintil V	71,23	12,10	5,99	9,46	0,72	0,49	100,00
Indonesia	54,97	8,96	15,78	16,27	3,13	0,88	100,00

Sumber: Susenas KOR 2015, BPS



KESEHATAN LINGKUNGAN | 5

Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kesehatan lingkungan bahkan merupakan salah satu faktor penentu derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan lingkungan terdiri dari aspek-aspek kesehatan manusia, termasuk di dalamnya kualitas hidup yang ditentukan oleh faktor fisik, biologis, sosial, dan psikososial. Kesehatan lingkungan juga mengacu pada teori dan praktek menilai, mengoreksi, mengendalikan, dan mencegah faktor-faktor tersebut yang berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan generasi sekarang dan masa depan.

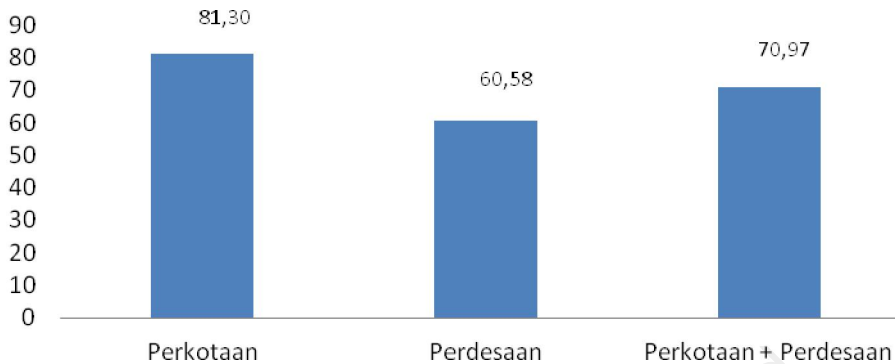
Bab kesehatan lingkungan memberikan gambaran mengenai aspek kesehatan ditinjau dari faktor fisik rumah dan fasilitasnya. Aspek tersebut antara lain jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja, bahan bakar utama untuk memasak, sanitasi layak dan rumah tangga kumuh.

5.1. Air Minum Layak

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup utama bagi makhluk hidup. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/ Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum dikatakan aman untuk kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Kualitas air minum dapat dilihat dari hasil uji laboratorium terkait kandungan air minum. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses ke air minum layak. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak adalah jenis sumber air utama yang digunakan untuk minum, sumber air utama yang digunakan untuk memasak dan mandi/cuci, serta jarak sumber air ke penampungan limbah.



Gambar 5.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Air Minum Layak
Menurut Tipe Daerah, 2015



Sumber : Susenas KOR 2015, BPS

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa sekitar 70,97 persen rumah tangga di Indonesia memiliki akses air minum layak. Sementara menurut tipe daerah, rumah tangga di daerah perkotaan memiliki persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak yang lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan, yaitu 81,30 persen berbanding 60,58 persen. Dengan kata lain sekitar 39,42 persen rumah tangga belum memiliki akses terhadap air minum layak.

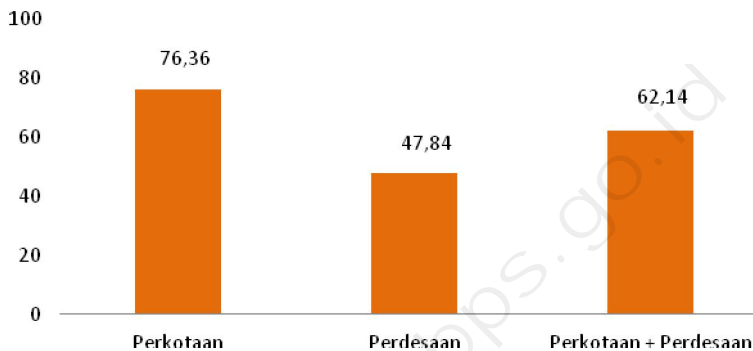
Akses rumah tangga terhadap air minum layak belum tersebar secara merata di seluruh provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah Provinsi DKI Jakarta (93,40 persen), Bali (92,17 persen), dan Kalimantan Utara (84,59 persen). Sebaliknya tiga provinsi dengan persentase terendah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah Provinsi Bengkulu (41,28 persen), Papua sebesar (51,27 persen) dan Sulawesi Barat (53,89 persen). Persentase akses terhadap air minum layak per provinsi dapat dilihat pada Tabel 5.1.3.

5.2. Sanitasi Layak

Sanitasi layak merupakan satu hal penting yang memengaruhi kesehatan lingkungan. Suatu rumah tangga dikatakan memiliki akses ke sanitasi layak jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, menggunakan jenis kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup, dan tempat pembuangan akhir tinja tangki septik atau SPAL.

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa sekitar 62,14 persen rumah tangga di Indonesia memiliki akses ke sanitasi layak. Persentase rumah tangga di perkotaan dengan akses ke sanitasi layak lebih tinggi (76,36 persen) dibandingkan dengan di daerah perdesaan (47,84 persen). Rendahnya persentase tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih dari pihak terkait untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak khususnya di daerah perdesaan.

Gambar 5.2
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak
Menurut Tipe Daerah, 2015



Sumber : Susenas KOR 2015, BPS

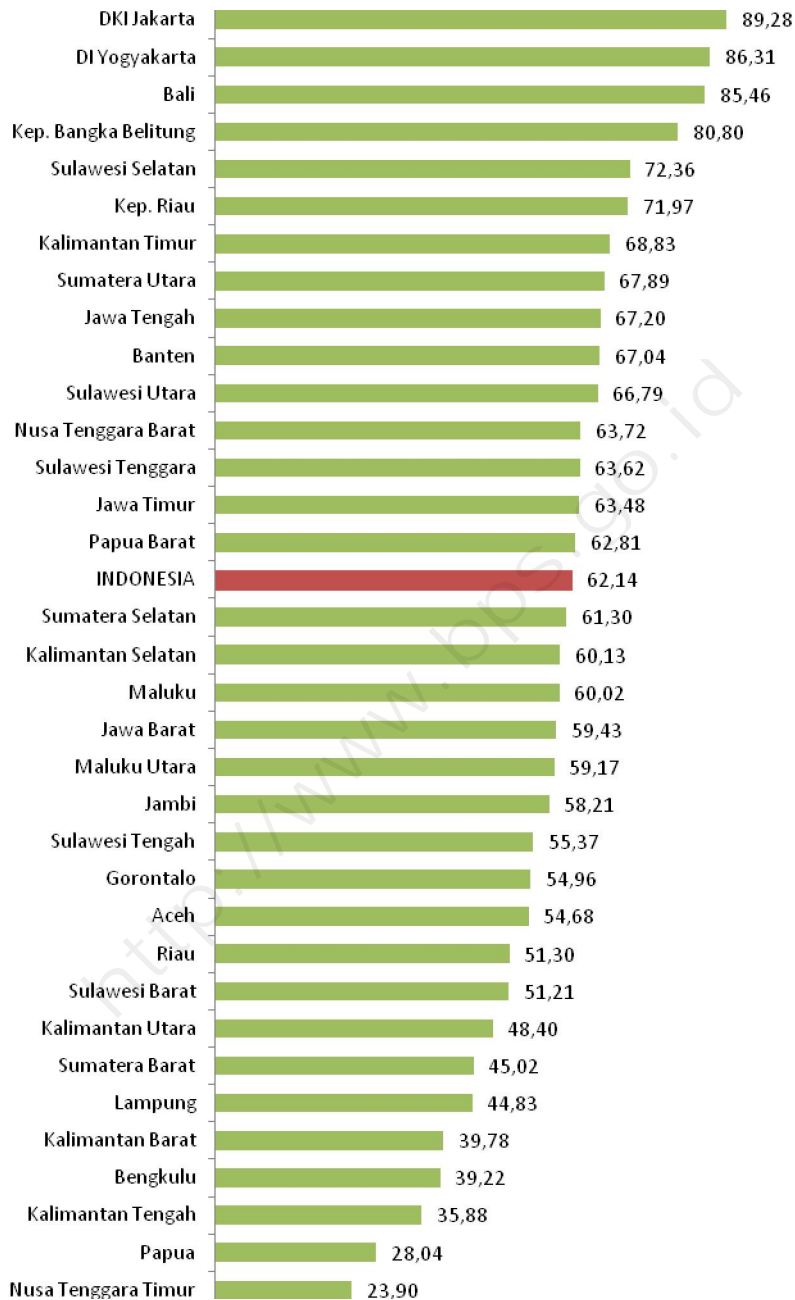
Gambar 5.3 menyajikan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak menurut provinsi. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah DKI Jakarta (89,28 persen), DI Yogyakarta (86,31 persen), dan Bali (85,46 persen). Sementara itu provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sekitar 23,90 persen.



5. KESEHATAN LINGKUNGAN

Gambar 5.3

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi, 2015



Sumber : Susenas KOR 2015, BPS

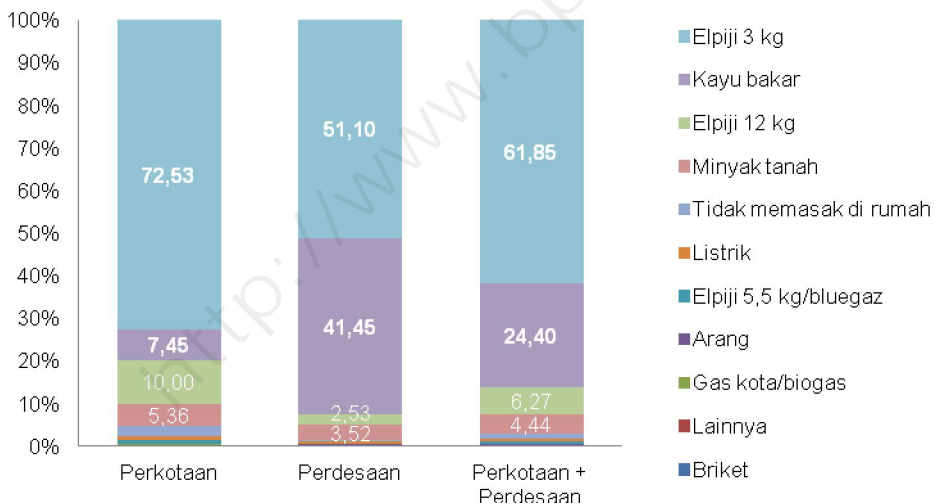


5.3. Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Bahan bakar untuk memasak sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Bahan bakar yang ramah lingkungan seperti listrik dan gas tidak menyebabkan polusi udara serta relatif lebih bersih dan efisien penggunaannya. Didukung dengan berhasilnya program pemerintah konversi bahan bakar minyak tanah ke gas, pengguna bahan bakar gas (elpiji) khususnya elpiji 3 kg semakin meningkat.

Gambar 5.4 memberikan informasi mengenai bahan bakar yang paling banyak digunakan untuk memasak. Rumah tangga di Indonesia paling banyak menggunakan bahan bakar gas elpiji 3 kg (61,85 persen). Jika dipilah menurut tipe daerah, persentase penggunaan gas elpiji 3 kg lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding di perdesaan (72,53 persen berbanding 51,10 persen).

Gambar 5.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Tipe Daerah, 2015



Sumber : Susenas KOR 2015, BPS

Penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak tergolong tidak ramah lingkungan. Asap yang dihasilkan dari penggunaan kayu bakar setara dengan bahaya polusi asap kendaraan bermotor, sehingga dapat membahayakan kesehatan (ANTARA News). Akan tetapi, kayu bakar masih banyak digunakan sebagai bahan bakar memasak oleh 24,40 persen rumah tangga. Rumah tangga pengguna kayu



bakar tersebut lebih banyak dijumpai di perdesaan (41,45 persen) dibandingkan dengan di perkotaan (7,45 persen).

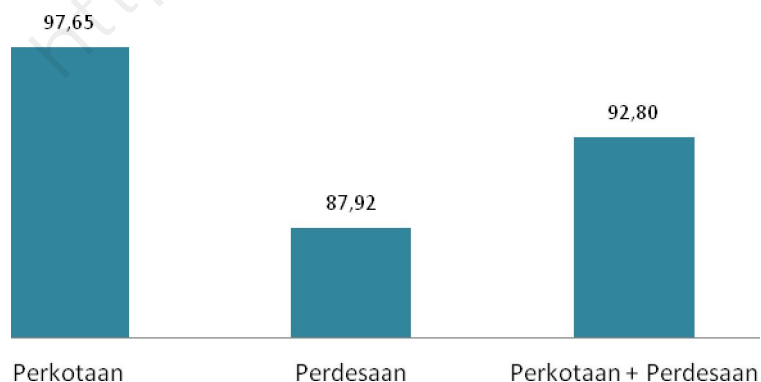
5.4. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan indikator komposit dari beberapa indikator, yaitu air minum layak, sanitasi layak, kecukupan luas lantai hunian, dan kualitas perumahan (jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas dan sumber penerangan). Dari ketujuh indikator pembentuk rumah layak huni tersebut, rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua indikator pembentuk yang kurang baik. Sementara itu jika terdapat tiga indikator pembentuk kurang baik maka dikategorikan rumah rawan layak huni.

Indikator rumah layak huni dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan semakin terpenuhi kebutuhan dasar perumahannya.

Gambar 5.5 memperlihatkan bahwa 92,80 persen rumah tangga telah menempati rumah layak huni. Jika dipilah menurut tipe daerah, persentase rumah tangga di daerah perdesaan yang menempati rumah layak huni relatif kecil lebih kecil dibandingkan dengan di daerah perkotaan (87,92 persen berbanding 97,65 persen). Hal ini berarti bahwa perlu peningkatan upaya dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di perdesaan.

Gambar 5.5
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Tipe Daerah, 2015

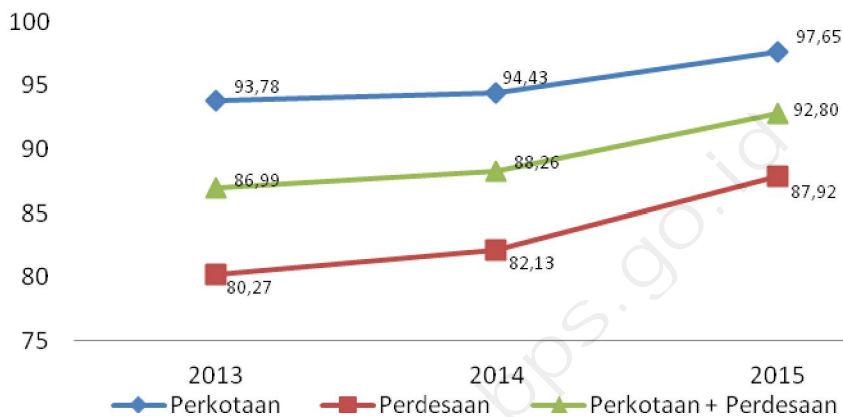


Sumber : Susenas KOR 2015, BPS



Selama tiga tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni semakin meningkat. Secara nasional, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sekitar 86,99 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 92,80 persen pada tahun 2015. Searah dengan kenaikan persentase secara nasional, kenaikan tersebut juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

Gambar 5.6
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni
Menurut Tipe Daerah, 2013-2015



Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS

Jika dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah layak huni adalah Provinsi DKI Jakarta (99,21 persen). Sementara itu, dua provinsi dengan persentase terendah rumah tangga yang menempati rumah layak huni adalah Provinsi Papua (49,23 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (56,43 persen) (lihat Tabel 5.3.1).

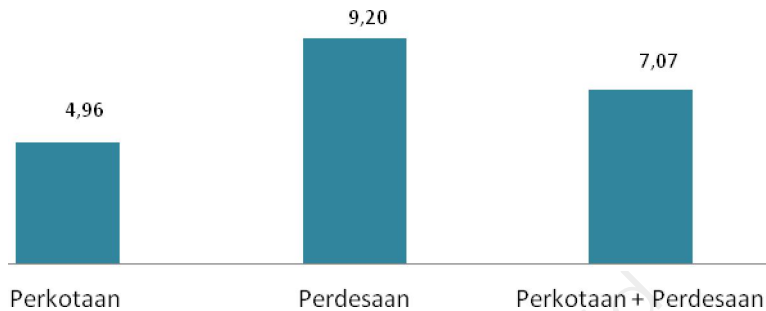
5.5. Rumah Tangga Kumuh

Rumah tangga kumuh seperti halnya indikator rumah layak huni juga merupakan indikator komposit. Indikator pembentuk rumah tangga kumuh sama dengan indikator pembentuk rumah layak huni. Perbedaannya ada pada pembobotan penghitungan rumah tangga kumuh. Gambaran mengenai rumah tangga kumuh dapat dilihat pada Gambar 5.7.

Gambar 5.7 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga kumuh di Indonesia sebesar 7,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia sudah cukup baik. Persentase rumah tangga kumuh di daerah

perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (9,20 persen berbanding 4,96 persen).

Gambar 5.7
Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Tipe Daerah, 2015

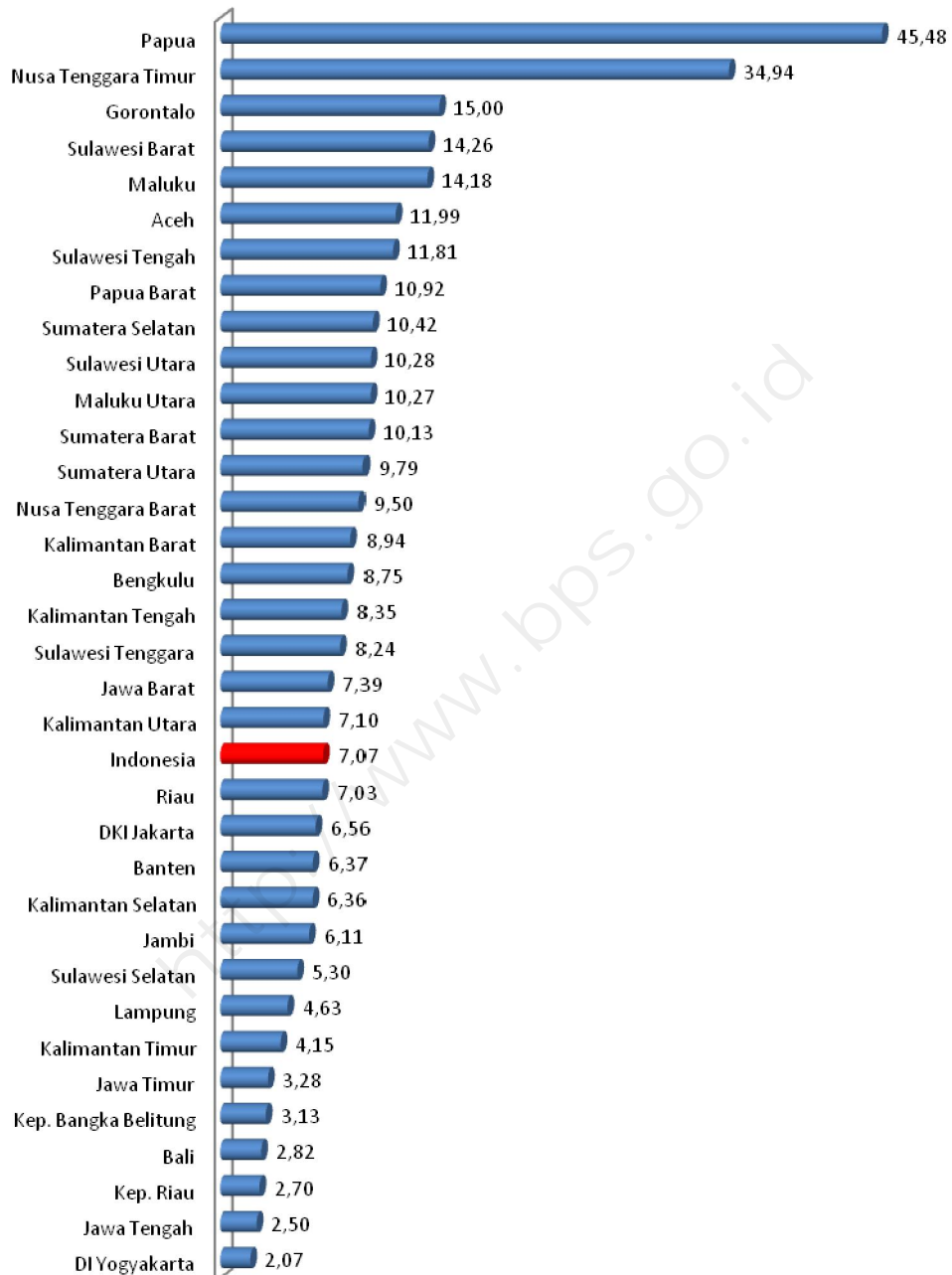


Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS

Keterbandingan persentase rumah tangga kumuh antar provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.8. Terdapat 20 provinsi yang persentase rumah tangga kumuh lebih tinggi dari angka nasional. Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga kumuh tertinggi di Indonesia yaitu sekitar 45,48 persen dan 34,94 persen. Sedangkan tiga provinsi dengan persentase rumah tangga kumuh terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta (2,07 persen), Jawa Tengah (2,50 persen) dan Kepulauan Riau (2,70 persen).



Gambar 5.8
Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi, 2015



Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS



5. KESEHATAN LINGKUNGAN

Tabel 5.1.1

Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	87,41	84,17	81,71
Sumatera Utara	82,25	83,40	85,81
Sumatera Barat	80,94	81,74	83,32
R i a u	91,10	86,70	85,83
J a m b i	79,48	88,57	83,87
Sumatera Selatan	73,22	78,94	81,28
Bengkulu	59,66	54,33	66,83
Lampung	71,81	65,59	72,13
Kep. Bangka Belitung	74,76	74,56	77,50
Kepulauan Riau	82,11	89,32	89,54
DKI Jakarta	92,49	91,23	93,40
Jawa Barat	71,71	73,11	74,52
Jawa Tengah	77,25	75,92	79,29
DI Yogyakarta	83,96	74,19	79,27
Jawa Timur	81,53	81,77	82,32
Banten	76,65	79,63	78,72
B a l i	92,45	94,57	94,51
Nusa Tenggara Barat	72,72	75,49	78,22
Nusa Tenggara Timur	82,77	80,84	83,10
Kalimantan Barat	82,79	83,38	89,50
Kalimantan Tengah	67,21	78,98	80,44
Kalimantan Selatan	80,19	80,97	83,07
Kalimantan Timur	93,09	90,36	90,63
Kalimantan Utara	95,00
Sulawesi Utara	82,21	84,19	79,43
Sulawesi Tengah	80,19	81,25	82,37
Sulawesi Selatan	81,03	86,24	90,65
Sulawesi Tenggara	93,77	90,44	88,13
Gorontalo	68,81	79,40	79,32
Sulawesi Barat	74,04	82,16	83,62
Maluku	77,77	84,98	78,93
Maluku Utara	81,85	84,84	87,50
Papua Barat	89,99	91,51	87,24
Papua	91,05	88,24	86,78
Indonesia	79,34	79,76	81,30

Catatan : ... = Tidak ada data

- = Tidak ada atau nol

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 5.1.2
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	52,73	52,13	53,27
Sumatera Utara	54,38	51,88	57,66
Sumatera Barat	58,03	48,65	55,66
R i a u	63,68	64,23	66,86
J a m b i	52,06	49,43	54,16
Sumatera Selatan	48,57	49,09	56,80
Bengkulu	27,04	26,49	30,06
Lampung	48,42	46,81	49,55
Kep. Bangka Belitung	55,96	51,44	59,15
Kepulauan Riau	26,01	50,74	55,88
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	50,94	47,19	53,20
Jawa Tengah	66,46	67,70	68,94
DI Yogyakarta	68,99	85,41	84,70
Jawa Timur	67,37	68,56	71,55
Banten	38,69	42,05	43,75
B a l i	85,36	91,03	86,01
Nusa Tenggara Barat	42,79	55,63	67,07
Nusa Tenggara Timur	44,28	45,76	57,46
Kalimantan Barat	54,94	51,60	59,56
Kalimantan Tengah	37,99	48,73	45,10
Kalimantan Selatan	48,60	40,90	46,77
Kalimantan Timur	58,52	50,41	57,11
Kalimantan Utara	71,92
Sulawesi Utara	54,73	57,98	64,79
Sulawesi Tengah	48,01	51,35	54,89
Sulawesi Selatan	59,25	58,34	61,48
Sulawesi Tenggara	63,49	67,03	72,76
Gorontalo	48,21	59,48	59,68
Sulawesi Barat	33,84	41,49	46,95
Maluku	44,43	48,78	55,70
Maluku Utara	51,12	52,99	49,69
Papua Barat	57,92	59,25	58,17
Papua	28,85	36,77	39,67
Indonesia	56,17	56,49	60,58

Catatan : ... = Tidak ada data

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS



5. KESEHATAN LINGKUNGAN

Tabel 5.1.3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Provinsi,
2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	62,41	61,10	61,23
Sumatera Utara	67,81	67,13	71,41
Sumatera Barat	66,69	61,20	66,58
R i a u	74,36	73,18	74,24
J a m b i	60,57	60,78	62,75
Sumatera Selatan	56,90	59,14	65,16
Bengkulu	36,82	35,17	41,08
Lampung	54,16	51,48	55,06
Kep. Bangka Belitung	64,98	62,53	68,03
Kepulauan Riau	73,57	83,27	84,12
DKI Jakarta	92,49	91,23	93,40
Jawa Barat	64,39	63,92	67,20
Jawa Tengah	71,30	71,41	73,63
DI Yogyakarta	79,25	77,70	80,99
Jawa Timur	74,04	74,82	76,64
Banten	64,51	67,76	67,68
B a l i	89,79	93,22	91,27
Nusa Tenggara Barat	55,03	63,94	71,70
Nusa Tenggara Timur	51,75	52,65	62,72
Kalimantan Barat	63,18	60,91	68,39
Kalimantan Tengah	48,04	58,73	57,01
Kalimantan Selatan	62,07	57,67	62,23
Kalimantan Timur	79,99	75,11	78,13
Kalimantan Utara	84,59
Sulawesi Utara	67,21	70,16	71,53
Sulawesi Tengah	55,83	58,26	61,49
Sulawesi Selatan	66,99	68,68	72,07
Sulawesi Tenggara	71,98	73,74	77,19
Gorontalo	54,96	66,18	66,47
Sulawesi Barat	42,14	50,88	53,89
Maluku	57,56	63,01	64,96
Maluku Utara	59,65	61,98	60,07
Papua Barat	67,17	68,80	68,85
Papua	44,12	49,42	51,27
Indonesia	67,73	68,11	70,97

Catatan : ... = Tidak ada data

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 5.2.1
 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi,
 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	83,55	47,82	80,58
Sumatera Utara	77,38	82,12	84,19
Sumatera Barat	72,46	59,61	63,44
R i a u	90,82	69,69	74,42
J a m b i	83,93	75,32	81,96
Sumatera Selatan	75,14	85,82	82,97
Bengkulu	64,19	66,18	68,75
Lampung	79,94	61,18	71,83
Kep. Bangka Belitung	88,56	90,39	90,62
Kepulauan Riau	79,96	66,19	78,31
DKI Jakarta	86,57	86,81	89,28
Jawa Barat	68,35	71,13	66,05
Jawa Tengah	75,42	79,45	76,27
DI Yogyakarta	91,25	93,44	92,66
Jawa Timur	75,83	79,88	77,34
Banten	83,86	82,67	80,75
B a l i	93,21	84,33	92,39
Nusa Tenggara Barat	65,85	68,39	73,73
Nusa Tenggara Timur	51,01	29,62	49,28
Kalimantan Barat	84,77	61,39	70,01
Kalimantan Tengah	75,80	52,69	57,76
Kalimantan Selatan	84,77	23,46	80,79
Kalimantan Timur	89,99	81,48	81,42
Kalimantan Utara	69,31
Sulawesi Utara	85,24	80,73	76,95
Sulawesi Tengah	80,24	82,96	77,35
Sulawesi Selatan	82,40	90,28	90,22
Sulawesi Tenggara	88,37	88,02	84,59
Gorontalo	82,62	82,71	79,18
Sulawesi Barat	77,57	85,78	73,09
Maluku	84,46	83,06	80,16
Maluku Utara	91,80	87,06	91,19
Papua Barat	72,21	88,00	74,55
Papua	76,76	70,49	73,58
Indonesia	77,15	76,34	76,36

Catatan : ... = Tidak ada data

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS



5. KESEHATAN LINGKUNGAN

Tabel 5.2.2
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	41,83	22,43	44,62
Sumatera Utara	47,52	54,07	52,33
Sumatera Barat	30,14	28,13	33,02
R i a u	45,97	29,87	36,59
J a m b i	47,10	47,05	48,56
Sumatera Selatan	39,68	44,24	50,07
Bengkulu	18,76	27,93	26,58
Lampung	34,77	25,90	36,11
Kep. Bangka Belitung	68,16	70,67	71,58
Kepulauan Riau	23,42	24,71	38,94
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	45,17	48,91	46,76
Jawa Tengah	53,39	60,54	59,71
DI Yogyakarta	68,79	58,61	72,64
Jawa Timur	46,61	51,87	51,04
Banten	31,99	36,50	37,28
B a l i	67,65	58,14	74,21
Nusa Tenggara Barat	43,92	52,85	56,59
Nusa Tenggara Timur	23,46	8,66	17,35
Kalimantan Barat	38,37	38,18	27,14
Kalimantan Tengah	27,39	18,02	24,76
Kalimantan Selatan	37,32	16,40	44,80
Kalimantan Timur	52,90	43,40	47,67
Kalimantan Utara	22,98
Sulawesi Utara	61,50	57,28	58,11
Sulawesi Tengah	45,86	45,97	48,42
Sulawesi Selatan	62,41	62,77	62,19
Sulawesi Tenggara	47,91	57,86	55,11
Gorontalo	38,11	48,24	42,16
Sulawesi Barat	38,31	51,59	46,11
Maluku	48,04	47,87	46,67
Maluku Utara	44,63	47,94	47,05
Papua Barat	39,69	56,47	55,98
Papua	11,98	9,88	13,16
Indonesia	44,74	45,84	47,84

Catatan : ... = Tidak ada data
- = Tidak ada atau nol

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS



Tabel 5.2.3
 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi,
 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	53,47	29,54	54,68
Sumatera Utara	61,92	67,64	67,89
Sumatera Barat	46,13	40,07	45,02
R i a u	63,44	45,73	51,30
J a m b i	58,53	55,25	58,21
Sumatera Selatan	51,66	58,24	61,30
Bengkulu	32,37	39,85	39,22
Lampung	45,86	34,67	44,83
Kep. Bangka Belitung	77,95	80,13	80,80
Kepulauan Riau	71,35	59,68	71,97
DKI Jakarta	86,57	86,81	89,28
Jawa Barat	60,18	63,25	59,43
Jawa Tengah	63,28	69,07	67,20
DI Yogyakarta	84,20	82,54	86,31
Jawa Timur	60,38	65,13	63,48
Banten	67,27	68,09	67,04
B a l i	83,63	74,35	85,46
Nusa Tenggara Barat	52,88	59,35	63,72
Nusa Tenggara Timur	28,80	12,77	23,90
Kalimantan Barat	52,10	44,97	39,78
Kalimantan Tengah	44,05	29,48	35,88
Kalimantan Selatan	57,54	19,36	60,13
Kalimantan Timur	75,93	66,95	68,83
Kalimantan Utara	48,40
Sulawesi Utara	72,28	68,17	66,79
Sulawesi Tengah	54,21	54,51	55,37
Sulawesi Selatan	69,51	72,97	72,36
Sulawesi Tenggara	59,24	66,50	63,62
Gorontalo	52,69	59,83	54,96
Sulawesi Barat	46,42	59,48	51,21
Maluku	62,39	61,70	60,02
Maluku Utara	57,72	58,97	59,17
Papua Barat	49,06	65,80	62,81
Papua	27,89	24,78	28,04
Indonesia	60,91	61,06	62,14

Catatan : ... = Tidak ada data

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS



5. KESEHATAN LINGKUNGAN

Tabel 5.3.1
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Provinsi,
2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	94,24	92,41	97,10
Sumatera Utara	95,18	95,52	97,75
Sumatera Barat	93,44	93,63	97,08
R i a u	97,25	97,54	98,99
J a m b i	97,85	98,29	98,37
Sumatera Selatan	93,26	96,06	97,74
Bengkulu	93,72	92,87	96,93
Lampung	93,65	92,38	97,57
Kep. Bangka Belitung	96,84	96,99	99,13
Kepulauan Riau	96,79	95,44	99,00
DKI Jakarta	93,94	94,73	99,21
Jawa Barat	90,09	91,26	96,77
Jawa Tengah	95,31	95,63	97,70
DI Yogyakarta	98,27	98,51	99,08
Jawa Timur	95,34	96,32	98,13
Banten	95,13	95,74	97,40
B a l i	98,18	97,19	99,45
Nusa Tenggara Barat	89,75	93,42	96,89
Nusa Tenggara Timur	79,34	78,83	88,88
Kalimantan Barat	98,13	96,88	98,77
Kalimantan Tengah	93,19	93,11	96,27
Kalimantan Selatan	96,99	96,60	98,26
Kalimantan Timur	98,18	97,82	98,36
Kalimantan Utara	98,93
Sulawesi Utara	91,69	93,61	95,40
Sulawesi Tengah	95,01	93,29	97,34
Sulawesi Selatan	94,71	95,21	97,85
Sulawesi Tenggara	93,56	94,34	98,66
Gorontalo	89,87	92,60	97,50
Sulawesi Barat	89,23	90,70	95,21
Maluku	92,60	94,44	95,10
Maluku Utara	96,50	96,95	98,56
Papua Barat	93,70	94,73	98,16
Papua	92,45	88,92	95,67
Indonesia	93,78	94,43	97,65

Catatan : ... = Tidak ada data

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 5.3.2
 Persentase Rumah Tangga di Daerah Perdesaan yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Provinsi,
 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	80,14	79,52	85,30
Sumatera Utara	81,30	83,79	86,39
Sumatera Barat	84,00	85,71	88,53
R i a u	89,25	87,69	90,65
J a m b i	90,06	90,84	90,70
Sumatera Selatan	82,94	85,50	88,77
Bengkulu	78,33	81,36	86,75
Lampung	83,33	84,61	89,26
Kep. Bangka Belitung	93,63	95,57	96,50
Kepulauan Riau	80,38	85,39	92,57
DKI Jakarta	-	-	0,00
Jawa Barat	74,54	77,91	90,87
Jawa Tengah	86,76	88,07	92,70
DI Yogyakarta	89,65	90,88	97,94
Jawa Timur	87,02	88,32	93,16
Banten	64,69	69,21	83,83
B a l i	93,88	94,69	97,39
Nusa Tenggara Barat	80,16	84,85	91,41
Nusa Tenggara Timur	38,62	40,52	48,05
Kalimantan Barat	77,48	78,29	82,03
Kalimantan Tengah	78,06	81,72	84,50
Kalimantan Selatan	85,21	87,12	89,73
Kalimantan Timur	88,84	90,35	94,08
Kalimantan Utara	92,73
Sulawesi Utara	84,47	87,15	90,52
Sulawesi Tengah	75,85	77,58	81,90
Sulawesi Selatan	83,18	85,57	90,19
Sulawesi Tenggara	80,36	81,96	88,40
Gorontalo	71,97	75,31	80,73
Sulawesi Barat	66,73	71,04	78,63
Maluku	68,15	72,32	77,55
Maluku Utara	74,45	75,33	78,68
Papua Barat	77,08	82,63	86,29
Papua	29,84	29,74	34,05
Indonesia	80,27	82,13	87,92

Catatan : ... = Tidak ada data

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS



5. KESEHATAN LINGKUNGAN

Tabel 5.3.3
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Menurut Provinsi,
2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	84,09	83,18	88,60
Sumatera Utara	88,05	89,44	91,94
Sumatera Barat	87,65	88,79	91,90
R i a u	92,33	91,55	93,89
J a m b i	92,35	93,02	92,91
Sumatera Selatan	86,46	89,11	91,83
Bengkulu	82,96	84,93	89,80
Lampung	85,85	86,51	91,29
Kep. Bangka Belitung	95,19	96,26	97,77
Kepulauan Riau	94,16	93,91	97,97
DKI Jakarta	93,94	94,73	99,21
Jawa Barat	84,60	86,53	94,75
Jawa Tengah	90,61	91,48	94,97
DI Yogyakarta	95,55	96,08	98,72
Jawa Timur	90,91	92,09	95,51
Banten	85,48	87,45	93,12
B a l i	96,54	96,24	98,66
Nusa Tenggara Barat	84,13	88,46	93,69
Nusa Tenggara Timur	46,51	48,04	56,43
Kalimantan Barat	83,47	83,68	86,97
Kalimantan Tengah	83,11	85,55	88,46
Kalimantan Selatan	90,18	91,14	93,36
Kalimantan Timur	94,66	94,95	96,76
Kalimantan Utara	96,13
Sulawesi Utara	87,74	90,12	92,77
Sulawesi Tengah	80,49	81,30	85,61
Sulawesi Selatan	87,32	89,09	92,97
Sulawesi Tenggara	84,03	85,41	91,36
Gorontalo	77,98	81,29	86,53
Sulawesi Barat	71,60	75,34	81,77
Maluku	77,58	81,07	84,55
Maluku Utara	80,69	81,53	84,13
Papua Barat	82,08	86,37	90,65
Papua	44,78	44,13	49,23
Indonesia	86,99	88,26	92,80

Catatan : ... = Tidak ada data

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 5.4.1
 Persentase Rumah Tangga Kumuh di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi,
 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,85	8,51	4,39
Sumatera Utara	5,60	5,07	4,43
Sumatera Barat	8,12	7,21	7,52
R i a u	2,03	4,87	3,73
J a m b i	4,24	4,87	3,01
Sumatera Selatan	11,52	6,49	7,70
Bengkulu	8,15	7,98	6,41
Lampung	4,82	7,56	3,11
Kep. Bangka Belitung	4,23	3,60	2,66
Kepulauan Riau	7,56	2,59	2,30
DKI Jakarta	8,17	8,16	6,56
Jawa Barat	10,62	8,45	7,24
Jawa Tengah	3,90	3,16	2,42
DI Yogyakarta	2,16	3,10	2,32
Jawa Timur	5,57	3,65	2,74
Banten	5,01	4,44	4,56
B a l i	2,54	3,40	2,06
Nusa Tenggara Barat	13,44	10,25	7,00
Nusa Tenggara Timur	19,19	18,39	15,31
Kalimantan Barat	3,43	8,93	3,58
Kalimantan Tengah	9,70	8,48	5,96
Kalimantan Selatan	4,77	10,37	5,03
Kalimantan Timur	2,34	3,38	3,53
Kalimantan Utara	7,76
Sulawesi Utara	6,08	5,82	8,12
Sulawesi Tengah	6,18	5,62	6,05
Sulawesi Selatan	5,62	4,03	3,33
Sulawesi Tenggara	4,69	3,67	6,95
Gorontalo	6,53	6,69	5,93
Sulawesi Barat	10,18	4,18	5,99
Maluku	8,95	7,65	8,77
Maluku Utara	2,51	5,49	2,75
Papua Barat	9,75	5,57	10,83
Papua	9,98	10,49	9,09
Indonesia	6,96	5,99	4,96

Catatan : ... = Tidak ada data

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS



5. KESEHATAN LINGKUNGAN

Tabel 5.4.2
Persentase Rumah Tangga Kumuh di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi,
2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	17,37	18,01	14,95
Sumatera Utara	17,40	15,21	14,90
Sumatera Barat	11,77	13,06	11,83
R i a u	9,16	10,86	9,12
J a m b i	10,25	6,70	7,37
Sumatera Selatan	17,67	15,02	11,83
Bengkulu	15,72	14,16	9,76
Lampung	8,76	8,76	5,12
Kep. Bangka Belitung	4,79	3,27	3,57
Kepulauan Riau	9,33	1,85	4,75
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	15,66	11,86	7,68
Jawa Tengah	5,52	4,43	2,57
DI Yogyakarta	6,94	5,49	1,53
Jawa Timur	8,45	6,79	3,77
Banten	24,30	21,09	10,30
B a l i	9,69	5,70	4,04
Nusa Tenggara Barat	18,30	14,39	11,27
Nusa Tenggara Timur	47,74	46,79	40,00
Kalimantan Barat	13,06	11,28	11,18
Kalimantan Tengah	13,31	10,82	9,56
Kalimantan Selatan	7,84	6,30	7,36
Kalimantan Timur	7,35	4,74	5,21
Kalimantan Utara	6,30
Sulawesi Utara	17,05	12,36	12,11
Sulawesi Tengah	17,91	18,84	13,63
Sulawesi Selatan	10,20	7,45	6,42
Sulawesi Tenggara	14,21	10,42	8,77
Gorontalo	19,83	17,09	19,78
Sulawesi Barat	24,15	15,02	16,18
Maluku	21,21	21,72	17,76
Maluku Utara	16,83	17,12	13,11
Papua Barat	19,87	10,85	10,98
Papua	64,78	59,14	57,36
Indonesia	13,94	11,85	9,20

Catatan : ... = Tidak ada data
 - = Tidak ada atau nol

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS



Tabel 5.4.3
Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	14,16	15,35	11,99
Sumatera Utara	11,71	10,30	9,79
Sumatera Barat	10,39	10,84	10,13
R i a u	6,38	8,48	7,03
J a m b i	8,38	6,17	6,11
Sumatera Selatan	15,59	12,15	10,42
Bengkulu	13,45	12,24	8,75
Lampung	7,79	8,46	4,63
Kep. Bangka Belitung	4,52	3,43	3,13
Kepulauan Riau	7,83	2,48	2,70
DKI Jakarta	8,17	8,16	6,56
Jawa Barat	12,40	9,66	7,39
Jawa Tengah	4,79	3,86	2,50
DI Yogyakarta	3,66	3,85	2,07
Jawa Timur	7,09	5,30	3,28
Banten	11,18	9,70	6,37
B a l i	5,22	4,28	2,82
Nusa Tenggara Barat	16,32	12,66	9,50
Nusa Tenggara Timur	42,20	41,21	34,94
Kalimantan Barat	10,21	10,59	8,94
Kalimantan Tengah	12,07	10,05	8,35
Kalimantan Selatan	6,53	8,00	6,36
Kalimantan Timur	4,24	3,90	4,15
Kalimantan Utara	7,10
Sulawesi Utara	12,07	9,32	10,28
Sulawesi Tengah	15,06	15,79	11,81
Sulawesi Selatan	8,57	6,18	5,30
Sulawesi Tenggara	11,54	8,49	8,24
Gorontalo	15,47	13,59	15,00
Sulawesi Barat	21,26	12,52	14,26
Maluku	16,38	16,19	14,18
Maluku Utara	12,86	13,84	10,27
Papua Barat	16,95	9,29	10,92
Papua	51,32	47,18	45,48
Indonesia	10,46	8,93	7,07

Catatan : ... = Tidak ada data

Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS



PENGENDALIAN LINGKUNGAN | 6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Secara khusus, pengendalian lingkungan yang dimaksud dalam UU tersebut adalah kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup dapat berupa pencemaran air, udara, dan laut. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup dapat berupa kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Mengingat luasnya cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka pada bab pengendalian lingkungan ini hanya akan diulas beberapa isu yang berkaitan dengan penyakit menular, pembuangan sampah, biopori, dan perubahan iklim.

6.1. Penyakit Menular

Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah yang tercermin dalam kebijakan, rencana, dan program kerja, pemerintah pusat dan daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat maupun daerah dapat mengetahui lebih awal kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Salah satu dampak dan/atau risiko lingkungan hidup adalah peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Penyakit menular maupun tidak menular merupakan bentuk terganggunya kesehatan seseorang yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Berbeda dengan penyakit tidak menular, penyakit menular dapat menular dari orang yang satu ke orang lainnya. Penularan penyakit ini terjadi bila ada kontak langsung maupun melalui



6. PENGENDALIAN LINGKUNGAN

perantara antara penderita dengan orang lain. *Tuberculosis* (TBC), *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIIIDS), pneumonia, kusta, dan diare merupakan beberapa contoh penyakit menular langsung. Sedangkan contoh penyakit menular melalui *vector* dan *zoonosis* adalah demam berdarah dengue (DBD), chikungunya, filariasis, malaria, rabies, leptospirosis, antraks, dan flu burung.

Beberapa penyakit menular sebenarnya termasuk dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Penyakit menular tersebut antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang berpotensi menimbulkan kecacatan atau kematian. Ketika virus/bakteri/protozoa/jamur masuk ke dalam tubuh, tubuh akan menganggap makhluk hidup tersebut sebagai benda asing yang disebut dengan antigen. Secara alamiah sistem kekebalan tubuh akan membentuk zat anti yang disebut antibodi untuk melumpuhkan antigen. Pada saat pertama kali antibodi berinteraksi dengan antigen, respon yang diberikan tidak terlalu kuat karena antibodi belum mengenali antigen. Pada interaksi selanjutnya, sistem kekebalan tubuh telah mengenali antigen sehingga antibodi yang terbentuk lebih banyak dan dalam waktu yang lebih cepat. Proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin adalah upaya stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam upaya melawan penyakit dengan melumpuhkan antigen yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin.

Tabel 6.1
Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Provinsi, 2015

Provinsi	TBC	AIDS*	Infeksi HIV*	Pneumonia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5.935	49	48	1.129
Sumatera Utara	23.002	53	1.491	17.226
Sumatera Barat	6.988	-	243	15.373
R i a u	5.752	253	586	9.552
J a m b i	3.864	52	148	7.114
Sumatera Selatan	9.338	175	265	17.254
Bengkulu	1.871	24	87	1.039
Lampung	8.492	111	345	6.942
Kep. Bangka Belitung	1.525	61	147	7.869
Kep. Riau	2.931	212	885	859
DKI Jakarta	22.554	130	4.695	39.755
Jawa Barat	65.275	657	3.741	180.357
Jawa Tengah	37.396	963	3.005	36.279
DI Yogyakarta	2.683	91	531	2.829
Jawa Timur	44.086	647	4.155	96.087
Banten	13.899	134	649	32.978
B a l i	2.889	957	2.028	5.731
Nusa Tenggara Barat	6.066	89	194	24.872
Nusa Tenggara Timur	5.687	-	299	2.364
Kalimantan Barat	5.031	179	456	2.791
Kalimantan Tengah	2.484	26	134	408
Kalimantan Selatan	5.098	-	250	14.764
Kalimantan Timur	4.092	254	504	7.828
Kalimantan Utara	654	43	84	***
Sulawesi Utara	5.743	180	311	753
Sulawesi Tengah	3.899	112	138	10.152
Sulawesi Selatan	13.043	145	700	2.445
Sulawesi Tenggara	3.548	60	129	3.262
Gorontalo	1.400	25	24	4.226
Sulawesi Barat	1.506	-	13	1.532
Maluku	3.589	62	409	247
Maluku Utara	1.741	104	45	633
Papua Barat	2.044	7	702	-
Papua	6.805	226	3.494	-
Indonesia	330.910	6.081	30.935	554.650

Keterangan:

- : tidak ada data

* : kasus baru

** : kasus yang ditemukan di fasilitas kesehatan

*** : termasuk dalam data Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan RI



6. PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Tabel 6.1 - lanjutan

Provinsi	Kusta	Diare**	DBD	Malaria
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	524	101.368	1.509	53.921
Sumatera Utara	197	289.498	5.274	87.177
Sumatera Barat	54	109.114	3.806	6.404
R i a u	108	134.955	3.261	15.649
J a m b i	72	73.027	1.354	34.944
Sumatera Selatan	330	170.549	3.396	40.629
Bengkulu	17	39.125	1.003	32.457
Lampung	53	174.175	3.145	26.379
Kep. Bangka Belitung	35	216.890	623	67.960
Kep. Riau	24	999.809	1.795	5.627
DKI Jakarta	317	701.488	4.954	23
Jawa Barat	2.026	78.734	21.237	174
Jawa Tengah	1.807	824.531	16.398	50.654
DI Yogyakarta	105	104.041	3.420	126
Jawa Timur	4.013	49.405	20.138	3.515
Banten	1.026	83.758	3.011	401
B a l i	61	83.839	10.704	5.283
Nusa Tenggara Barat	292	11.120	1.252	101.990
Nusa Tenggara Timur	280	53.166	506	283.112
Kalimantan Barat	57	60.282	1.115	49.128
Kalimantan Tengah	26	179.669	1.502	23.909
Kalimantan Selatan	145	51.416	3.668	14.056
Kalimantan Timur	176	90.423	6.458	15.229
Kalimantan Utara	41	100.631	719	4.240
Sulawesi Utara	427	106.592	730	22.274
Sulawesi Tengah	494	32.676	1.571	36.657
Sulawesi Selatan	1.220	67.397	3.974	24.811
Sulawesi Tenggara	281	253.249	1.500	14.403
Gorontalo	223	23.689	231	18.635
Sulawesi Barat	215	24.278	486	32.817
Maluku	211	26.247	78	66.474
Maluku Utara	544	18.650	119	25.349
Papua Barat	717	43.483	66	121.257
Papua	1.084	27.959	647	327.113
Indonesia	17.202	5.405.233	129.650	1.612.777

Keterangan:

- : tidak ada data

* : kasus baru

** : kasus yang ditemukan di fasilitas kesehatan

*** : termasuk dalam data Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan RI

Tabel 6.1 - lanjutan

Provinsi	Gigitan Hewan Penular Rabies	Difteri	Tetanus Neonatarum	Campak
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	740	0	0	14
Sumatera Utara	4.158	0	0	80
Sumatera Barat	3.358	110	3	425
R i a u	1.539	0	0	18
J a m b i	755	3	2	491
Sumatera Selatan	852	5	1	415
Bengkulu	1.017	0	0	142
Lampung	1.041	1	0	37
Kep. Bangka Belitung	0	0	1	63
Kep. Riau	0	0	0	158
DKI Jakarta	0	8	1	1.209
Jawa Barat	522	21	0	650
Jawa Tengah	0	0	0	-
DI Yogyakarta	0	0	0	37
Jawa Timur	0	67	21	1.072
Banten	9	16	12	606
B a l i	42.630	2	0	141
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	3
Nusa Tenggara Timur	7.386	0	0	-
Kalimantan Barat	599	13	5	254
Kalimantan Tengah	1.904	0	2	311
Kalimantan Selatan	100	0	0	-
Kalimantan Timur	670	0	0	-
Kalimantan Utara	***	0	-	-
Sulawesi Utara	4.346	2	0	62
Sulawesi Tengah	1.672	0	0	450
Sulawesi Selatan	3.722	2	1	836
Sulawesi Tenggara	1.187	0	1	101
Gorontalo	674	0	0	43
Sulawesi Barat	30	0	0	-
Maluku	927	0	2	23
Maluku Utara	565	0	0	126
Papua Barat	0	0	0	-
Papua	0	2	1	418
Indonesia	80.403	252	53	8.185

Keterangan:

- : tidak ada data

* : kasus baru

** : kasus yang ditemukan di fasilitas kesehatan

*** : termasuk dalam data Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015, Kementerian Kesehatan RI



6.2. Pembuangan Sampah

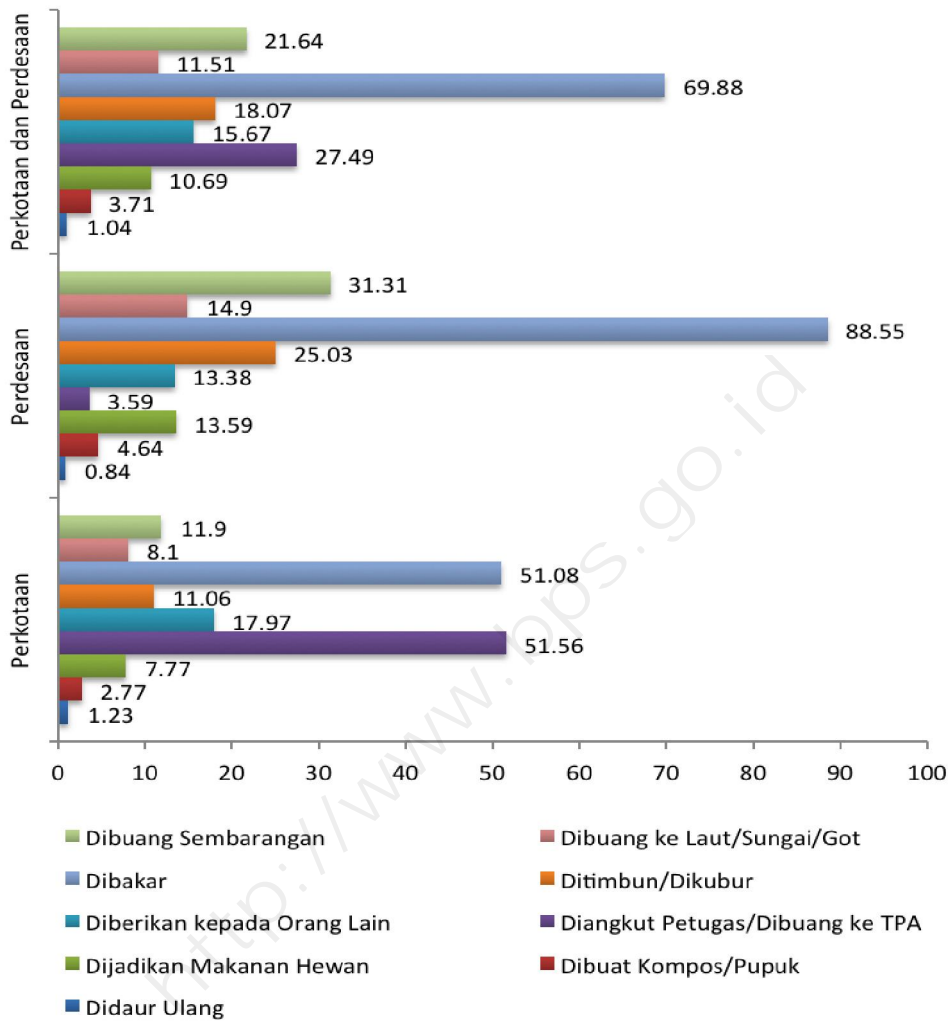
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jumlah penduduk yang meningkat serta perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan semakin beragamnya karakteristik sampah.

Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Hasil Susenas Modul Ketahanan Sosial tahun 2014 menunjukkan masih banyak rumah tangga di Indonesia yang memiliki kebiasaan membuang sampah tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Rumah tangga yang membuang sampah dengan cara dibakar tercatat sebesar 69,88 persen, dibuang sembarangan ke tanah lapang, kebun, dan lain-lain sebesar 21,64 persen, ditimbun/dikubur sebesar 18,07 persen, dan dibuang ke laut/sungai/got sebesar 11,51 persen. Rumah tangga yang membuang sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan relatif belum banyak, seperti membuang sampah dengan cara diangkut petugas/dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS)/tempat pembuangan akhir (TPA) sebesar 27,49 persen, dijual/diberikan kepada orang lain sebesar 15,67 persen, dijadikan makanan hewan/ternak sebesar 10,69 persen, dan didaur ulang/dibuat kompos sebesar 4,75 persen.

Bila diperhatikan lebih lanjut, terdapat perbedaan persentase yang cukup signifikan antara rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan pada cara pembuangan sampah diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA (Gambar 5.1). Di perdesaan, persentase rumah tangga yang sampahnya diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA hanya sebesar 3,59 persen sedangkan di perkotaan mencapai 51,56 persen. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan petugas pengangkut sampah dan tempat pembuangan sampah di suatu wilayah. Menurut hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014, jumlah desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki TPS ada sebanyak 9.192 desa. Tak dapat dipungkiri, ketersediaan fasilitas sampah juga ikut memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah.



Gambar 6.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Perlakuan Terhadap Sampah dan Tipe Daerah, 2014



Sumber: Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014, BPS

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Salah satu tugas pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sampah sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Fasilitas ini tidak hanya disediakan oleh pemerintah, namun juga dapat disediakan oleh pihak swasta. Untuk memfasilitasi dan mempermudah



keikutsertaan pihak swasta dalam pengelolaan sampah di Indonesia, salah satu upayanya adalah pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimitrakan dengan dunia usaha seperti perizinan, kemudahan investasi, proses tender, pengelolaan aset pemerintah, dan prosedur kerjasama pemerintah dan swasta.

6.3. Biopori

Keberadaan area resapan air sangat penting bagi konservasi sumber daya air. Area resapan air dapat berupa sumur resapan, lubang resapan biopori, taman/tanah berumput, dan lain sebagainya. Kenyataan yang ada, perencanaan bangunan seringkali kurang memperhatikan aspek lingkungan khususnya area resapan air. Lahan-lahan yang tidak terpakai untuk bangunan, khususnya di wilayah perkotaan, biasanya diperkeras dengan cara diplester atau diberi *paving block*. Hal ini menyebabkan banyak lahan-lahan yang tergenang air dan bahkan terjadi banjir saat musim hujan serta kekeringan atau kekurangan air khususnya air tanah saat musim kemarau.

Dilatarbelakangi keprihatinan terhadap tingginya sampah organik dan banjir yang kerap melanda, Kamir Raziudin Brata, seorang peneliti dan dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) memperkenalkan tentang mulsa vertikal yang akhirnya dikenal dengan nama lubang resapan biopori. Beberapa penelitiannya terkait hal itu antara lain "Pemanfaatan Sisa Tanaman Sebagai Mulsa Vertikal (Vertical Mulch) dalam Usaha Konservasi Tanah dan Air pada Pertanian Lahan Kering di Latosol Darmaga" (1993), "Efektivitas Mulsa Vertikal (Vertical Mulch) dalam Pengendalian Aliran Permukaan, Erosi, dan Kehilangan Unsur Hara Pada Pertanian Lahan Kering di Latosol Darmaga" (1994), dan "Penggunaan Cacing Tanah Untuk Peningkatan Efektivitas Mulsa Vertikal Sebagai Tindakan Konservasi Tanah dan Air Terpadu pada Pertanian Lahan Kering di Latosol Darmaga" (1995).

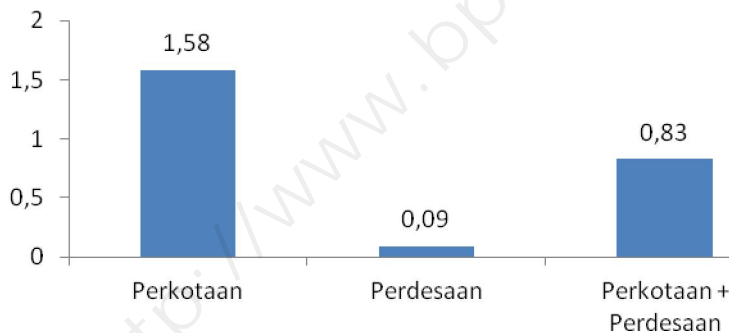
Lubang resapan biopori merupakan lubang berbentuk silinder berdiameter sekitar 10 cm atau lebih, yang digali dalam tanah. Kedalaman penggalian tidak boleh melebihi muka air tanah, yaitu sekitar 100 cm dari permukaan tanah. Lubang resapan biopori dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Meningkatnya kemampuan tanah dalam meresapkan air akan memperkecil peluang terjadinya aliran



air di permukaan tanah atau dengan kata lain akan dapat mengurangi potensi bahaya banjir (Brata dan Nelistya, 2008:10--14).

Menurut hasil Susenas Modul Ketahanan Sosial tahun 2014, masih banyak rumah tangga yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya keberadaan lubang resapan biopori. Dari Gambar 5.2 diketahui bahwa persentase rumah tangga yang mengetahui atau pernah mendengar tentang lubang resapan biopori hanya 8,26 persen, sedangkan yang memiliki lubang resapan biopori hanya sekitar 0,83 persen. Bila dilihat menurut tipe daerah, persentase rumah tangga yang mengetahui/mendengar tentang lubang biopori di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (14,01 persen berbanding 2,55 persen). Persentase rumah tangga yang telah memiliki lubang resapan biopori lebih kecil lagi, hanya 1,58 persen di daerah perkotaan dan 0,09 persen di perdesaan..

Gambar 6.2
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui atau Pernah Mendengar Mengenai Lubang Resapan Biopori menurut Tipe Daerah, 2014



Sumber: Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014, BPS



6. PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Tabel 6.2

Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Lubang Resapan Biopori Menurut Tipe Daerah dan Provinsi, 2014

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,66	0,14	0,28
Sumatera Utara	0,28	-	0,14
Sumatera Barat	0,31	-	0,12
R i a u	0,73	0,19	0,40
J a m b i	0,32	-	0,09
Sumatera Selatan	-	0,09	0,06
Bengkulu	-	-	-
Lampung	3,27	0,01	0,81
Kep. Bangka Belitung	0,45	0,22	0,34
Kep. Riau	1,05	-	0,89
DKI Jakarta	2,83	-	2,83
Jawa Barat	3,11	0,05	2,03
Jawa Tengah	0,39	0,04	0,20
DI Yogyakarta	4,12	-	2,81
Jawa Timur	0,51	0,21	0,35
Banten	3,05	0,20	2,19
B a l i	1,23	-	0,76
Nusa Tenggara Barat	0,46	-	0,19
Nusa Tenggara Timur	0,53	0,11	0,19
Kalimantan Barat	0,12	0,15	0,15
Kalimantan Tengah	0,25	0,34	0,31
Kalimantan Selatan	0,22	-	0,09
Kalimantan Timur	0,76	-	0,47
Sulawesi Utara	0,05	-	0,02
Sulawesi Tengah	-	0,10	0,07
Sulawesi Selatan	0,27	-	0,10
Sulawesi Tenggara	-	0,27	0,19
Gorontalo	0,42	-	0,15
Sulawesi Barat	0,66	0,19	0,29
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	0,15	0,11
Papua	0,46	0,08	0,17
Indonesia	1,58	0,09	0,83

Sumber: Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014, BPS

6.4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan satu dari tujuh dampak dan risiko lingkungan yang mungkin terjadi akibat penerapan kebijakan, rencana, dan/atau program pemerintah pusat dan daerah yang harus diantisipasi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Iklim didefinisikan sebagai rata-rata peristiwa cuaca di suatu daerah tertentu, termasuk perubahan ekstrim musiman dan variasinya dalam waktu yang relatif lama, baik secara lokal, regional atau meliputi bumi secara keseluruhan. Iklim dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang cukup lama dari aspek-aspek seperti orbit bumi, perubahan samudera, atau keluaran energi dari matahari. Perubahan iklim sebenarnya merupakan suatu hal alami dan terjadi secara pelan. Namun, seiring dengan berlangsungnya pembangunan sering mengakibatkan degradasi lingkungan. Perilaku konsumtif dan gaya hidup juga dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan. Hal ini mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca semakin meningkat setiap waktunya.

Gas Rumah Kaca (GRK) atau *Green House Gases* adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki fungsi seperti panel-panel kaca di rumah kaca yang bertugas menangkap energi panas matahari agar tidak dilepas kembali seluruhnya ke atmosfer. Setelah mencapai seluruh permukaan bumi, tanah beserta air dan ekosistem lainnya menyerap energi dari sinar tersebut. Setelah terserap, energi ini akan dipancarkan kembali ke atmosfer. Sebagian energi dikembalikan ke angkasa, dan sebagian ditangkap oleh GRK. Hal ini menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi yang dikenal dengan istilah pemanasan global. Kenaikan suhu ini merubah iklim, menyebabkan berubahnya pola cuaca, menimbulkan peningkatan curah hujan yang tidak biasa, badai, bahkan bencana alam yang dapat memakan banyak korban. Dari sekian banyak jenis gas tersebut, GRK yang berdampak besar adalah Karbon Dioksida (CO_2), Nitro Oksida (NO_x), Sulfur Oksida (SO_x), Methana (CH_4), *Chlorofluorocarbon* (CFC), dan *Hydrofluorocarbon* (HFC). Tabel 5.3 menyajikan kondisi kualitas udara dalam hal ini konsentrasi partikel NO_2 dan SO_2 di masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2014.



6. PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Tabel 6.3
Kondisi Partikel NO₂ dan SO₂ Menurut Provinsi, 2012 – 2014

Provinsi	NO ₂			SO ₂		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,44	7,46	6,82	7,73	6,51	6,51
Sumatera Utara	12,28	8,84	12,30	12,34	3,97	6,35
Sumatera Barat	8,99	8,35	7,87	9,57	8,03	7,28
R i a u	41,09	12,44	12,44	28,89	9,40	9,40
J a m b i	10,37	12,08	9,17	9,98	8,43	7,19
Sumatera Selatan	13,48	13,77	11,71	8,73	8,74	7,76
Bengkulu	11,54	11,54	5,02	6,95	7,15	2,96
Lampung	11,82	12,16	12,16	13,61	12,90	12,90
Kep. Bangka Belitung	9,30	7,42	7,42	10,92	7,74	7,74
Kep. Riau	8,10	7,22	2,73	4,67	4,39	2,90
DKI Jakarta	26,63	43,37	43,37	30,79	24,43	24,43
Jawa Barat	21,32	22,74	22,74	18,16	15,58	15,58
Jawa Tengah	15,64	16,64	14,83	11,10	10,49	9,71
DI Yogyakarta	11,67	13,34	10,38	7,00	7,38	5,53
Jawa Timur	18,80	20,95	19,03	17,01	13,36	11,94
Banten	27,48	25,48	25,48	24,00	21,65	21,65
B a l i	13,12	13,66	11,11	9,22	9,56	7,58
Nusa Tenggara Barat	9,89	10,31	8,31	8,99	8,34	6,56
Nusa Tenggara Timur	9,80	11,05	11,05	9,93	10,35	10,35
Kalimantan Barat	8,38	9,02	9,02	7,59	8,32	8,32
Kalimantan Tengah	8,70	8,05	7,05	9,89	7,95	6,66
Kalimantan Selatan	12,23	13,31	10,50	14,11	11,32	9,10
Kalimantan Timur	12,11	10,58	10,58	9,51	7,52	7,52
Sulawesi Utara	8,02	8,91	8,91	12,75	11,09	11,09
Sulawesi Tengah	8,33	8,33	3,17	8,51	8,51	3,36
Sulawesi Selatan	8,80	8,75	8,75	8,25	8,28	8,28
Sulawesi Tenggara	9,14	9,25	8,77	17,84	9,09	5,36
Gorontalo	7,21	7,12	4,90	8,19	7,46	6,09
Sulawesi Barat	7,71	8,23	7,43	9,48	9,55	6,84
Maluku	5,26	4,44	3,45	8,78	8,33	4,62
Maluku Utara	3,39	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00
Papua Barat	8,63	7,75	7,75	6,14	6,14	6,14
Papua	8,09	8,09	4,24	9,18	9,18	3,18

Sumber: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

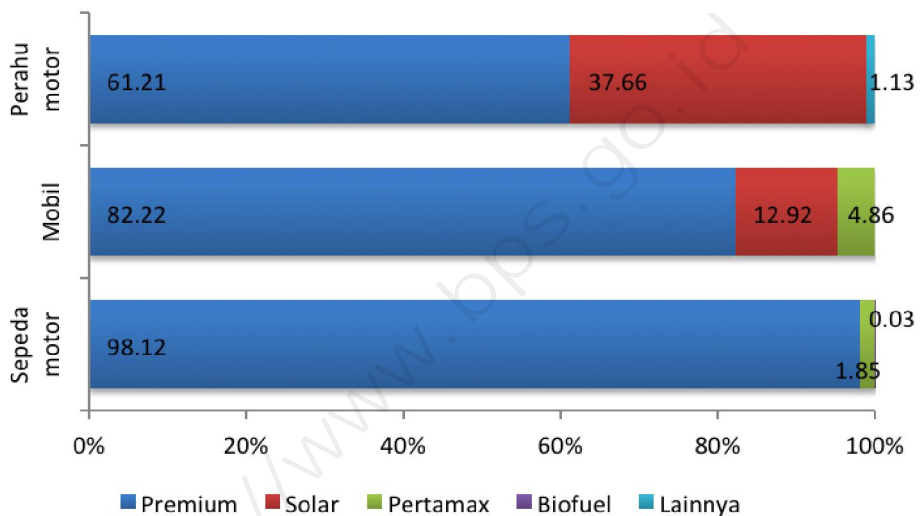
Aktivitas manusia dapat menyumbang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim, di antaranya adalah penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi, deforestasi, penggunaan CFC untuk lemari es dan aerosol, pembuangan sampah, serta pertanian dan peternakan.



1. Penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi

Aktivitas pemakaian kendaraan bermotor oleh masyarakat tidak terlepas dari penggunaan bahan bakar minyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat pertumbuhan konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia naik 10 persen setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan pencemaran udara yang berasal dari knalpot dan mesin kendaraan tersebut. Bahan buangan dari kendaraan bermotor dikenal sebagai sumber utama bahan-bahan polutan.

Gambar 6.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kendaraan Bermotor yang Dimiliki dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan, 2014



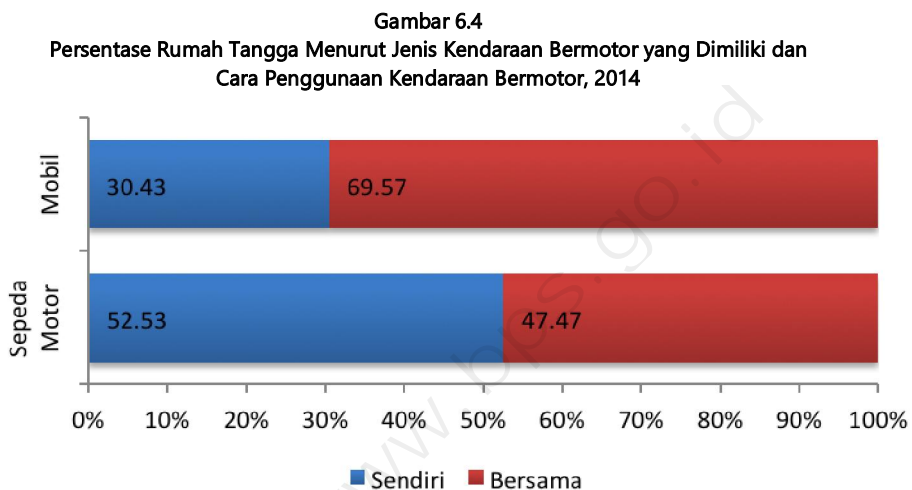
Sumber: Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014, BPS

Menurut hasil Susenas Modul Ketahanan Sosial tahun 2014, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3, dari seluruh rumah tangga yang memiliki sepeda motor, 98,12 persen di antaranya masih menggunakan premium yang merupakan bahan bakar tidak ramah lingkungan dan hanya 1,88 persen lainnya yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, yaitu pertamax (1,85 persen) dan *biofuel* (0,03 persen). Sementara itu, rumah tangga yang memiliki mobil sebanyak 95,14 persen menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan yang terdiri atas premium 82,22 persen dan solar 12,92 persen. Hanya 4,86 persen yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan yaitu pertamax. Bahkan rumah tangga yang memiliki perahu motor, seluruhnya masih menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan.



6. PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Perilaku masyarakat dalam berkendara juga berdampak terhadap pencemaran udara, yang berasal dari asap buangan kendaraan bermotor. Sebagaimana hasil Susenas Modul Ketahanan Sosial tahun 2014 menunjukkan (Gambar 5.4) bahwa 52,53 persen rumah tangga yang memiliki sepeda motor dan 30,43 persen rumah tangga yang memiliki mobil lebih sering menggunakan kendaraannya sendirian tanpa penumpang. Penggunaan kendaraan bermotor secara sendiri lebih banyak menghabiskan bahan bakar dan menimbulkan lebih banyak emisi GRK.



Sumber: Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014, BPS

2. Deforestasi

Hutan tropis maupun hutan rawa gambut menyimpan karbon di tanah dan pepohonan. Layaknya seperti spons, hutan menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Ketika terjadi pembakaran, pembalakan hutan, serta pengeringan hutan rawa gambut untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, hutan-hutan tersebut melepaskan karbon dioksida yang berbahaya ke udara.

Tabel 6.4
Jumlah Titik Api dan Luas Kebakaran Hutan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Jumlah Titik Api	Luas Kebakaran Hutan (ha)			
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	969	0,02	-	155,64	155,66
Sumatera Utara	1.052	2.243,00	142,00	50,00	2.435,00
Sumatera Barat	285	66,50	47,50	-	114,00
R i a u	4.400	69,10	22,50	2.874,50	2.966,10
J a m b i	1.244	1.292,60	320,50	616,50	2.229,60
Sumatera Selatan	3.794	7.695,71	-	407,40	8.103,11
Bengkulu	54	-	-	-	0,00
Lampung	570	-	3,30	19,50	22,80
Kep. Bangka Belitung	919	-	-	-	-
Kep. Riau	101	-	-	-	0,00
DKI Jakarta	1	-	-	-	0,00
Jawa Barat	198	5,00	-	547,69	552,69
Jawa Tengah	182	-	-	159,76	159,76
DI Yogyakarta	1	-	-	0,27	0,27
Jawa Timur	554	-	14,00	4.961,32	4.975,32
Banten	28	-	-	2,00	2,00
B a l i	21	-	20,00	10,00	30,00
Nusa Tenggara Barat	-	24,50	877,45	3.075,60	3.977,55
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	980,87	980,87
Kalimantan Barat	5.381	0,17	-	630,48	630,65
Kalimantan Tengah	5.434	110,00	65,00	1.005,37	1.180,37
Kalimantan Selatan	1.528	22,50	2,50	227,00	252,00
Kalimantan Timur	2.190	-	-	289,39	289,39
Kalimantan Utara	434	-	-	-	0,00
Sulawesi Utara	33	-	-	-	0,00
Sulawesi Tengah	503	-	-	70,73	70,73
Sulawesi Selatan	559	45,70	375,60	81,00	502,30
Sulawesi Tenggara	699	174,15	-	2.235,05	2.409,20
Gorontalo	45	2,00	-	-	2,00
Sulawesi Barat	87	-	-	-	0,00
Maluku	-	-	-	179,83	179,83
Maluku Utara	-	-	-	6,00	6,00
Papua Barat	-	-	-	-	-
Papua	-	300,00	-	-	300,00
Indonesia	31.266	12.050,95	1.890,35	18.585,90	32.527,20

Keterangan: - : tidak ada data

Sumber: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Dalam publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 disebutkan bahwa pada tahun 2014 terjadi kebakaran hutan seluas



6. PENGENDALIAN LINGKUNGAN

kurang lebih 32,527.20 ha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24,91 persen atau seluas 8.103,11 ha terjadi di Sumatera Selatan. Dilihat dari jenis hutan yang terbakar, lebih dari 50 persen luas kebakaran hutan merupakan hutan konservasi. Tentu saja hal ini patut menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan, antara lain dengan deteksi titik api. Melalui pemantauan dengan Satelit NOAA 18 dan peta dari Badan Planologi Kehutanan, terdeteksi sebanyak 31.266 titik panas di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2014 (publikasi Statistik Kementerian Lingkungan dan Kehutanan). Sebagaimana tertera pada Tabel 5.4, tiga provinsi terdeteksi jumlah titik panas terbanyak adalah Kalimantan Tengah (5.434 titik api), Kalimantan Barat (5.381 titik api), dan Riau (4.400 titik api).

3. Penggunaan CFC untuk lemari es dan aerosol

CFC (*Chlorofluorocarbon*) banyak dipakai dalam proses industri. Sebagai contoh, CFC digunakan sebagai pendingin pada lemari es dan juga sebagai bahan pembakar pada aerosol. Walaupun persentase jumlah CFC di atmosfer kurang dari 0,000001 persen, namun CFC ini memiliki efek rumah kaca sekitar 10.000 kali dari karbon dioksida. Selain itu, CFC juga dapat menghancurkan ozon yang merupakan bagian penting pada lapisan atas atmosfer.

4. Pembuangan sampah

Sampah makanan dan sampah organik yang dibuang ke tempat sampah selanjutnya akan dibawa dan terkubur pada tempat-tempat pembuangan sampah. Saat sampah yang berada paling bawah mengalami pembusukan, terbentuk gas metan yang dapat menimbulkan efek rumah kaca.

5. Pertanian dan peternakan

Untuk meningkatkan kesuburan tanah, petani sering menambahkan pupuk penyubur nitrogen ke dalam tanah. Nitrogen kemudian berubah menjadi Nitro Oksida (N_2O) yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang sangat kuat. Pada sektor peternakan, seperti yang telah diketahui, sapi menciptakan gas metan saat rumput mengalami peragian di perut mereka. Menurut hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) tahun 2011, di Indonesia terdapat 14,8 juta sapi potong dan 597,2 ribu sapi perah. Jumlah yang tidak sedikit ini akan menambah kadar GRK di atmosfer.

PENGELUARAN RUMAH TANGGA | 7

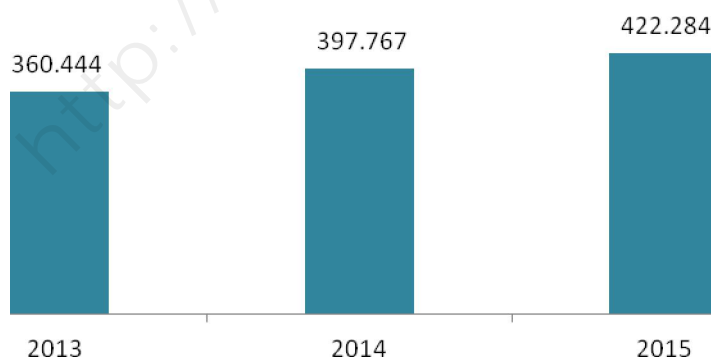
Salah satu kegiatan ekonomi rumah tangga adalah kegiatan konsumsi/pengeluaran. Kegiatan konsumsi biasanya dilakukan untuk mengambil kegunaan dari suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga meliputi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Kebutuhan bukan makanan di antaranya sandang, pendidikan, dan perumahan.

Bab ini membahas tentang konsumsi untuk mendapatkan kebutuhan rumah seperti pengeluaran kontrak/sewa rumah, listrik, bahan bakar memasak, serta pemeliharaan dan perbaikan ringan rumah.

7.1. Pengeluaran Kontrak/Sewa

Salah satu kebutuhan pokok rumah tangga adalah tempat tinggal untuk berteduh dan beristirahat setelah beraktifitas. Rumah yang ditempati tidak semuanya merupakan milik dari anggota rumah tangga, ada sebagian yang kontrak/sewa. Rumah tangga yang mengontrak/sewa akan mengeluarkan pendapatannya untuk membayar kontrak/sewa guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Gambar 7.1
Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan untuk Kontrak/Sewa, 2013-2015



Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS

Gambar 7.1 memperlihatkan perkembangan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk kontrak/sewa dari tahun 2013 sampai 2015. Di tahun 2015, rata-rata pengeluaran untuk sewa/kontrak rumah adalah sebesar Rp422.284,00. Rata-



7. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

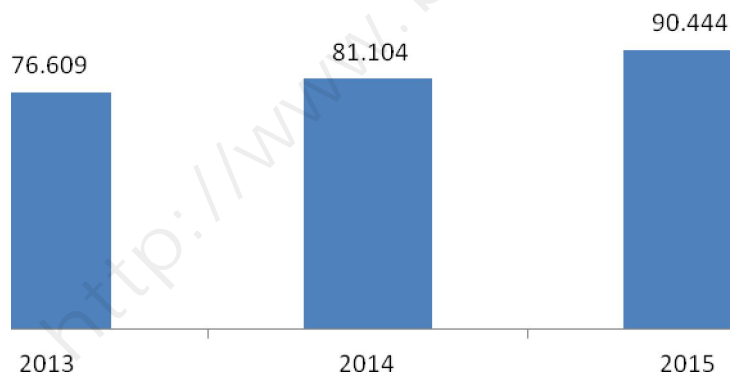
rata ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp360.444,00 di tahun 2013 dan Rp397.767,00 di tahun 2014.

Tabel 7.1 menyajikan rata-rata pengeluaran sebulan untuk kontrak/sewa menurut provinsi. Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran sebulan untuk kontrak/sewa bervariasi di setiap provinsi. Rata-rata tertinggi pengeluaran sebulan untuk kontrak/sewa ada di Provinsi Papua yaitu Rp790.397,00 sedangkan rata-rata terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar Rp254.746,00.

7.2. Pengeluaran Penerangan Listrik

Pengeluaran rumah tangga selain untuk kontrak sewa adalah untuk penerangan tempat tinggal. Sumber penerangan utama di rumah tangga terbagi menjadi sumber penerangan bukan listrik dan listrik. Penerangan listrik meliputi listrik PLN dan non PLN seperti pihak swasta, pengelolaan bersama dengan tenaga air, diesel dan sebagainya.

Gambar 7.2
Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan untuk Listrik (dalam rupiah),
2013-2015



Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS

Gambar 7.2 memperlihatkan secara nasional rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk listrik di tahun 2015 adalah Rp90.444,00. Rata-rata ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp76.609,00 di tahun 2013 dan Rp81.104,00 di tahun 2014.

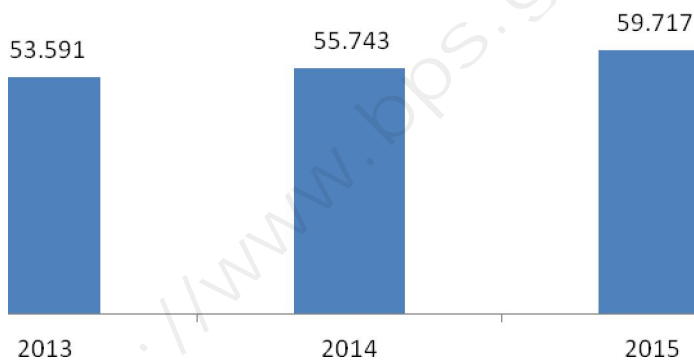
Tabel 7.2 menyajikan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk listrik menurut provinsi. Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk listrik bervariasi di setiap provinsi. Rata-rata tertinggi pengeluaran

rumah tangga sebulan untuk listrik ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp261.180,00 dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp42.383,00.

7.3. Pengeluaran Bahan Bakar Memasak

Kebutuhan rumah tangga terhadap pangan tidak terlepas dari memasak yang menggunakan bahan bakar. Bahan bakar untuk memasak meliputi gas (lpg dan gas kota), minyak tanah, arang/batu bara/briket, kayu bakar dan lainnya. Gambar 7.3 memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk bahan bakar memasak di tahun 2015 adalah sebesar Rp59.717,00. Rata-rata ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp 53.591 di tahun 2013 dan Rp 55.743 di tahun 2014.

Gambar 7.3
Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan untuk Bahan Bakar Memasak
(dalam rupiah), 2013-2015



Sumber : Susenas KOR 2013-2015, BPS

Tabel 7.3 menyajikan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk bahan bakar memasak menurut provinsi. Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk bahan bakar memasak adalah Rp59.711,00. Rata-rata tertinggi pengeluaran rumah tangga sebulan untuk bahan bakar memasak ada di Provinsi Papua sebesar Rp113.717,00 dan terendah di Kepulauan Riau sebesar Rp50.668,00.

7.4. Pengeluaran Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan Rumah

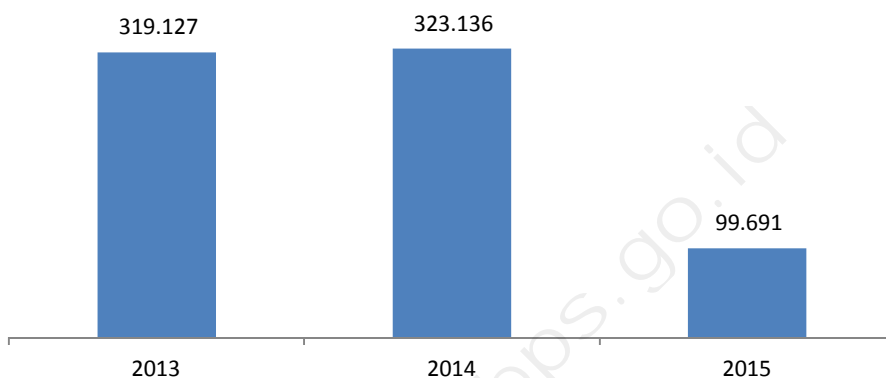
Rumah membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan agar tetap nyaman dan aman sebagai tempat tinggal. Pemeliharaan dan perbaikan yang dimaksud adalah pemeliharaan dan perbaikan yang sifatnya ringan seperti pembelian cat, penggantian genteng, engsel pintu, engsel jendela, kaca, dan sebagainya.



7. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Gambar 7.4 menyajikan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan pada tahun 2015. Rata-rata pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan pada tahun 2015 adalah Rp99.691,00. Rata-rata ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp319.127,00 di tahun 2013 dan Rp323.136,00 di tahun 2014.

Gambar 7.4
Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan untuk Pemeliharaan Rumah dan Perbaikan Ringan
(dalam rupiah), 2013-2015



Sumber : Susenas KOR 2013- 2015, BPS

Tabel 7.4 menyajikan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan menurut provinsi. Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah Rp99.691,00. Rata-rata tertinggi pengeluaran rumah tangga sebulan untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan ada di Provinsi Bali sebesar Rp374.380,00 dan terendah di Sulawesi Barat sebesar Rp37.528,00.

Tabel 7.1
Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan untuk Kontrak/Sewa (dalam rupiah) menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	396 007	342 465	359 869
Sumatera Utara	231 014	250 537	275 203
Sumatera Barat	299 640	285 040	316 969
R i a u	412 836	423 890	422 833
J a m b i	404 696	296 644	319 980
Sumatera Selatan	258 937	299 752	328 417
Bengkulu	259 673	269 261	266 955
Lampung	242 439	248 395	275 369
Kep Bangka Belitung	398 894	428 323	440 081
Kepulauan Riau	428 531	520 421	528 188
DKI Jakarta	485 182	518 085	598 551
Jawa Barat	358 532	462 764	425 494
Jawa Tengah	225 074	243 167	281 946
DI Yogyakarta	271 639	262 498	282 203
Jawa Timur	219 785	271 531	329 664
Banten	345 494	400 967	403 420
B a l i	440 877	459 868	442 397
Nusa Tenggara Barat	294 203	310 160	295 805
Nusa Tenggara Timur	293 892	278 330	343 711
Kalimantan Barat	369 691	380 199	409 221
Kalimantan Tengah	346 880	387 163	373 295
Kalimantan Selatan	346 899	347 069	351 534
Kalimantan Timur	552 063	563 127	637 075
Kalimantan Utara	-	-	481 732
Sulawesi Utara	372 742	377 247	332 844
Sulawesi Tengah	360 694	354 032	387 836
Sulawesi Selatan	287 307	326 583	363 176
Sulawesi Tenggara	269 112	242 491	254 746
Gorontalo	410 521	389 982	382 838
Sulawesi Barat	271 312	284 676	372 400
Maluku	412 563	449 131	445 443
Maluku Utara	415 748	431 320	423 451
Papua Barat	658 366	659 825	672 467
Papua	785 843	825 089	790 397
Indonesia	360 444	397 767	422 284

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



7. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Tabel 7.2
Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan untuk Pembayaran Listrik (dalam rupiah)
menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	62 655	70 157	73 366
Sumatera Utara	77 932	79 870	80 781
Sumatera Barat	81 069	84 114	84 592
R i a u	139 426	137 263	141 869
J a m b i	104 844	107 667	125 746
Sumatera Selatan	84 825	89 000	90 845
Bengkulu	70 250	74 120	76 118
Lampung	69 731	71 723	75 155
Kep Bangka Belitung	109 777	121 606	131 870
Kepulauan Riau	186 567	188 114	182 551
DKI Jakarta	193 315	217 194	261 180
Jawa Barat	76 427	75 349	85 765
Jawa Tengah	50 036	52 904	56 747
DI Yoqyakarta	63 031	59 874	65 682
Jawa Timur	55 848	62 448	78 032
Banten	102 870	118 036	131 538
B a l i	76 724	85 859	89 331
Nusa Tenqqara Barat	36 714	39 470	42 383
Nusa Tenggara Timur	47 802	50 546	54 882
Kalimantan Barat	81 953	88 449	88 281
Kalimantan Tengah	79 239	82 156	86 953
Kalimantan Selatan	64 453	64 855	72 758
Kalimantan Timur	127 971	134 233	140 762
Kalimantan Utara	-	-	186 552
Sulawesi Utara	72 588	75 021	75 083
Sulawesi Tengah	61 893	64 263	63 622
Sulawesi Selatan	68 233	76 772	82 725
Sulawesi Tenqqara	62 982	65 742	73 080
Gorontalo	55 389	52 278	55 102
Sulawesi Barat	56 580	58 155	64 116
Maluku	58 406	64 503	73 756
Maluku Utara	64 951	71 701	80 825
Papua Barat	114 148	117 429	125 356
Papua	120 617	144 721	133 072
Indonesia	76 609	81 104	90 444

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS

7. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Tabel 7.3
Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan untuk Bahan Bakar Memasak (dalam rupiah), m
enurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	44 085	48 045	51 360
Sumatera Utara	57 957	58 779	62 859
Sumatera Barat	69 457	71 412	70 197
R i a u	64 589	62 262	62 836
J a m b i	57 946	57 819	58 587
Sumatera Selatan	51 904	51 997	54 338
Bengkulu	55 387	58 245	57 674
Lampung	50 068	53 966	55 962
Kep Bangka Belitung	77 391	72 578	63 761
Kepulauan Riau	52 577	50 608	50 668
DKI Jakarta	49 935	52 653	56 967
Jawa Barat	45 487	45 713	50 858
Jawa Tengah	50 077	53 613	55 040
DI Yogyakarta	46 007	47 716	54 702
Jawa Timur	51 671	54 964	62 699
Banten	45 248	52 002	54 143
B a l i	67 402	68 884	70 751
Nusa Tenggara Barat	53 719	53 371	54 075
Nusa Tenggara Timur	72 277	77 858	86 581
Kalimantan Barat	62 365	62 540	66 409
Kalimantan Tengah	72 376	77 560	78 190
Kalimantan Selatan	59 459	55 209	56 621
Kalimantan Timur	67 393	66 884	70 103
Kalimantan Utara	-	-	102 467
Sulawesi Utara	66 288	67 514	61 209
Sulawesi Tengah	87 043	92 137	91 614
Sulawesi Selatan	47 464	49 313	52 566
Sulawesi Tenggara	69 409	69 582	73 089
Gorontalo	61 031	56 957	53 407
Sulawesi Barat	64 353	59 034	65 811
Maluku	90 110	94 659	101 124
Maluku Utara	64 122	67 659	93 175
Papua Barat	68 382	61 731	94 451
Papua	81 318	100 238	113 717
Indonesia	53 591	55 743	59 717

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



7. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Tabel 7.4

Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan untuk Pemeliharaan Rumah dan Perbaikan Ringan dalam rupiah), menurut Provinsi, 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	141 268	150 632	103 149
Sumatera Utara	363 071	375 903	77 911
Sumatera Barat	920 120	627 965	234 663
R i a u	542 624	446 229	124 821
J a m b i	381 691	338 278	74 235
Sumatera Selatan	396 961	339 631	58 272
Bengkulu	841 140	324 583	109 881
Lampung	225 747	264 144	98 389
Kep Bangka Belitung	677 701	169 720	97 904
Kepulauan Riau	447 744	1 057 503	215 022
DKI Jakarta	645 449	696 945	270 794
Jawa Barat	231 736	277 317	88 273
Jawa Tengah	241 979	255 609	94 284
DI Yogyakarta	169 800	203 892	81 013
Jawa Timur	259 642	278 227	84 055
Banten	1 112 357	600 885	136 867
B a l i	1 017 724	608 520	374 380
Nusa Tenqqara Barat	290 321	239 228	56 508
Nusa Tenggara Timur	187 028	207 995	100 692
Kalimantan Barat	274 174	401 905	76 824
Kalimantan Tengah	295 851	356 885	64 963
Kalimantan Selatan	314 175	200 850	196 427
Kalimantan Timur	384 101	567 731	156 540
Kalimantan Utara	-	-	132 366
Sulawesi Utara	448 594	353 330	65 351
Sulawesi Tengah	274 535	225 372	60 906
Sulawesi Selatan	262 601	239 295	73 630
Sulawesi Tenqqara	92 963	135 049	43 172
Gorontalo	309 282	170 899	50 879
Sulawesi Barat	122 897	121 045	37 528
Maluku	203135	165 372	49 850
Maluku Utara	163 562	214 665	39 627
Papua Barat	314 626	378 498	156 826
Papua	333 493	258 299	40 085
Indonesia	319 127	323 136	99 691

Sumber: Susenas KOR 2013-2015, BPS



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2012. Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau 2011
- _____. 2015. Statistik Potensi Desa Indonesia 2014
- _____. 2015. Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014
- _____. 2016. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015
- _____. 2016. Buku I Pedoman Kepala Susenas
- Brata, Kamir R dan Anne Nelistya. 2008. Lubang Resapan Biopori. Jakarta : Penebar Swadaya. Hal: 5--14
- Kementerian Kesehatan. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2014. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- _____. 2015. RPJMN 2015-2019
- _____. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- WHO. 1990. Environment and health: the European charter and commentary. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1990, p. 18 (WHO Regional Publications, European Series, No. 35).
- <http://www.antaraneews.com/print/246383/asap-kayu-bakar-picu-serangan-jantung-dan-kanker>
- http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/kampanye/powerswitch/spt_iklim/
- <http://www.menlh.go.id/penataan-regulasi-pengelolaan-sampah/>
- <http://hubunganalumni.ipb.ac.id/kamir-r-brata-penemu-lubang-resapan-biopori/>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

